



Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman

#GISA
GERAKAN INDONESIA SADAR
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



dukcapil.slemankab.go.id



@dukcapilsleman



0274 868 362



dukcapil@slemankab.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun buku "Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2023". Buku ini disusun dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No 65 tahun 2010 tentang Profil Perkembangan Kependudukan, serta Permendagri No 53 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Administrasi kependudukan diarahkan untuk memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang akan mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain bertujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. Selain itu untuk menyediakan data kependudukan yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sangat disadari, bahwa buku ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, saran dan kritik terhadap buku ini sangat diharapkan, guna penyempurnaannya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu banyak memberikan dukungan, baik moril, material dan kerjasama yang baik, demi kelancaran penyusunan buku ini.

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarakatuh

Plt. Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Ruang Lingkup.....	4
1.5 Pengertian Umum.....	5
1.5.1 Kependudukan.....	5
1.5.2 Tenaga Kerja.....	7
1.5.3 Sosial.....	8
1.5.3.1 Pendidikan.....	8
1.5.3.2 Kesehatan.....	9
BAB 2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN	21
2.1 Kondisi Geografis.....	21
2.2 Kondisi Demografis Kabupaten Sleman.....	22
2.3 Potensi Kabupaten Sleman	24
BAB 3 SUMBER DATA	26
3.1 Sumber Data Hasil Registrasi.....	26
3.2 Sumber Data Hasil Non-Registrasi.....	27
3.3 Sumber Data dari Lintas Sektor.....	27
BAB 4 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	28
4.1 Data Kuantitas Penduduk.....	28
4.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk.....	28
4.1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	32
4.1.3 Karakteristik Penduduk Menurut Kondisi Demografi.....	35
4.1.3.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	35
4.1.3.2 Rasio Jenis Kelamin.....	38
4.1.3.3 Umur Median (Median Age).....	43
4.1.3.4 Piramida Penduduk.....	45
a) Piramida Penduduk Kecamatan Gamping.....	46
b) Piramida Penduduk Kecamatan Godean.....	47

c) Piramida Penduduk Kecamatan Moyudan.....	48
d) Piramida Penduduk Kecamatan Minggir.....	49
e) Piramida Penduduk Kecamatan Seyegan.....	50
f) Piramida Penduduk Kecamatan Mlati.....	51
g) Piramida Penduduk Kecamatan Depok.....	52
h) Piramida Penduduk Kecamatan Berbah.....	53
i) Piramida Penduduk Kecamatan Prambanan.....	54
j) Piramida Penduduk Kecamatan Kalasan.....	55
k) Piramida Penduduk Kecamatan Ngemplak.....	56
l) Piramida Penduduk Kecamatan Ngaglik.....	57
m) Piramida Penduduk Kecamatan Sleman.....	58
n) Piramida Penduduk Kecamatan Tempel.....	59
o) Piramida Penduduk Kecamatan Turi.....	60
p) Piramida Penduduk Kecamatan Pakem.....	61
q) Piramida Penduduk Kecamatan Cangkringan.....	62
4.1.3.5 Rasio Ketergantungan.....	63
4.1.4 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin.....	65
4.1.4.1 Angka Perkawinan Umum.....	69
4.1.4.2 Angka Perceraian Umum.....	70
4.1.5 Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga.....	74
4.1.5.1 Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga.....	74
4.1.5.2 Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga (SHDK).....	76
4.1.5.3 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin.....	76
4.1.5.4 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin.....	78
4.1.5.5 Karakteristik Kepala keluarga Berdasarkan Status Bekerja.....	79
4.1.6 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial.....	81
4.1.6.1 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....	81
4.1.6.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan.....	85
4.1.7 Kelahiran.....	87
4.1.7.1 Jumlah Kelahiran Menurut Kapanewon.....	88
4.1.7.2 Angka Kelahiran Kasar Menurut Kapanewon.....	88
4.2 Data Kualitas Penduduk.....	89
4.2.1 Kesehatan.....	91
4.2.1.1 Rasio Anak Perempuan.....	92

4.2.1.2 Angka Kematian Bayi.....	93
4.2.1.3 Angka Kematian Anak dan Balita.....	99
4.2.1.4 Angka Kematian Ibu.....	102
4.2.1.5 Fertilitas.....	105
4.2.1.6 Keluarga Berencana.....	109
4.2.1.7 Pernikahan, Talak, Rujuk.....	115
4.2.2 Pendidikan.....	118
4.2.3 Ekonomi.....	127
4.2.4 Sosial.....	138
4.2.4.1 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.....	138
4.2.4.2 Penyandang Dissabilitas.....	141
BAB 5 KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.....	144
5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga dan KTP.....	144
5.2 Kepemilikan Akta Kelahiran.....	146
5.3 Kepemilikan Akta Perkawinan.....	148
5.4 Kepemilikan Akta Perceraian.....	151

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administratif Kabupaten Sleman	22
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kapanewon dan Jenis Kelamin Berdasarkan Data SIAK Tahun 2024	23
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2024	31
Tabel 4.2	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2024	33
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024	37
Tabel 4.4	Rasio Jenis Kelamin menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024	39
Tabel 4.5	Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sleman Tahun 2023	40
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Lansia (Usia \geq 65 Tahun) Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Kapanewon Tahun 2023	43
Tabel 4.7	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Sleman Menurut Kapanewon Tahun 2024	64
Tabel 4.8	Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin Berdasarkan Kapanewon Menurut Data SIAK Tahun 2024	68
Tabel 4.9	Banyaknya Nikah dan Angka Perkawinan Umum Menurut Kapanewon Tahun 2024	70
Tabel 4.10	Banyaknya Cerai, Angka Perceraian Kasar, dan Angka Perceraian Umum Menurut Kapanewon Tahun 2024	71
Tabel 4.11	Jumlah Penduduk, Jumlah Kepala Keluarga, dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Tahun 2024	74
Tabel 4.12	Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Tahun 2024	76
Tabel 4.13	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Kapanewon Tahun 2024	77
Tabel 4.14	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan dan Kapanewon Tahun 2024	78
Tabel 4.15	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2024	83
Tabel 4.16	Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan yang Dianut Berdasarkan Data SIAK Tahun 2024	86

Tabel 4.17	Jumlah Kelahiran Menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024	88
Tabel 4.18	Distribusi Parameter Kelahiran di Kabupaten Sleman Tahun 2023	89
Tabel 4.19	Rasio Anak Perempuan Menurut Kapanewon Tahun 2024	92
Tabel 4.20	Distribusi Angka Kematian Bayi menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024	95
Tabel 4.21	Distribusi Kematian Neonatal menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024	96
Tabel 4.22	Distribusi Kematian Post-Neonatal menurut Kapanewon di Kabupaten Tahun 2024	97
Tabel 4.23	Distribusi Angka Kematian Anak menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman tahun 2024	100
Tabel 4.24	Distribusi Angka Kematian Balita menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024	101
Tabel 4.25	Distribusi Angka Kematian Ibu menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024	104
Tabel 4.26	Distribusi Parameter Kelahiran di Kabupaten Sleman Tahun 2024	106
Tabel 4.27	Rasio Anak dan Perempuan di Kabupaten Sleman Tahun 2024	108
Tabel 4.28	Parameter Keluarga Berencana menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024	111
Tabel 4.29	Unmet Need Menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024	115
Tabel 4.30	Distribusi Pernikahan Anak, Cerai, dan Rujuk menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024	117
Tabel 4.31	Angka Partisipasi Kasar SD - SMP Kabupaten Sleman Tahun 2024	120
Tabel 4.32	Angka Partisipasi Kasar SD Kabupaten Sleman Tahun 2024	121
Tabel 4.33	Angka Partisipasi Kasar SMP Kabupaten Sleman Tahun 2024	122
Tabel 4.34	Angka Partisipasi Murni SMP Kabupaten Sleman Tahun 2024	123
Tabel 4.35	Angka Partisipasi Murni SMP Tepat Waktu Kabupaten Sleman Tahun 2024	124
Tabel 4.36	Angka Partisipasi Kasar SMA Kabupaten Sleman Tahun 2024	125
Tabel 4.37	Angka Partisipasi Murni SMA Tepat Waktu Kabupaten Sleman Tahun 2023	131

Tabel 4.38	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun Kabupaten Sleman Tahun 2024	125
Tabel 4.39	Angka Partisipasi Sekolah di Sleman 7-12 Tahun Kabupaten Sleman Tahun 2024	125
Tabel 4.40	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun Kabupaten Sleman Tahun 2024	125
Tabel 4.41	Angka Partisipasi Sekolah di Sleman 16-18 Tahun Kabupaten Sleman Tahun 2024	125
Tabel 4.42	Data Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sleman Tahun 2024	129
Tabel 4.43	Data Angkatan Kerja Kabupaten Sleman Tahun 2024	130
Tabel 4.44	Data Jenis Pekerjaan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2024	136
Tabel 4.45	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024	141
Tabel 4.46	Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman Tahun 2024	144
Tabel 5.1	Capaian Persentase Kepemilikan KK dan KTP	145
Tabel 5.2	Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran	148
Tabel 5.3	Kepemilikan Akta Perkawinan	150
Tabel 5.4	Kepemilikan Akta Perceraian	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Analisis Kuadran Antara Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2024	34
Gambar 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Kapanewon dan Jenis Kelamin Berdasarkan Data SIAK Tahun 2024	36
Gambar 4.3	Analisis Rasio jenis kelamin menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sleman Tahun 2024	40
Gambar 4.4	Piramida Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2024	45
Gambar 4.5	Piramida Penduduk Kapanewon Gamping Tahun 2024	47
Gambar 4.6	Piramida Penduduk Kapanewon Godean Tahun 2024	48
Gambar 4.7	Piramida Penduduk Kapanewon Moyudan Tahun 2024	49
Gambar 4.8	Piramida Penduduk Kapanewon Minggir Tahun 2024	50
Gambar 4.9	Piramida Penduduk Kapanewon Seyegan Tahun 2024	51
Gambar 4.10	Piramida Penduduk Kapanewon Mlati Tahun 2024	52
Gambar 4.11	Piramida Penduduk Kapanewon Depok Tahun 2024	53
Gambar 4.12	Piramida Penduduk Kapanewon Berbah Tahun 2024	54
Gambar 4.13	Piramida Penduduk Kapanewon Prambanan Tahun 2024	55
Gambar 4.14	Piramida Penduduk Kapanewon Kalasan Tahun 2024	56
Gambar 4.15	Piramida Penduduk Kapanewon Ngemplak Tahun 2024	57
Gambar 4.16	Piramida Penduduk Kapanewon Ngaglik Tahun 2024	58
Gambar 4.17	Piramida Penduduk Kapanewon Sleman Tahun 2024	59
Gambar 4.18	Piramida Penduduk Kapanewon Tempel Tahun 2024	60
Gambar 4.19	Piramida Penduduk Kapanewon Turi Tahun 2024	61
Gambar 4.20	Piramida Penduduk Kapanewon Pakem Tahun 2024	62
Gambar 4.21	Piramida Penduduk Kapanewon Cangkringan Tahun 2024	63
Gambar 4.22	Persentase Penduduk Sleman Menurut Status Perkawinan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2024	68
Gambar 4.23	Persentase Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja Tahun 2024	80
Gambar 4.24	Persentase Kepala Keluarga Menurut Pendidikan Tahun 2024	82
Gambar 4.25	Jumlah Penduduk Sleman Menurut Agama/Kepercayaan yang Dianut Berdasarkan Data SIAK Tahun 2024	85
Gambar 4.26	Persentase Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan yang Dianut Tahun 2024	87
Gambar 5.1	Capaian Persentase Kepemilikan KK	145
Gambar 5.2	Capaian Persentase Rekam KTP	146
Gambar 5.3	Kepemilikan Akta Perkawinan	149
Gambar 5.4	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	153
Gambar 5.5	Kepemilikan Kartu Identitas Anak Menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman	158

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan sebuah wilayah tidak bisa dipisahkan dari aspek kependudukan. Faktor kependudukan penting dalam perencanaan pembangunan karena jumlah penduduk dan komposisinya akan mempengaruhi permintaan akan sumber daya, tenaga kerja, infrastruktur, dan layanan publik. Kependudukan merupakan isu strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Pertama, kependudukan atau dalam hal ini penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program yang dilakukan. Kedua, keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan pemerintah. Ketiga, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Keempat, karena luasnya cakupan masalah kependudukan.

Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Secara garis besar pembangunan kependudukan dapat dijabarkan dalam 5 (lima) dimensi, yaitu: Pertama, berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua, berkaitan dengan kualitas penduduk yang berhubungan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan. Pembangunan Kependudukan dan KB di Indonesia harus benar-benar dapat memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa indikator utama dari hasil pembangunan dinyatakan melalui tingkat pendapatan atau distribusinya, tingkat partisipasi kerja, status pendidikan dan kesehatan, serta kualitas lingkungan. Pembangunan ini akan berdampak pada kualitas manusia sebagai elemen kependudukan. Penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan. Pentingnya komponen penduduk dalam pembangunan menjadikan kebutuhan akan data kependudukan sebagai hal yang sangat mendasar. Data dapat menjadi bukti empiris dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan (*evidence-based policy*). Sehubungan dengan hal tersebut, data kependudukan dibutuhkan untuk mengakomodasi empat hal penting yaitu: peningkatan kualitas, pengendalian kuantitas, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta terakhir administrasi penduduk.

Kebutuhan data dan informasi kependudukan yang lengkap dan akurat untuk menunjang perencanaan pembangunan sangat penting dan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan dan pembangunan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan mengamanatkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan.

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kabupaten Sleman dan prediksi prospek kependudukan di masa yang akan datang untuk menunjang pemenuhan kebutuhan informasi kependudukan dalam merencanakan kebijakan sektor maupun program sektoral terkait dalam upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan penduduk. Dengan profil perkembangan kependudukan ini, akan diketahui jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, menurut umur, jenis kelamin, persebaran, laju pertumbuhannya, maupun karakteristik lainnya. Informasi pada Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini diambil dari informasi pada rentang waktu tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan profil perkembangan kependudukan adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- c) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
- g) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- h) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010/Nomor 162/Menkes/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan adalah :

- a) Menyediakan informasi perkembangan kependudukan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.
- b) Mengetahui jumlah sumber daya manusia yang ada, menurut umur, jenis kelamin maupun karakteristik yang lainnya.

- c) Mengetahui keadaan dan persebaran penduduk dari waktu ke waktu, agar penyebarannya serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

1.4 Ruang Lingkup

Laporan ini menyajikan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2024. Profil ini merupakan hasil olahan rekaman data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bersumber dari hasil kompilasi dan konsolidasi registrasi KTP-el. Di KTP-el terekam data dasar demografi menyangkut umur, tahun kelahiran, jenis kelamin, pendidikan, dan kegiatan penduduk. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengolah data itu dan dijadikan sebagai data dasar kependudukan di Indonesia. Sejak tahun 2013, hasil olahan itu oleh Kemendagri khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), digunakan sebagai data dasar penyusunan profil kependudukan di tiap kabupaten/kota dan provinsi.

Laporan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sleman membahas tentang perkembangan kependudukan yang terdiri atas data kuantitas, kualitas, dan kepemilikan dokumen kependudukan lingkup wilayah Kabupaten Sleman yang meliputi 17 kapanewon yaitu Kapanewon Gamping, Kapanewon Godean, Kapanewon Moyudan, Kapanewon Minggir, Kapanewon Seyegan, Kapanewon Mlati, Kapanewon Depok, Kapanewon Berbah, Kapanewon Prambanan, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Ngemplak, Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Sleman, Kapanewon Tempel, Kapanewon Turi, Kapanewon Pakem dan Kapanewon Cangkringan. Data kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk, jumlah komposisi dan persebaran penduduk, penduduk menurut karakteristik demografi. Data kualitas penduduk, meliputi kondisi kependudukan dari sisi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial. Data kepemilikan dokumen kependudukan berupa kepemilikan Kartu Keluarga, KTP-eI, Kartu Identitas Anak, dan Akta meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian.

1.5 Pengertian Umum

Pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan:

1.5.1 Kependudukan

Beberapa pengertian umum dalam konsep kependudukan diantaranya.

- a) **Penduduk** adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- b) **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- c) **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)** adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
- d) **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
- e) **Perkembangan Kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
- f) **Profil perkembangan kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
- g) **Persebaran penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan.
- h) **Penyebaran penduduk** adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- i) **Umur median** (*median age*) adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median.
- j) **Rasio jenis kelamin** (*sex ratio*) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.
- k) **Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan** (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun).
- l) **Rasio kepadatan penduduk** (*density ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu.
- m) **Laju pertumbuhan penduduk** adalah rata-rata tahunan laju perubahan jumlah penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu.
- n) **Piramida penduduk** adalah grafik berbentuk piramida yang merupakan gambaran secara visual dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.
- o) **Rata-rata usia kawin pertama** (*singulate mean age at marriage*) adalah perkiraan rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin).
- p) **Keluarga** adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran,adopsi dan lain sebagainya.
- q) **Jumlah kelahiran** adalah banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu.
- r) **Angka Kelahiran Umum** (*General Fertility Rate/GFR*), adalah angka yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir dari setiap 1.000 wanita pada usia

reproduksi atau melahirkan yaitu pada kelompok usia 15-49 tahun.

- s) **Angka Kelahiran Kasar** (*Crude Birth Rate/CRB*), adalah angka kelahiran yang menunjukkan jumlah kelahiran perseribu penduduk dalam suatu periode.
- t) **Rasio anak dan perempuan** (*CWR= child women ratio*) adalah rasio antara jumlah anak dibawah lima tahun di suatu tempat pada suatu waktu, dengan penduduk perempuan usia 15-49 tahun.
- u) **Tingkat Kematian Kasar** (*Crude Death Rate/CDR*), adalah angka yang menunjukkan rata-rata kematian perseribu penduduk dalam satu tahun.
- aa) **Tingkat Kematian Bayi** (*Infant Mortality Rate/IMR*), adalah angka yang menunjukkan banyaknya bayi yang meninggal dari setiap 1.000 bayi yang lahir hidup.

1.5.2 Tenaga Kerja

Beberapa pengertian umum dalam konsep ketenagakerjaan diantaranya.

- a) **Penduduk** adalah penduduk yang berdomisili atau menetap di wilayah tersebut.
- b) **Penduduk usia kerja** adalah penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih.
- c) **Angkatan kerja** adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih yang sudah bekerja dan yang belum bekerja tetapi punya keinginan bekerja (masih menganggur).
- d) **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dengan kegiatan utama sekolah, ibu rumah tangga, pensiunan, dan penduduk dengan status disabilitas.
- e) **Penganggur terbuka** adalah penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang tidak bekerja tetapi punya keinginan bekerja/sedang mencari pekerjaan atau disebut penganggur murni. Pada definisi ini benar-benar tidak bekerja, tidak membantu orang lain termasuk orang tua dalam pekerjaannya meskipun tidak dibayar.

- f) **Setengah pengangguran** adalah angkatan kerja yang bekerja namun belum termanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan tersebut diukur dengan jam kerja. Setengah pengangguran adalah angkatan kerja yang bekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam per minggu.
- g) **Usia Bekerja** adalah penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang bekerja untuk memperoleh pendapatan, atau membantu memperoleh pendapatan.
- h) **Usia Sekolah** adalah penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang masih sekolah, sedangkan anak sekolah tetapi usianya di bawah 15 tahun tidak termasuk definisi ini, tetapi masuk definisi anak.
- i) **Mengurus Rumah Tangga** adalah penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang mengurus rumah tangga, karena sesuatu alasan misalnya pendapatan sudah cukup, mengurus anak dan alasan lain sehingga tidak ingin bekerja atau mencari pekerjaan lagi.
- j) **Penerima pendapatan dan lainnya** adalah penduduk dengan usia 15 tahun atau lebih yang tidak bekerja karena alasan telah menerima pendapatan dari pensiun, simpanan/sewa atas milik dan karena alasan usia tua, pensiun, cacat dan alasan lainnya.
- k) **Anak.** Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

1.5.3 Sosial

Beberapa pengertian umum dalam konsep aspek sosial diantaranya.

1.5.3.1 Pendidikan

- a) **Angka Partisipasi Sekolah** adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang sekolah dengan jumlah pendudukan menurut umur tertentu.

- b) **Angka Partisipasi Kasar** adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah pendudukan menurut umur jenjang pendidikan tertentu. Contoh Angka Partisipasi Kasar SD merupakan perbandingan antara jumlah siswa SD dibandingkan dengan jumlah penduduk berumur 7-12 tahun.
- c) **Angka Partisipasi Murni** adalah jumlah penduduk menurut usia tertentu dengan kegiatan utama sekolah. Contoh Angka partisipasi murni SD merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang sekolah dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun pada suatu wilayah.
- d) **Angka putus sekolah** adalah persentase atau jumlah siswa yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu.

1.5.3.2 Kesehatan

- a) **Angka Kematian Bayi** adalah jumlah bayi yang mati menurut jumlah kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu di suatu wilayah
- b) **Angka Kematian Ibu (AKI)** adalah jumlah ibu yang meninggal karena proses kelahiran dibandingkan dengan jumlah ibu yang melahirkan hidup pada suatu tahun tertentu di suatu wilayah
- c) **Angka kematian Balita** adalah ukuran jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu.
- d) **Angka kematian Neonatal (AKN)** adalah jumlah kematian bayi yang terjadi pada usia 28 hari pertama setelah kelahiran, dinyatakan per 1.000 kelahiran hidup. Dengan kata lain, AKN mengukur tingkat kematian bayi dalam periode kritis awal kehidupan mereka.
- e) **Angka kematian Postneonatal** adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian bayi usia 28 hari sampai kurang dari 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Jadi ini adalah indikator kematian bayi setelah periode neonatal (28 hari pertama kehidupan) dan sebelum mencapai usia satu tahun.

1.5.3.3 Sosial

Dua puluh enam jenis PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dengan batasan pengertian dan kriteria antara lain adalah sebagai berikut ini.

a) **Anak Balita Terlantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang diterlantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksplorasi untuk tujuan tertentu.

1. Yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orang tuanya pada orang lain, di tempat umum, rumah sakit, dan sebagainya
2. Tidak pernah / tidak cukup diberi ASI dan/atau susu tambahan/pengganti
3. Makan makanan pokok tidak mencukupi.
4. Anak dititipkan atau ditinggal sendiri yang menimbulkan keterlantaran
5. Apabila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern (dibawa ke puskesmas, dll)
6. Mengalami eksplorasi

b) **Anak Terlantar** (sesuai SK Permensos RI No 27 Tahun 1984) adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai < 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

1. Berasal dari keluarga fakir miskin
2. Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga)
3. Ditelantarkan oleh orang tua/keluarga
4. Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga

5. Anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP
6. Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari
7. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai
8. Bila sakit tidak diobati
9. Yatim, piatu atau yatim piatu
10. Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin
11. Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja

c) **Anak berhadapan dengan hukum** (sesuai UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak) adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai <18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria:

1. Anak diindikasikan (terlaporkan di kepolisian) melakukan pelanggaran hukum
2. Anak yang mengikuti proses peradilan
3. Anak yang berstatus diversi (pengalihan hak asuh anak kepada pihak lain atas keputusan pengadilan)
4. Anak yang telah menjalani masa hukuman pidana atau sedang mengikuti pembinaan dalam bimbingan kemasyarakatan lapas
5. Anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum
6. Anak yang menjadi korban sengketa hukum akibat perceraian orang tua:perdata
7. Anak yang karena suatu sebab menjadi saksi tindak pidana

d) **Anak Jalanan** adalah seorang anak yang berusia 5 sampai <18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan

kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria:

1. Anak yang rentan bekerja di jalanan karena suatu sebab
2. Anak yang melakukan aktivitas di jalanan
3. Anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan
4. Jangka waktu di jalanan lebih dari 6 (enam) jam per hari dan dihitung untuk 1 (satu) bulan yang lalu

e) **Anak dengan Kedisabilitasan** (ADK) adalah seseorang yang berusia 18 tahun kebawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang teridri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

1. Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu, wicara
2. Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
3. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
4. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari

f) **Anak yang memerlukan perlindungan khusus** adalah anak usia 0-<18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban eksplorasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Kriteria:

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak korban perdagangan

3. Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental
4. Anak korban eksplorasi
5. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil.
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta
7. Anak yang terinfeksi HIV/AIDS

g) **Lanjut Usia Terlantar** adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria:

1. Tidak ada keluarga yang mengurusnya
2. Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari
4. Menderita minimal 1 (satu) jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya
5. Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin. Untuk Lanjut Usia Terlantar terbagi menjadi 2 kriteria yaitu:

LUT Potensial : lanjut usia terlantar yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan/ atau jasa

LUT Tidak Potensial : lanjut usia terlantar yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.

h) **Penyandang disabilitas** adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

1. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktivitas sehari-hari
2. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari
3. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai
4. Penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara
5. Penyandang disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
6. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda

i) **Tuna susila** adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun
2. Menjajakan diri di tempat umum di lokasi atau tempat pelacuran (bordil), dan tempat terselubung (warung remang-remang, hotel, mall dan diskotik)

j) **Gelandangan** adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal disembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar.
2. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya
3. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas, dan lain-lain.

k) **Pengemis** adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun
2. Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampa lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya
3. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, dengan alasan meminta sumbangan untuk organisasi tertentu
4. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk pada umumnya

l) **Pemulung** adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan mendaur-ulang barang-barang bekas.

Kriteria: Tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mengais langsung dan mendaur-ulang barang bekas, dan lain-lain

m) **Kelompok minoritas** adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian. Kriteria:

1. Tidak dominan dengan ciri khas, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk
2. Mempunyai perilaku menyimpang

n) **Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)** adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 (tiga) bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun
2. Telah selesai atau segera keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana
3. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat
4. Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap
5. Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

o) Orang **dengan HIV/AIDS (ODHA)** adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun
2. Telah terinfeksi HIV/AIDS

p) Korban **penyalahgunaan NAPZA** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan)
2. Pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras, yang dilakukan sekali, lebih sekali atau dalam taraf coba-coba
3. Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang
4. Tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya

q) Korban **trafficking** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana

perdagangan orang. (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Kriteria:

1. Mengalami tindak kekerasan
2. Mengalami eksploitasi seksual
3. Mengalami penelantaran
4. Mengalami pengusiran (deportasi)
5. Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu

r) Korban **tindak kekerasan** adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria: Individu, kelompok maupun kesatuan masyarakat yang mengalami:

1. tindak kekerasan
2. penelantaran
3. eksploitasi
4. diskriminasi
5. bentuk-bentuk tindak kekerasan lainnya

s) Pekerja **Migran Bermasalah Sosial (PMBS)** adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.

Kriteria:

1. Calon pekerja migran

2. Pekerja migran internal
3. Pekerja migran lintas negara
4. Eks pekerja migran

yang mengalami masalah sosial dalam bentuk:

1. tindak kekerasan
2. eksploitasi
3. penelantaran
4. pengusiran (deportasi)
5. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempatnya bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu

t) **Korban bencana alam** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kriteria: Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

1. Korban jiwa
2. Kerusakan lingkungan
3. Kerugian harta benda, dan
4. Dampak psikologis

u) **Korban bencana sosial** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria: Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

1. Korban jiwa manusia
2. Kerusakan lingkungan

3. Kerugian harta benda, dan
4. Dampak psikologis

v) **Perempuan Rawan Sosial Ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria:

1. Perempuan berusia 18-59 tahun
2. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan
3. Menjadi pencari nafkah utama keluarga
4. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak .

w) **Fakir miskin** adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Kriteria:

1. Penghasilan rendah atau berada di bawah garis sangat miskin yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS per wilayah provinsi dan kabupaten/kota
2. Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial)
3. Keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang per tahun)
4. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga sakit
5. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun bagi anak- anaknya
6. Tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas

garis sangat miskin

7. Tinggal di rumah yang tidak layak huni
8. Sulit memperoleh air yang bersih

aa) **Keluarga bermasalah sosial psikologis** adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar

Kriteria:

1. Suami atau istri sering tanpa saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi
2. Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga
3. Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak maubergaul/berkomunikasi
4. Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kebupaten di DIY yang memiliki ketinggian antara 100 meter hingga 2.500 meter di atas permukaan laut. Bagian selatan relatif datar dengan peruntukan utama sebagai lahan pertanian, industri, dan permukiman, sedangkan bagian utara merupakan lereng Gunung Merapi yang memiliki banyak potensi sumber air. Bagian lereng selatan Gunung Merapi terdapat dua buah bukit, yaitu Bukit Turgo dan Bukit Plawangan yang merupakan bagian dari kawasan wisata Kaliurang. Beberapa sungai yang mengalir melalui Kabupaten Sleman menuju Pantai Selatan antara lain Sungai Progo, Krasak, Sempor, Kuning, Boyong, Winongo, Gendol dan Opak. Luas wilayah Kabupaten Sleman 574,82 Km² atau 18% dari luas wilayah DIY, terbentang di antara 110°33'00" dan 110°13'00" Bujur Timur, serta 7°34'51" dan 7°47'03" Lintang Selatan. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Magelang, serta di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.

Secara administratif, Kabupaten Sleman terbagi atas 17 kapanewon, 86 kalurahan, dan 1.212 pedukuhan. Adapun detail pembagian wilayah yang ada di kabupaten sleman adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administratif Kabupaten Sleman

Kapanewon	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Desa	Jumlah Pedukuhan
1. Gamping	2,925	5	59
2. Godean	2,684	7	77
3. Moyudan	2,762	4	65
4. Minggir	2,727	5	68
5. Seyegan	2,663	5	67
6. Mlati	2,852	5	74
7. Depok	3,555	3	58
8. Berbah	2,299	4	58
9. Prambanan	4,135	6	68
10. Kalasan	3,584	4	80
11. Ngemplak	3,571	5	82
12. Ngaglik	3,852	6	87
13. Sleman	3,132	5	83
14. Tempel	3,249	8	110
15. Turi	4,309	4	42
16. Pakem	4,384	5	61
17. Cangkringan	4,799	5	73
Kabupaten Sleman	57,482	86	1.212

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, 2014

2.2 Kondisi Demografis Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman menjadi salah satu wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki daya tarik bagi para pendatang. Salah satu potensi tersebut disebabkan oleh adanya perguruan tinggi ternama, seperti UGM, UNY, UPN, dan UIN Sunan Kalijaga; empat perguruan tinggi negeri kedinasan (STPN, AAU, MMTC, dan STTN- BATAN), serta 46 perguruan tinggi swasta, seperti UII, USD, dan UAJ. Berdasarkan data SIAK Tahun 2024 seperti dalam Tabel 2.2, jumlah penduduk Kabupaten Sleman sebanyak 1.125.571 jiwa, yang terdiri atas laki-laki sebesar 557.436 jiwa atau 49,52 persen dan perempuan sebesar 568.135 jiwa atau 50,48 persen.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kapanewon dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kapanewon	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		Laki2	Persen	Perempuan	Persen	Jumlah
1	Gamping	48.361	49,65	49.047	50,35	97.408
2	Godean	36.134	49,77	36.470	50,23	72.604
3	Moyudan	16.862	49,62	17.119	50,38	33.981
4	Minggir	15.979	48,80	16.768	51,20	32.747
5	Seyegan	26.438	49,69	26.765	50,31	53.203
6	Mlati	47.854	49,80	48.234	50,20	96.088
7	Depok	62.625	49,27	64.486	50,73	127.111
8	Berbah	28.840	49,50	29.425	50,50	58.265
9	Prambanan	27.520	49,37	28.220	50,63	55.740
10	Kalasan	43.545	49,56	44.319	50,44	87.864
11	Ngemplak	33.099	49,57	33.675	50,43	66.774
12	Ngaglik	51.537	49,39	52.803	50,61	104.340
13	Sleman	36.159	49,56	36.806	50,44	72.965
14	Tempel	27.501	49,48	28.075	50,52	55.576
15	Turi	19.354	49,97	19.378	50,03	38.732
16	Pakem	19.503	49,29	20.065	50,71	39.568
17	Cangkringan	16.125	49,46	16.480	50,54	32.605
Kabupaten Sleman		557.436	49,52	568.135	50,48	1.125.571

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

Berdasarkan jumlah penduduk menurut wilayah di Kabupaten Sleman pada tahun 2024, diketahui jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kapanewon Depok yang mencapai 127.111 jiwa (11,29 persen), terbesar kedua adalah Kapanewon Ngaglik sebanyak 104.340 jiwa (9,27 persen). Wilayah dengan jumlah penduduk paling rendah adalah Kapanewon Cangkringan dengan jumlah penduduk 32.605 jiwa (2,89 persen).

Kondisi jumlah penduduk menurut wilayah dapat memberikan gambaran tingkat kemajuan suatu wilayah. Suatu daerah yang memiliki daya tarik, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pendidikan, menjadi tujuan bagi para penduduk untuk migrasi ke

wilayah tersebut, baik penduduk dari kabupaten lain maupun luar provinsi. Empat kapanewon dengan penduduk terpadat di Sleman tersebut (Depok, Ngaglik, Gamping, dan Mlati) merupakan wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta sehingga tumbuh pesat menjadi pusat pertumbuhan, baik pendidikan, industri, perdagangan, maupun jasa. Kapanewon Cangkringan yang memiliki jumlah penduduk terkecil merupakan wilayah yang mempunyai fungsi khusus atau wilayah penyangga (*buffer zone*) bersama dengan Kapanewon Tempel, Turi, dan Pakem yang berada di lereng Gunung Merapi.

2.3 Potensi Kabupaten Sleman

Pengembangan sumber daya alam didasarkan pada 4 kawasan, yaitu: pertama, pengembangan sumber daya alam Kawasan lereng gunung Merapi, wilayah yang masuk dalam Kawasan ini adalah Kapanewon Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan sampai dengan Puncak Gunung Merapi. Pengembangan wilayah yang ada di Kawasan ini adalah bertumpu pada eksplorasi sumber daya air dan potensi ekowisata yang mengandalkan aktivitas gunung Merapi dan ekosistemnya.

Pengembangan Kawasan kedua, adalah Kawasan Timur Sleman yang meliputi Kapanewon Prambanan, Kalasan, dan Berbah. Wilayah ini banyak terdapat situs yang merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) sebagai pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih. Ketiga, kawasan Tengah Sleman yang merupakan wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang meliputi Kapanewon Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini berkembang pesat karena menjadi pusat pendidikan, perdagangan, jasa, dan industri. Keempat, kawasan Barat Sleman yang meliputi Kapanewon Godean, Minggir, Seyegan, dan Moyudan. Wilayah ini merupakan wilayah yang sangat subur sehingga dikembangkan sebagai daerah dengan pertanian lahan basah dan penghasilan bahan baku kegiatan industri kerajinan.

Pada aspek pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, Kabupaten Sleman terbagi menjadi 3 kawasan. Pertama, wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta, meliputi Kapanewon

Depok, Gamping, serta sebagian wilayah Kapanewon Ngaglik, Ngemplak, Kalasan Berbah, Sleman, dan Mlati. Kedua, wilayah sub-urban, meliputi kota Kapanewon Godean, Sleman, dan Ngaglik, menjadi pusat pertumbuhan karena letaknya cukup jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kapanaewon sekitarnya. Ketiga, wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga, meliputi Kapanewon Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan, yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

Pada aspek pengembangan wilayah sebagai akibat dari adanya jalur lintas antar daerah, Kabupaten Sleman dianggap sebagai salah satu wilayah yang strategis sebagai tujuan pengembangan Kawasan industri, perdagangan dan jasa. Wilayah kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi penghubung wilayah Sleman dengan beberapa kota pelabuhan seperti Semarang, Surabaya, Jakarta. Jalur tersebut melintasi wilayah Kapanewon Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, terdapat beberapa wilayah yang dilalui jalan lingkar (ring road) sebagai jalan arteri primer yaitu Kapanewon Depok, Mlati dan Gamping. Wilayah kapanewon dapat dengan cepat berkembang dari pertanian menjadi kawasan industri, perdagangan dan jasa.

Kabupaten Sleman juga merupakan daerah pendidikan dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta ternama seperti UGM, UNY, UPN, UIN, UII, STIE YKPN. Dengan banyaknya perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sleman, tentu berkembang pula kawasan hunian kost-kostan bagi mahasiswa sehingga sektor perdagangan dan jasa juga sangat pesat diwilayah tersebut terutama makanan dan minuman.

3 SUMBER DATA

Laporan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sleman berdasarkan pada data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dilengkapi dengan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Kementerian Agama, serta instansi-instansi terkait.

Dari beberapa sumber data yang disebutkan diatas dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu sumber data hasil registrasi, sumber data non-registrasi dan sumber data lintas sektor. Adapun detail dari masing-masing sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

3.1 Sumber Data Hasil Registrasi

Sumber data hasil registrasi penduduk merupakan sumber data yang berasal dari sistem registrasi yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Data hasil registrasi meliputi komponen data penduduk yang dinamis yaitu pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal dan perubahan pekerjaan. Komponen-komponen ini dapat berubah kapan saja sehingga diperlukan registrasi penduduk yang dapat berubah setiap saat.

Kelebihan penggunaan data hasil registrasi penduduk ini diantaranya adalah datanya relative lengkap manakala setiap penduduk di Kabupaten Sleman mau mendaftarkan diri, akurasi datanya sangat baik apabila semua data dapat dilaporkan, dan sifat datanya terus menerus atau *real time*. Adapun kekurangan dari sumber data hasil registrasi adalah datanya bersifat *de jure*, informasi yang disajikan relative sedikit, kelengkapan data sangat tergantung

pada kesadaran penduduk untuk melaporkan, dan kecermatan data sangat bergantung pada kontinyuitas pencatatan dan sistem.

3.2 Sumber Data Hasil Non-Registrasi

Sumber data yang berasal dari hasil non-registrasi berasal dari data sensus dan survei. Jenis data yang digunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2024 dari sumber non-registrasi sangat minim. Kondisi ini disebabkan karena aksesibilitas terhadap data sulit untuk didapatkan. Upaya yang dilakukan dalam pemanfaatan data sumber non-registrasi hanya mengacu pada hasil data yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, data tersebut diantaranya adalah profil ekonomi Kabupaten Sleman.

3.3 Sumber Data dari Lintas Sektor

Sumber data yang berasal dari lintas sektor dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Sleman sangat banyak. Data-data tersebut diperoleh dari Dinas teknis diantaranya data dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, DP3AP2KB, dan juga data dari Kementerian Agama tingkat kabupaten. Beberapa data yang dikumpulkan tersebut diantaranya adalah:

1. Data terkait Kesehatan ibu dan bayi
2. Data terkait Pendidikan
3. Data ketenagakerjaan
4. Data terkait penggunaan alat kontrasepsi

4

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

4.1 Data Kuantitas Penduduk

Komponen pokok kependudukan yang perlu dikaji dalam profil perkembangan kependudukan adalah proses kependudukan dan struktur kependudukan. Proses kependudukan mencakup aspek kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk. Struktur kependudukan mencakup aspek komposisi antara lain komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan lain-lain. Hasil dari dua komponen baik proses maupun struktur adalah dasar bagi proses pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

4.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk

Jumlah dan persebaran penduduk dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu dengan luas ruangannya (Sarwono, 1992). Sementara menurut Mantra (2003), kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni. Kepadatan penduduk merupakan indikator terjadinya tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Menurut BPS (1995), kepadatan penduduk dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Kepadatan penduduk kasar (*Crude Population Density*), yaitu menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.
- b. Kepadatan fisiologis (*Physiological Density*), yang menyatakan banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi wilayah. Lahan yang ditanami (*Cultivable Land*).
- c. Kepadatan agraris (*Agriculture Density*), menunjukkan banyaknya penduduk petani untuk setiap kilometer persegi wilayah *Cultivable Land*. Ukuran ini menggambarkan intensitas pertanian dari petani terhadap lahan yang mencerminkan efisiensi teknologi pertanian dan intensitas tenaga kerja pertanian.

Kepadatan penduduk kasar merupakan ukuran persebaran penduduk yang umum digunakan, karena selain data dan cara penghitungannya sederhana, ukuran ini sudah distandarisasi dengan luas wilayah. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk setiap 1 (satu) kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk, menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Selain itu, indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan. Sedangkan persebaran (distribusi) penduduk adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan.

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun, karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah, baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan. Sedangkan persebaran (distribusi) penduduk adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan. Berdasarkan karakteristik sumberdaya, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi empat kawasan, salah satunya adalah Kawasan Tengah yaitu wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang meliputi Kapanewon Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini cepat berkembang, merupakan pusat pendidikan, industri, perdagangan, dan jasa, sehingga tidak mengherankan jika Kapanewon Depok, Mlati, dan Gamping memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan kapanewon yang lain.

Karakteristik perkembangan wilayah dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yakni gambaran densitas penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu kepadatan juga menunjukkan persebaran penduduk pada setiap bagian wilayah di suatu daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 56/PRP/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang membagi tingkat kepadatan penduduk menjadi 4 kriteria, yaitu:

- (a) Tidak padat, dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa/km²;
- (b) Kurang padat antara 51-250 jiwa/km²;
- (c) Cukup padat 251-400 jiwa/km²; dan
- (d) Sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/km².

Kepadatan penduduk pada setiap kapanewon dapat dilihat pada Tabel 4.1 Kepadatan penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 mencapai 1.958,13 jiwa per km² dan wilayah paling padat adalah Kapanewon Depok tercatat sebanyak 3.575,56 jiwa per km². Kapanewon Depok merupakan pusat perkembangan Kabupaten Sleman, karena banyaknya perguruan tinggi di Depok sehingga menjadi daya tarik bagi pendatang. Wilayah terpadat kedua adalah Kapanewon Mlati yang mencapai 3.369,14 jiwa per km² dan ketiga adalah Kapanewon Gamping yang mencapai 3.390,13 jiwa per km². Sementara itu, wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah adalah Kapanewon Cangkringan yang hanya mencapai 679,41 jiwa per km². Untuk melihat lebih detail terkait jumlah penduduk tiap kapanewon beserta tingkat kepadatannya tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Kapanewon	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Persentase Persebaran Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Gamping	29,25	97.408	8,65%	3.330,19
2.	Godean	26,84	72.604	6,45%	2.705,07
3.	Moyudan	27,62	33.981	3,02%	1.230,30
4.	Minggir	27,27	32.747	2,91%	1.200,84
5.	Seyegan	26,63	53.203	4,73%	1.997,86
6.	Mlati	28,52	96.088	8,54%	3.369,14
7.	Depok	35,55	127.111	11,29%	3.575,56
8.	Berbah	22,99	58.265	5,18%	2.534,36
9.	Prambanan	41,35	55.740	4,95%	1.348,00
10.	Kalasan	35,84	87.864	7,81%	2.451,56
11.	Ngemplak	35,71	66.774	5,93%	1.869,90
12.	Ngaglik	38,52	104.340	9,27%	2.708,72
13.	Sleman	31,32	72.965	6,48%	2.329,66
14.	Tempel	32,49	55.576	4,94%	1.710,56
15.	Turi	43,09	38.732	3,44%	898,86
16.	Pakem	43,84	39.568	3,52%	902,55
17.	Cangkringan	47,99	32.605	2,90%	679,41
Kabupaten Sleman		574,82	1.125.571	100,00%	1.958,13

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 di atas terlihat bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Sleman tidak merata. Kepadatan penduduk tertinggi ada di wilayah kapanewon yang berada/berbatasan dengan kawasan perkotaan yaitu Kapanewon Depok, Mlati, dan Gamping. Kepadatan rendah terjadi di wilayah kapanewon yang berbatasan dengan Gunung Api Merapi yaitu Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan. Apabila dilihat dari luas wilayah, tiga kapanewon tersebut memiliki wilayah terluas, tetapi kepadatan penduduknya justru terendah. Hal tersebut karena tidak semua wilayah di keempat kapanewon tersebut dapat dijadikan tempat hunian akibat letaknya yang berada di lereng Gunung Merapi, terutama Kapanewon Cangkringan, Pakem, dan Turi. Wilayah tersebut sangat rentan bahaya terkait dengan aktivitas Gunung Merapi yang seharusnya tidak dimanfaatkan sebagai kawasan hunian. Penyebaran penduduk yang kurang merata juga perlu mendapat perhatian. Hal ini

berkaitan dengan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kepadatan penduduk yang heterogen menimbulkan munculnya berbagai aspek permasalahan yang berakibat pada kebijakan pengembangan wilayah yang berbeda pula. Meskipun demikian, fenomena kepadatan penduduk di kawasan perkotaan cukup tinggi, hal ini disebabkan fungsi Kabupaten Sleman sebagai penyangga Kota Yogyakarta, sebagai daerah tujuan untuk melanjutkan pendidikan, dan daerah pengembangan pemukiman/perumahan.

Padatnya penduduk disuatu wilayah pada batas tertentu akan mengganggu stabilitas kehidupan penduduk di wilayah itu sendiri. Wilayah yang padat akan menimbulkan banyak persoalan tidak saja masalah pemenuhan fasilitas tapi juga masalah keamanan, ekonomi, sosial, politik dan budaya. Sebaliknya kepadatan penduduk yang sangat rendah akan menyulitkan penduduk dalam mengakses fasilitas yang ada karena tempat tinggal penduduk menjadi sangat tersebar sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi relatif lebih mahal.

4.1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah penduduk di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebanyak 12.955 jiwa atau sekitar 1,16 persen. Peningkatan jumlah penduduk sangat ditentukan oleh tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Peningkatan jumlah penduduk tentu membutuhkan kecukupan dukungan terutama pangan, sandang, dan papan yang lebih besar. Selain itu, kebutuhan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, rekreasi dan sebagainya juga perlu diperhatikan. Dalam konteks ini, tidak akan ada masalah bila dukungan lingkungan dan sumber daya alam memadai. Tetapi apabila jumlah penduduk terus bertambah dan sumber daya alam tidak lagi mampu mendukung kehidupannya, maka akan menjadi masalah yang serius bagi penduduk yang bersangkutan. Karena bisa jadi akan terjadi kekurangan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan lainnya yang menyebabkan kualitas kehidupan penduduk tersebut terus menurun.

Kapanewon dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi ada di Kapanewon Ngemplak, Ngaglik, Kalasan, Seyegan dan Pakem. Sedangkan kanewon dengan laju pertumbuhan penduduk terendah ada di Kecamatan Minggir, Moyudan, Depok, Tempel, dan Depok. Adapun detail laju pertumbuhan di tiap kapanewon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sleman Tahun 2023 - 2024

No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk 2023	Jumlah Penduduk 2024	Laju Pertumbuhan Penduduk
1.	Gamping	96.359	97.408	1,09
2.	Godean	71.919	72.604	0,95
3.	Moyudan	33.900	33.981	0,24
4.	Minggir	32.667	32.747	0,24
5.	Seyegan	52.632	53.203	1,08
6.	Mlati	95.012	96.088	1,13
7.	Depok	125.783	127.111	1,06
8.	Berbah	57.382	58.265	1,54
9.	Prambanan	55.215	55.740	0,95
10.	Kalasan	86.773	87.864	1,26
11.	Ngemplak	65.499	66.774	1,95
12.	Ngaglik	102.621	104.340	1,68
13.	Sleman	71.908	72.965	1,47
14.	Tempel	55.175	55.576	0,73
15.	Turi	38.337	38.732	1,03
16.	Pakem	39.128	39.568	1,12
17.	Cangkringan	32.306	32.605	0,93
Kabupaten Sleman		1.112.616	1.125.571	1,16

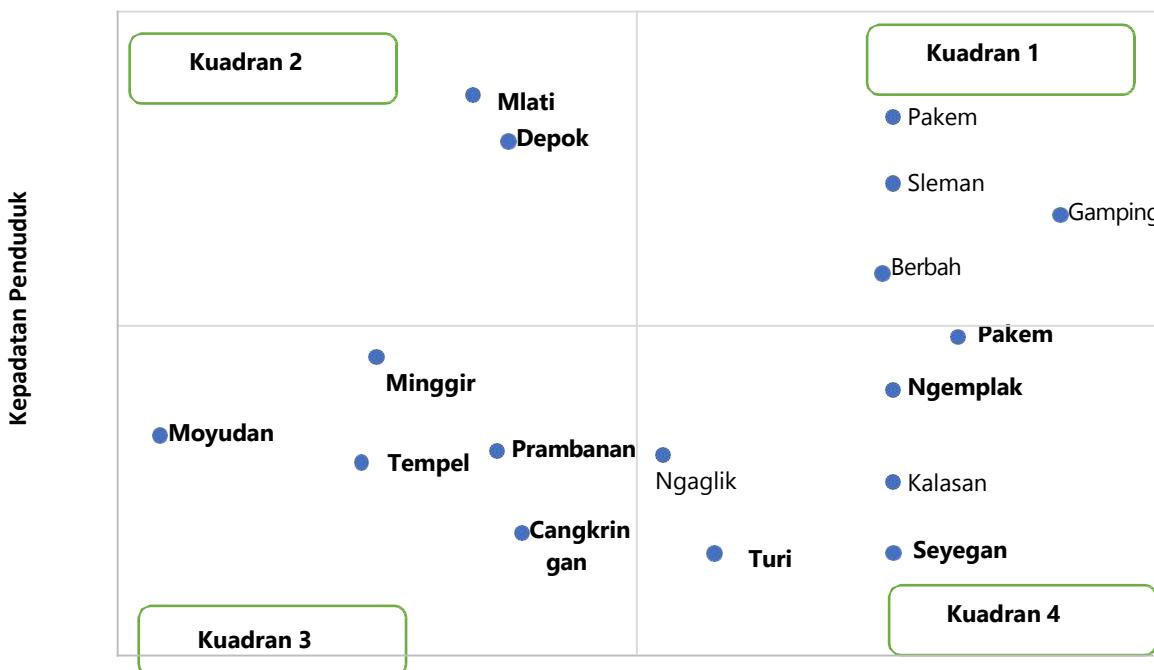
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Laju pertumbuhan penduduk memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi ekonomi sebuah wilayah. Pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi, bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Sebagai dampak dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah. Adanya spesialisasi dan pembagian kerja diantara para tenaga kerja akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi.

Wilayah di Kabupaten Sleman yang memiliki pertumbuhan penduduk tinggi ternyata sebagian besar ada di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi pula. Jika dilihat berdasarkan analisis kuadran terlihat bahwa kapanewon dengan laju pertumbuhan penduduk tinggi dan tingkat kepadatan tinggi terdapat enam kapanewon yaitu; Kapanewon Ngaglik, Kalasan, Berbah, Gamping, Godean, dan Sleman, sedangkan kapanewon dengan laju Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2024

pertumbuhan penduduk rendah dan tingkat kepadatan penduduk tinggi terdapat dua kapanewon yaitu kecamatan Depok dan Mlati.

Kapanewon dengan laju pertumbuhan penduduk rendah dan tingkat kepadatan penduduk rendah terdapat lima kapanewon yaitu; Kapanewon Prambanan, Cangkringan, Moyudan, Tempel, dan Minggir. Kapanewon dengan laju pertumbuhan penduduk tinggi namun dengan tingkat kepadatan penduduk rendah adalah Kapanewon Pakem, Seyegan, Ngemplak dan Turi.



Gambar 4. 1 Analisis Kuadran Antara Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2024

Dari analisis kuadran ini terlihat sebuah pola yang cukup menarik. Pada kuadran 1, kecamatan-kecamatan yang masuk pada wilayah tersebut merupakan wilayah-wilayah pertumbuhan yang sangat pesat dengan aktifitas perdagangan dan jasa yang dari sisi akses dekat dengan dekat dengan Yogyakarta sehingga wajar jika diwilayah tersebut bermunculan banyak komplek perumahan. Pada kuadran 2, justru diwilayah yang banyak terdapat kampus disana. Kondisi ini wajar manakala tingkat pertumbuhan penduduknya rendah tetapi tingkat kepadatan penduduknya sangat tinggi karena banyaknya mahasiswa diwilayah tersebut,

sehingga pertumbuhan penduduk dimungkinkan banyak dipengaruhi oleh proses migrasi. Pada kuadran 3 dengan kondisi laju pertumbuhan penduduk rendah dan kepadatan rendah justru banyak diwilayah pertanian. Sedangkan pada kuadran 4 lebih banyak diwilayah yang dekat dengan lereng gunung Merapi.

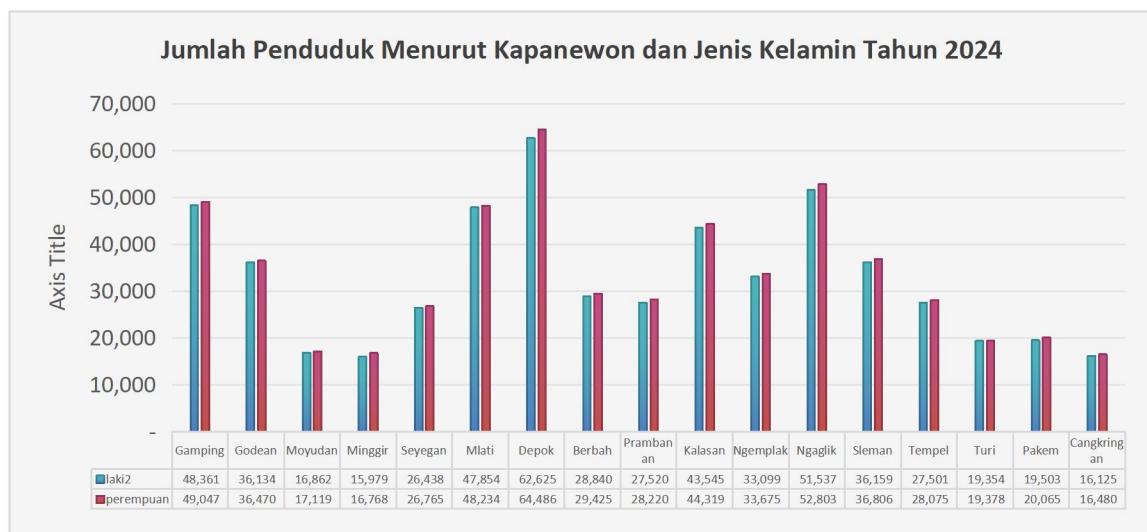
4.1.3 Karakteristik Penduduk Menurut Kondisi Demografi

4.1.3.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk yang besar dapat membawa keuntungan dan masalah yang rumit bagi suatu daerah. Keuntungan yang dapat diambil adalah apabila penduduk yang banyak tersebut mempunyai kualitas yang baik, sehingga dapat diandalkan menjadi pelaku pembangunan. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar akan menjadi masalah, kalau penduduk tersebut mempunyai kualitas yang rendah dan penyebaran yang tidak merata sehingga menjadi beban pembangunan. Selain jumlah penduduk, komposisi penduduk memegang peranan yang sangat penting dalam upaya untuk menciptakan stabilitas kehidupan dalam masyarakat suatu wilayah. Ukuran yang digunakan dalam komposisi penduduk antara lain struktur umur, rasio dan angka ketergantungan, dan rasio jenis kelamin. Ukuran-ukuran tersebut sering digunakan sebagai alat evaluasi kebijakan program pembangunan, terutama dibidang kependudukan. Komposisi penduduk juga mencerminkan tingkat kemajuan suatu bangsa atau wilayah.

Komposisi penduduk juga mencerminkan tingkat kemajuan suatu wilayah. Struktur umur penduduk dapat dikategorikan sebagai penduduk 'muda', yakni jika penduduk usia 0-14 tahun lebih dari 40 persen. Penduduk dikatakan penduduk 'tua' jika yang usia 65 tahun ke atas lebih dari 10 persen dan 'antara muda dan tua (*intermediate*) jika penduduk usia 0-14 tahun kurang dari 40 persen dan penduduk usia 65 tahun ke atas kurang dari 10 persen (Hobbs, 2004).

Sebagai contoh, suatu wilayah dikatakan maju bila struktur umur penduduknya sebagian besar berada pada usia produktif (15-64 tahun) atau bentuk piramida penduduknya cenderung pada kelompok umur 15-19 tahun sampai kelompok umur 60-64 tahun. Tabel 4.3 menjelaskan secara rinci bahwa sebanyak 69,82 persen penduduk di Kabupaten Sleman tergolong dalam usia produktif. Usia produktif merupakan usia penduduk yang berada pada rentang usia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Pada umur tersebut merupakan usia prima bagi seseorang sehingga dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan dalam kondisi yang terbaik. Di Kabupaten Sleman berdasarkan Data SIAK 2024 diketahui jumlah penduduk dalam kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) sebanyak 785.857 jiwa (69,82 persen), penduduk usia muda (usia 0-14 tahun) sebanyak 427.229 jiwa (37,96 persen), dan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) sebanyak 115.476 jiwa (10,26 persen).



Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kapanewon dan Jenis Kelamin

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Distribusi umur penduduk menggambarkan riwayat mortalitas dan fertilitas serta rata-rata usia penduduk suatu wilayah. Juga merefleksikan beban ketergantungan usia muda atau anak-anak (usia 0-14 tahun), dan beban tanggungan usia tua atau usia lanjut (usia 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Informasi tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin penting diketahui untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Jumlah dan proporsi penduduk

menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Jumlah Penduduk							
No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Persen	Perempuan	Persen	Jumlah	Persen
1	0-4	32.458	5,82%	30.359	5,34%	62.817	5,58%
2	5-9	39.843	7,15%	37.514	6,60%	77.357	6,87%
3	10-14	43.000	7,71%	41.064	7,23%	84.064	7,47%
4	15-19	42.504	7,62%	40.326	7,10%	82.830	7,36%
5	20-24	42.177	7,57%	40.327	7,10%	82.504	7,33%
6	25-29	40.906	7,34%	40.161	7,07%	81.067	7,20%
7	30-34	39.308	7,05%	39.353	6,93%	78.661	6,99%
8	35-39	37.001	6,64%	38.435	6,77%	75.436	6,70%
9	40-44	43.854	7,87%	44.460	7,83%	88.314	7,85%
10	45-49	42.202	7,57%	43.235	7,61%	85.437	7,59%
11	50-54	38.848	6,97%	40.279	7,09%	79.127	7,03%
12	55-59	35.748	6,41%	38.377	6,75%	74.125	6,59%
13	60-64	27.207	4,88%	31.149	5,48%	58.356	5,18%
14	65-69	22.021	3,95%	25.053	4,41%	47.074	4,18%
15	70-74	14.490	2,60%	16.185	2,85%	30.675	2,73%
16	≥75	15.869	2,85%	21.858	3,85%	37.727	3,35%
Kabupaten Sleman		557.436	100	568.135	100	1.125.571	100

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Pada Tabel 4.3, data SIAK 2024 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sleman untuk semua jenis kelamin terbanyak adalah pada kelompok umur 40-44 tahun, yaitu sebesar 88.314 jiwa atau 7,85 persen. Jumlah terbanyak kedua adalah kelompok umur 45-49 tahun, yaitu sebesar 85.437 jiwa atau 7,59 persen, dan ketiga terbanyak adalah kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 84.064 jiwa atau 7,47 persen.

4.1.3.2 Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah antara penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dengan perempuan (Mantra, 2000). Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan jumlah jenis kelamin perempuan dengan laki-laki baik dalam suatu skala spasial maupun temporal. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 sebesar 98,12 yang artinya setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 98 penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Semua kapanewon yang ada di Kabupaten Sleman memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100. Bahkan di Kapanewon Minggir rasio jenis kelaminnya mencapai 95,29. Jika dilihat menurut kelompok umur terlihat bahwa usia kurang dari 30 tahun jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Sebaliknya, yang berusia 30 tahun keatas lebih banyak penduduk berjenis kelamin perempuan. Dari data ini memperlihatkan bahwa jumlah kelahiran bayi laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan bayi perempuan termasuk mereka yang berusia sekolah. Namun jika dilihat pada rasio jenis kelamin kelompok umur 30-34 tahun angkanya mengalami penurunan yakni menjadi 98. Kondisi ini dapat dijelaskan karena penduduk laki-laki banyak melakukan migrasi keluar Kabupaten Sleman untuk bekerja.

Jika dilihat dari trend rasio jenis kelamin mengalami penurunan pada usia lansia yakni pada tahun 60 tahun hingga lebih dari 75 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa harapan hidup pada penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih tinggi dibanding dengan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Harapan hidup laki-laki yang rendah dapat dipengaruhi oleh pola hidup yang tidak sehat dibandingkan perempuan. Selain itu, data tersebut juga mengindikasikan bahwa semakin tua kelompok umur semakin banyak pula jumlah janda yang terdapat pada kelompok umur tersebut.

Tabel 4. 4 Rasio Jenis Kelamin menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024

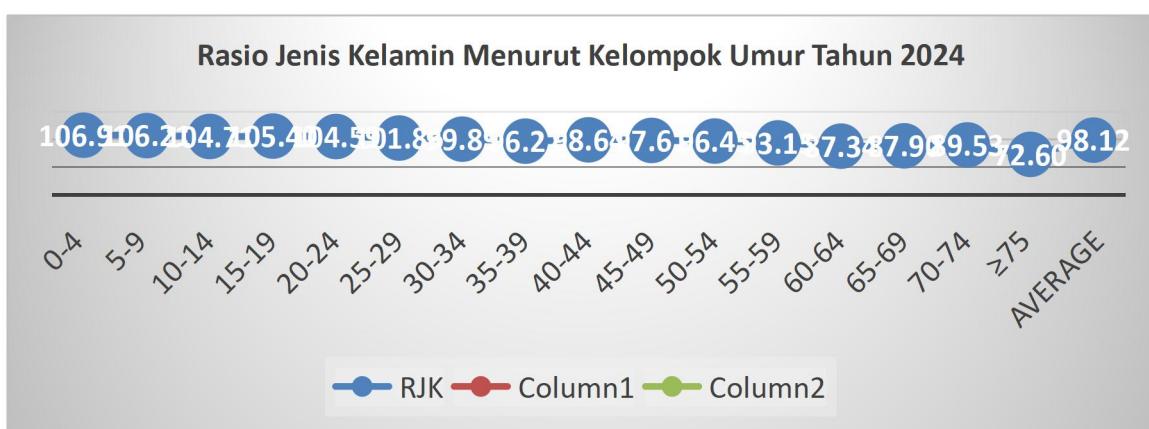
No.	Kapanewon	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
1	GAMPING	48.361	49.047	98,60
2	GODEAN	36.134	36.470	99,08
3	MOYUDAN	16.862	17.119	98,50
4	MINGGIR	15.979	16.768	95,29
5	SEYEGAN	26.438	26.765	98,78
6	MLATI	47.854	48.234	99,21
7	DEPOK	62.625	64.486	97,11
8	BERBAH	28.840	29.425	98,01
9	PRAMBANAN	27.520	28.220	97,52
10	KALASAN	43.545	44.319	98,25
11	NGEMPLAK	33.099	33.675	98,29
12	NGAGLIK	51.537	52.803	97,60
13	SLEMAN	36.159	36.806	98,24
14	TEMPEL	27.501	28.075	97,96
15	TURI	19.354	19.378	99,88
16	PAKEM	19.503	20.065	97,20
17	CANGKRINGAN	16.125	16.480	97,85
Kabupaten Sleman		557.436	568.135	98,12

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Tabel 4. 5 Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur Tahun 2024

Jumlah Penduduk				
No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
1	0-4	32.458	30.359	106,91
2	5-9	39.843	37.514	106,21
3	10-14	43.000	41.064	104,71
4	15-19	42.504	40.326	105,40
5	20-24	42.177	40.327	104,59
6	25-29	40.906	40.161	101,86
7	30-34	39.308	39.353	99,89
8	35-39	37.001	38.435	96,27
9	40-44	43.854	44.460	98,64
10	45-49	42.202	43.235	97,61
11	50-54	38.848	40.279	96,45
12	55-59	35.748	38.377	93,15
13	60-64	27.207	31.149	87,34
14	65-69	22.021	25.053	87,90
15	70-74	14.490	16.185	89,53
16	≥75	15.869	21.858	72,60
Kabupaten Sleman		557.436	568.135	98,12

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024



Gambar 4. 3 Analisis Rasio jenis kelamin menurut Kelompok Umur

4.1.3.3 Umur Median (*Median Age*)

Umur median merupakan salah satu indikator kependudukan yang digunakan untuk mengukur struktur umur penduduk secara cepat, dan sering kali digunakan untuk membandingkan struktur umur penduduk di suatu wilayah apakah relatif lebih "tua" atau "muda", dengan wilayah lain. Bila umur median disuatu wilayah kurang dari 20 tahun, maka penduduk diwilayah tersebut dikategorikan penduduk muda. Apabila umur mediannya diantara 20 hingga 30 tahun, maka penduduk wilayah tersebut dikategorikan penduduk intermediate, dan bila umur mediannya di atas 30 tahun, maka penduduk wilayah tersebut dikategorikan penduduk "tua". Umur median adalah umur yang membagi jumlah penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama banyaknya, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemasatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Dari pengelompokan penduduk menurut umur dapat digambarkan perbedaan umur median antara Kapanewon di Kabupaten Sleman pada tahun 2024. Pada masa mendatang isu tentang penduduk lanjut usia akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Sleman karena secara absolut maupun relatif jumlahnya akan semakin meningkat. Jika tidak diantisipasi dari saat ini dengan melahirkan kebijakan kependudukan, utamanya dalam hal penanganan terhadap penduduk lanjut usia, yang akan menjadi masalah di kemudian hari.

Terkait dengan penduduk usia lanjut di Kabupaten Sleman, jumlahnya saat ini cukup besar dan menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data SIAK tahun 2024, proporsi jumlah penduduk lansia di Kabupaten Sleman mencapai 9,98 persen atau sebanyak 111.001 jiwa dari total penduduk Kabupaten Sleman yang mencapai 1.112.616 jiwa. Angka harapan hidup di Kabupaten Sleman mencapai umur 78,09 tahun untuk perempuan dan 73,54 untuk laki-laki.

Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Data SIAK 2024

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk			Komulatif (fx)	Persen Komulatif
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	0-4	32.458	30.359	62.817	62.817	5,58%
2	5-9	39.843	37.514	77.357	140.174	12,45%
3	10-14	43.000	41.064	84.064	224.238	19,92%
4	15-19	42.504	40.326	82.830	307.068	27,28%
5	20-24	42.177	40.327	82.504	389.572	34,61%
6	25-29	40.906	40.161	81.067	470.639	41,81%
7	30-34	39.308	39.353	78.661	549.300	48,80%
8	35-39	37.001	38.435	75.436	624.736	55,50%
9	40-44	43.854	44.460	88.314	713.050	63,35%
10	45-49	42.202	43.235	85.437	798.487	70,94%
11	50-54	38.848	40.279	79.127	877.614	77,97%
12	55-59	35.748	38.377	74.125	951.739	84,56%
13	60-64	27.207	31.149	58.356	1.010.095	89,74%
14	65-69	22.021	25.053	47.074	1.057.169	93,92%
15	70-74	14.490	16.185	30.675	1.087.844	96,65%
16	≥75	15.869	21.858	37.727	1.125.571	100,00%
Kabupaten Sleman		557.436	568.135	1.125.571		

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Menurut wilayah, diketahui jumlah lansia paling banyak ada di Kapanewon Depok yang mencapai 11.783 jiwa atau 10,62 persen dari total penduduk lansia. Berikutnya adalah Kapanewon Ngaglik dengan jumlah lansia mencapai 8.982 jiwa atau 8,48 persen dan Kapanewon Mlati sebanyak 8.309 jiwa atau 7,84 persen. Wilayah dengan jumlah lansia paling rendah adalah Kapanewon Cangkringan yang tercatat sebanyak 3.414 jiwa atau 3,22 persen dari total lansia. Keberadaan lansia perlu diperhatikan dengan sungguh- sungguh agar nantinya tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan. Warga lanjut usia perlu diberdayakan sesuai dengan kemampuannya. Salah satu gagasan yang diwacanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah pembentukan Rumah Bahagia Lansia. Yaitu upaya untuk memberi ruang kepada lansia yang ada di kabupaten Sleman. Di tempat itu para lansia bisa melakukan berbagai kegiatan yang bersifat pemberdayaan dan diajak aktif secara fisik melalui senam, dan kegiatan lain untuk mengasah mental.

Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Lansia (Usia >= 65 Tahun) Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Kapanewon Tahun 2024

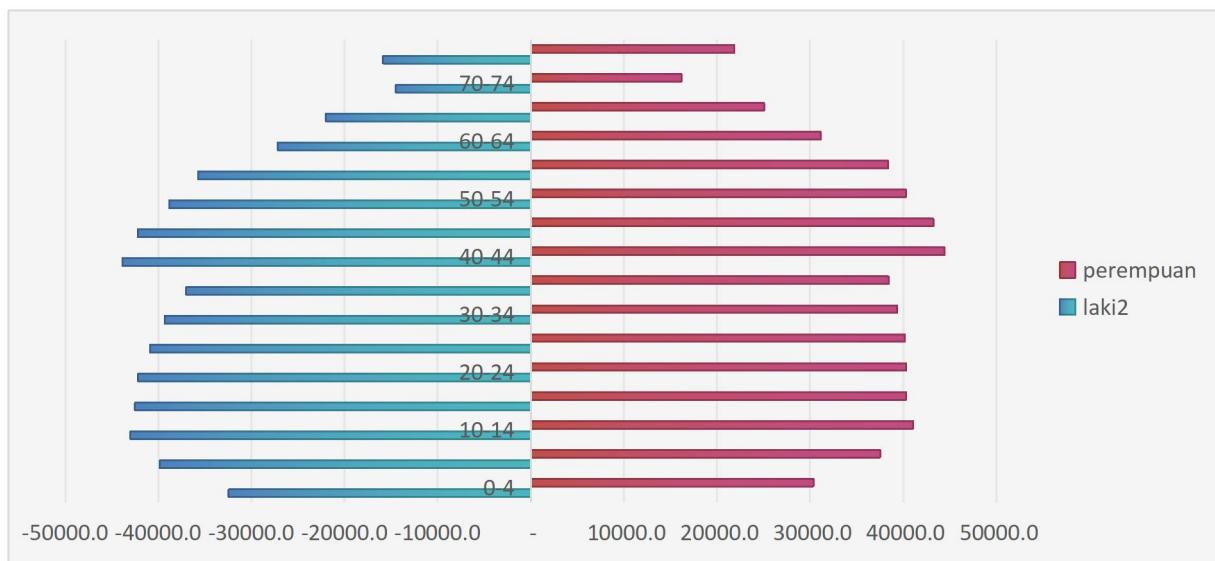
Kapanewon	Kelompok Umur Penduduk Lansia															Jumlah Penduduk Lansia
	Umur 65 - 69 Tahun			Umur 70 - 74 Tahun			Umur 75 - 79 tahun			> 79 tahun			L	P	Jml	
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	J	L	P	Jml	L	P	Jml	L
Gamping	1.950	2.195	4.145	1.253	1.322	2.575	531	699	1.230	539	788	1.327	4.273	5.004	9.277	
Godean	1.495	1.686	3.181	1.021	1.105	2.126	530	634	1.164	660	799	1.459	3.706	4.224	7.930	
Moyudan	808	941	1.749	581	775	1.356	410	494	904	453	580	1.033	2.252	2.790	5.042	
Minggir	788	873	1.661	553	669	1.222	353	521	874	398	577	975	2.092	2.640	4.732	
Seyegan	1.072	1.250	2.322	721	759	1.480	394	503	897	414	605	1.019	2.601	3.117	5.718	
Mlati	1.959	2.125	4.084	1.190	1.266	2.456	570	765	1.335	588	853	1.441	4.307	5.009	9.316	
Depok	2.323	2.797	5.120	1.593	1.851	3.444	797	1.054	1.851	797	1.210	2.007	5.510	6.912	12.422	
Berbah	1.043	1.218	2.261	661	742	1.403	319	470	789	345	504	849	2.368	2.934	5.302	
Prambanan	1.124	1.248	2.372	738	794	1.532	421	567	988	453	693	1.146	2.736	3.302	6.038	
Kalasan	1.560	1.797	3.357	970	1.098	2.068	532	720	1.252	531	770	1.301	3.593	4.385	7.978	
Ngemplak	1.286	1.434	2.720	847	935	1.782	418	553	971	479	733	1.212	3.030	3.655	6.685	
Ngaglik	1.976	2.238	4.214	1.208	1.391	2.599	659	893	1.552	683	946	1.629	4.526	5.468	9.994	
Sleman	1.356	1.586	2.942	920	1.016	1.936	474	625	1.099	499	670	1.169	3.249	3.897	7.146	
Tempel	1.120	1.270	2.390	776	782	1.558	414	527	941	390	556	946	2.700	3.135	5.835	
Turi	748	809	1.557	503	555	1.058	282	363	645	328	457	785	1.861	2.184	4.045	
Pakem	788	868	1.656	520	582	1.102	296	453	749	338	533	871	1.942	2.436	4.378	
Cangkringan	625	718	1.343	435	543	978	248	306	554	326	437	763	1.634	2.004	3.638	
Kabupaten Sleman	22.021	25.053	47.074	14.490	16.185	30.675	7.648	10.147	17.795	8.221	11.711	19.932	52.380	63.096	115.476	

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

4.1.3.4 Piramida Penduduk

Distribusi umur penduduk sering memberikan gambaran riwayat mortalitas dan fertilitas serta rata-rata usia penduduk suatu wilayah. Juga merefleksikan beban ketergantungan sekelompok usia tertentu terhadap kelompok lainnya, dalam hal ini beban tanggungan usia muda atau anak-anak (usia 0-14 tahun), dan beban tanggungan tua atau usia lanjut (usia 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Informasi tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin penting diketahui, terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, sandang pangan dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai dengan kelompok umur penduduk. Untuk lebih menggambarkan dengan jelas komposisi penduduk Kabupaten Sleman menurut struktur umur dan jenis kelamin adalah dengan piramida penduduk. Piramida penduduk menunjukkan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Juga dapat menunjukkan tingkat perkembangan penduduk untuk setiap kelompok umur yang berbeda. Fluktuasi dalam piramida penduduk paling banyak dipengaruhi tingkat kelahiran setiap kelompok umur selain tingkat kematian dan perpindahan. Piramida penduduk biasanya digunakan untuk menggambarkan tingkat kemajuan suatu negara atau wilayah. Dengan melihat piramida penduduk, dapat diketahui struktur penduduk suatu wilayah apakah termasuk dalam struktur penduduk muda, dewasa, dan tua. Dalam menyusun berbagai macam kebijakan bidang kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi, struktur penduduk tersebut menjadi salah satu dasarnya. Pada suatu negara berkembang misalnya, biasanya bentuk piramida penduduknya berbentuk kerucut. Dimana fertilitas dan mortalitasnya tinggi, sehingga proporsi penduduk usia 0-4 tahun sangat tinggi, kemudian secara kontinyu mengecil pada kelompok umur di atasnya. Sebaliknya yang terjadi pada negara-negara maju yang tingkat kesejahteraan penduduknya lebih baik, memiliki bentuk piramida hampir menyerupai bentuk tabung atau mulai mengecil pada kelompok umur muda sampai 0-4 tahun. Bentuk ini berarti angka fertilitas dan mortalitasnya sangat kecil,

sedangkan penduduk usia kerjanya besar. Dengan demikian tingkat kesejahteraan penduduknya sangat baik, karena beban ketergantungan penduduknya sangat kecil.



Gambar 4. 4 Piramida Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2024

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Gambaran struktur penduduk di Kabupaten Sleman juga dapat dilihat melalui piramida penduduk yaitu Gambar 4.4 yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Bentuk piramida penduduk Kabupaten Sleman adalah piramida penduduk muda (ekspansif), didominasi oleh penduduk kelompok umur produktif serta anak-anak. Bentuk piramida ekspansif dapat diartikan bahwa terdapat angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah sehingga terdapat banyak penduduk yang berumur muda. Namun, terdapat kecenderungan angka kelahiran di Kabupaten Sleman mulai menurun terlihat dari jumlah penduduk kelompok umur 0-4 lebih rendah daripada kelompok umur muda di atasnya.

Kondisi banyaknya penduduk muda ini sering juga dikaitkan dengan fenomena bonus demografi, yang mana bonus demografi itu terjadi saat proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dari 50 persen dari total populasi berpotensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2025-2035 (BKKBN, 2014), sementara itu Kabupaten Sleman saat ini sudah berada pada kondisi tersebut karena jumlah penduduk

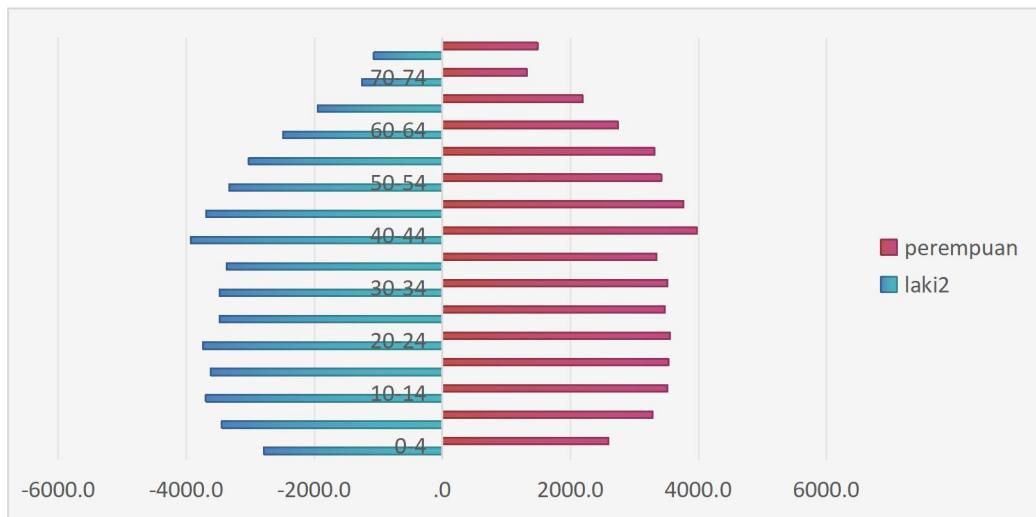
usia produktif sudah berkisar di angka lebih dari 50 persen dari total populasi. Kondisi ini tentu perlu dikelola secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari usia dini melalui berbagai program dan kegiatan terkait secara menyeluruh. Berdasarkan data tahun 2024, penduduk Kabupaten Sleman didominasi oleh kelompok umur 40-49 tahun, kelompok produktif yang pada umumnya merupakan keluarga muda yang memiliki anak usia sekolah. Terlihat pula bahwa besaran jumlah penduduk terjadi pada usia 10-14 tahun, yaitu penduduk berusia sekolah. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan sejak usia dini perlu mendapatkan perhatian lebih besar sehingga diharapkan menjadi tulang punggung pelaksana pembangunan yang berkualitas di masa-masa yang akan datang. Selain itu, terdapat potensi peningkatan jumlah penduduk usia lansia pada 5-10 tahun mendatang, yang menjadi beban bagi penduduk usia produktif.

Permasalahan pada masa mendatang di Kabupaten Sleman adalah semakin banyaknya jumlah penduduk lanjut usia. Hal ini harus diantisipasi pemerintah melalui berbagai kebijakan terkait dengan penduduk lanjut usia. Meskipun penduduk Kabupaten Sleman saat ini didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun. Proporsi penduduk usia produktif di Kabupaten Sleman tahun 2024 mencapai 69,82 persen atau 785.857 jiwa. Sedangkan penduduk termasuk dalam kategori lanjut usia (65 tahun keatas) mencapai 115.476 jiwa atau 10,26 persen dari total penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif jumlahnya sangat besar sehingga Kabupaten Sleman memiliki potensi yang besar dalam pemanfaatannya.

a) Piramida Penduduk Kapanewon Gamping

Penduduk Kapanewon Gamping tahun 2024 mencapai 97.408 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 68.804 jiwa atau 70,63 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 28.604 jiwa atau 29,37 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit

dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Gamping mengalami penurunan.



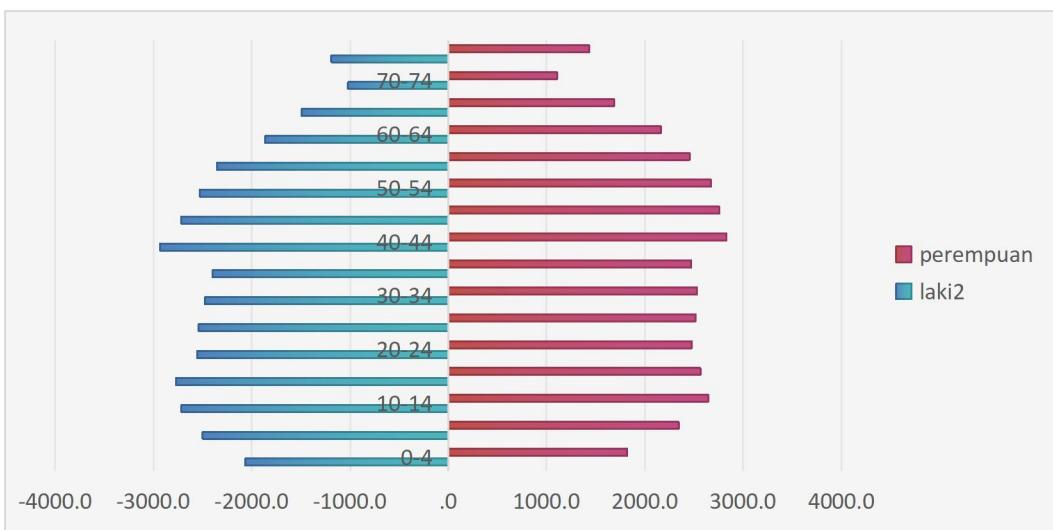
Gambar 4. 5 Piramida Penduduk Kapanewon Gamping Tahun 2024

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Piramida Kapanewon Gamping (Gambar 4.5) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 7.907 jiwa (8,12 persen). Dibawahnya adalah kelompok usia 45-49 tahun yang mencapai 7.457 (7,66 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Gamping mencapai 9.277 jiwa atau 9,52 persen, lebih rendah daripada angka Kabupaten Sleman yang mencapai 10,26 persen.

b) Piramida Penduduk Kapanewon Godean

Penduduk Kapanewon Godean tahun 2024 mencapai 72.604 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 50.582 jiwa atau 69,67 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 22.022 jiwa atau 30,33 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Godean mengalami penurunan.



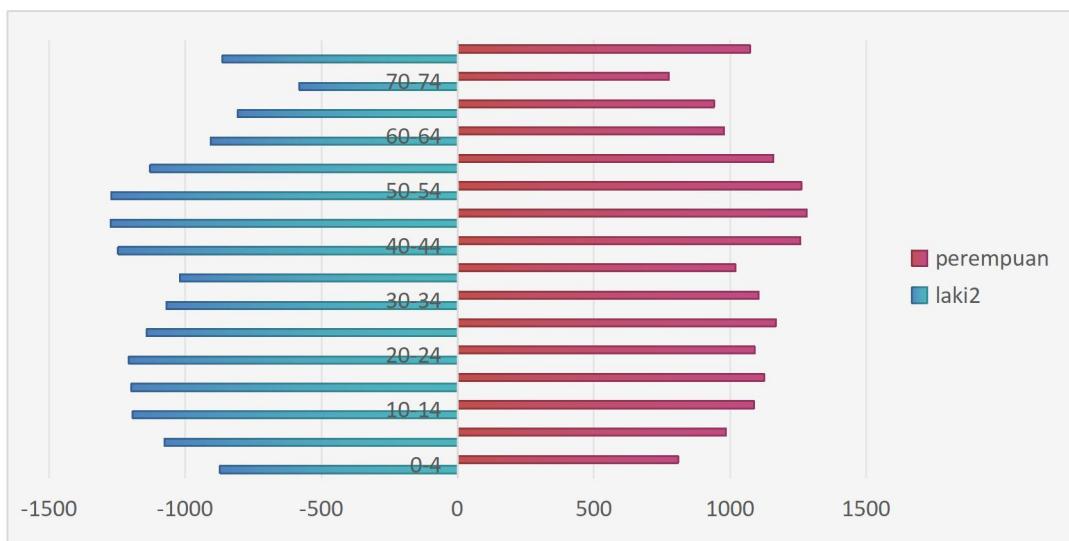
Gambar 4. 6Piramida Penduduk Kapanewon Godean Tahun 2024

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Piramida Kapanewon Godean (Gambar 4.6) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun mencapai 5.766 (7,94 persen). Selanjutnya adalah kelompok usia 45-49 tahun yang mencapai 5.474 atau 7,54 persen. Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Godean mencapai 7.930 jiwa atau 10,92 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 10,26 persen.

c) Piramida Penduduk Kapanewon Moyudan

Penduduk Kapanewon Moyudan tahun 2024 mencapai 33.981 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 22.913 jiwa atau 67,43 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 11.068 jiwa atau 32,57 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, mengindikasikan tingkat fertilitas di Kapanewon Moyudan menurun.



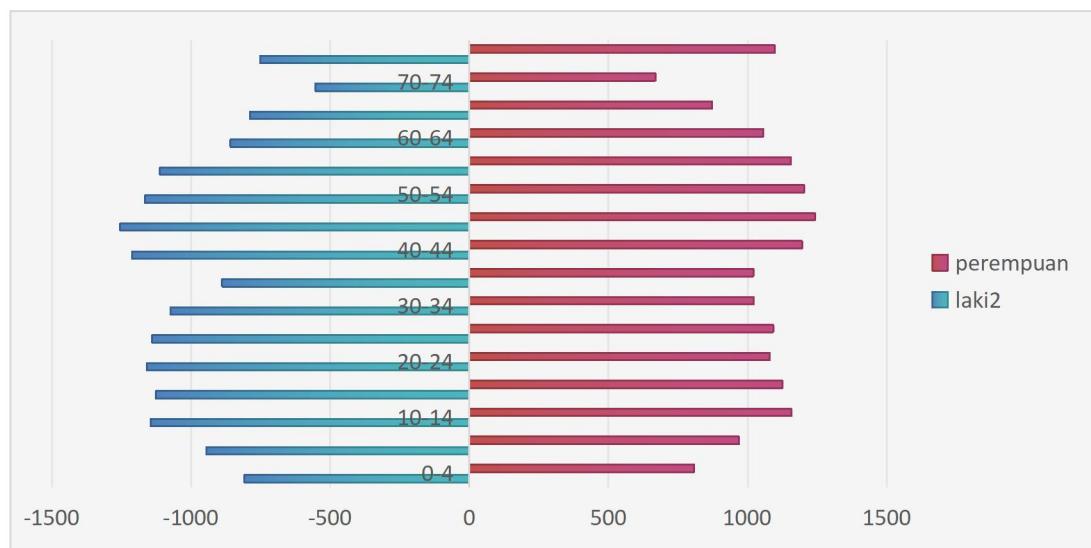
Gambar 4. 7 Piramida Penduduk Kapanewon Moyudan Tahun 2024

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Piramida Kapanewon Moyudan (Gambar 4.7) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 45-49 tahun yang mencapai 2.555 jiwa (7,52 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 50-54 tahun sejumlah 2.535 (7,46 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Moyudan mencapai 5.042 jiwa atau 14,84 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan proporsi lansia Kabupaten Sleman yaitu 10,26 persen.

d) Piramida Penduduk Kapanewon Minggir

Penduduk Kapanewon Minggir tahun 2024 mencapai 32.747 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 22.183 jiwa atau 67,74 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 10.564 jiwa atau 32,57 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Minggir menurun.



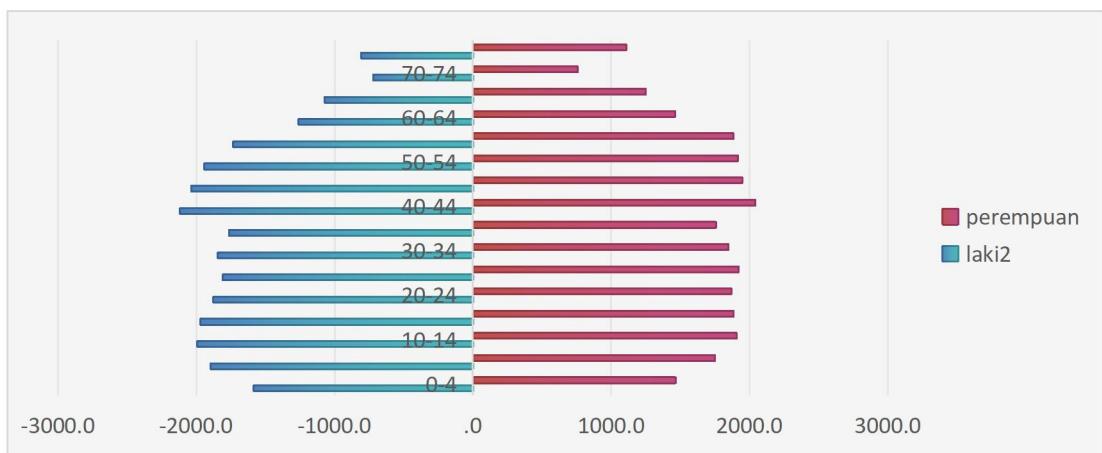
Gambar 4.8 Piramida Penduduk Kapanewon Minggir Tahun 2024

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Piramida Kapanewon Minggir (Gambar 4.8) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 45-49 tahun yang mencapai 2.496 jiwa (7,62 persen). Selanjutnya adalah kelompok usia 40-44 tahun sejumlah 2.408 (7,35 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Minggir mencapai 4.732 jiwa atau 14,45 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 10,26 persen.

e) Piramida Penduduk Kapanewon Seyegan

Penduduk Kapanewon Seyegan tahun 2024 mencapai 53.203 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 36.886 jiwa atau 69,33 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 16.317 jiwa atau 30,67 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Seyegan menurun.



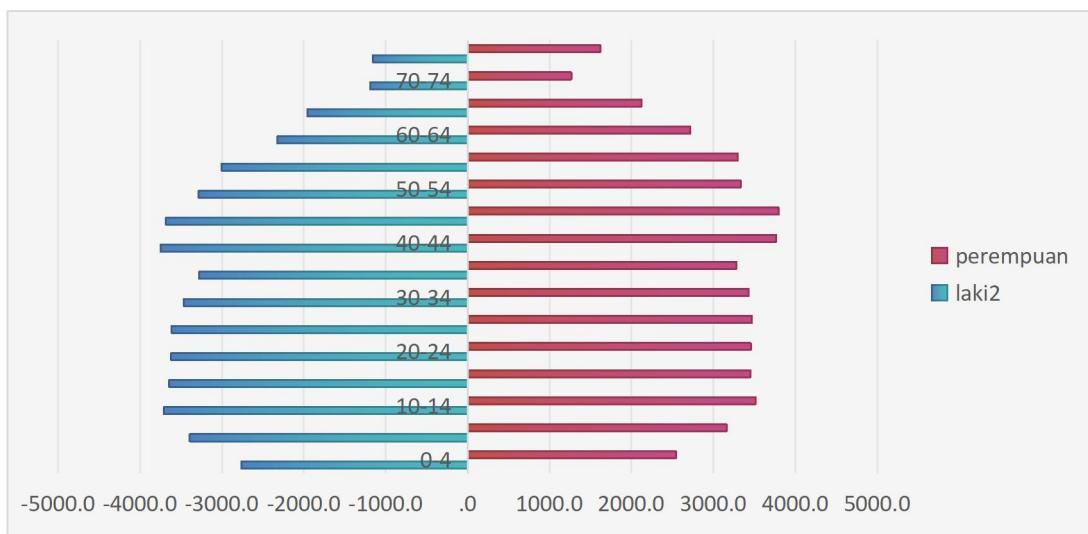
Gambar 4.9 Piramida Penduduk Kapanewon Seyegan Tahun 2024

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Piramida Kapanewon Seyegan (Gambar 4.9) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 4.199 jiwa (7,82 persen). Selanjutnya kelompok usia 45-49 tahun sejumlah 3.984 (7,49 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Seyegan mencapai 5.718 jiwa atau 10,75 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 10,26 persen.

f) Piramida Penduduk Kapanewon Mlati

Penduduk Kapanewon Mlati tahun 2024 mencapai 96.088 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 67.684 jiwa atau 70,44 persen. Jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 28.404 jiwa atau 29,56 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Mlati menurun.



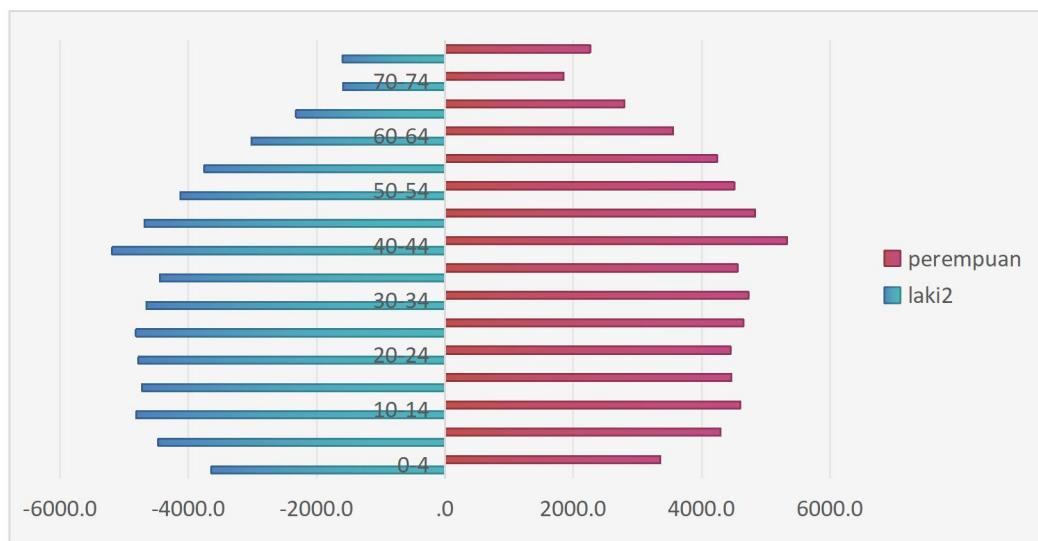
Gambar 4. 10 Piramida Penduduk Kapanewon Mlati Tahun 2024

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Piramida Kapanewon Mlati (Gambar 4.10) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 7.518 jiwa (7,82 persen). Selanjutnya kelompok usia 45-49 tahun yang mencapai 7.480 jiwa (7,78 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Mlati mencapai 9.316 jiwa atau 9,70 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 10,26 persen.

g) Piramida Penduduk Kapanewon Depok

Penduduk Kapanewon Depok tahun 2024 mencapai 127.111 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 89.512 jiwa atau 70,42 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 37.599 jiwa atau 29,58 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Depok menurun.



Gambar 4. 11 Piramida Penduduk Kapanewon Depok Tahun 2024

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

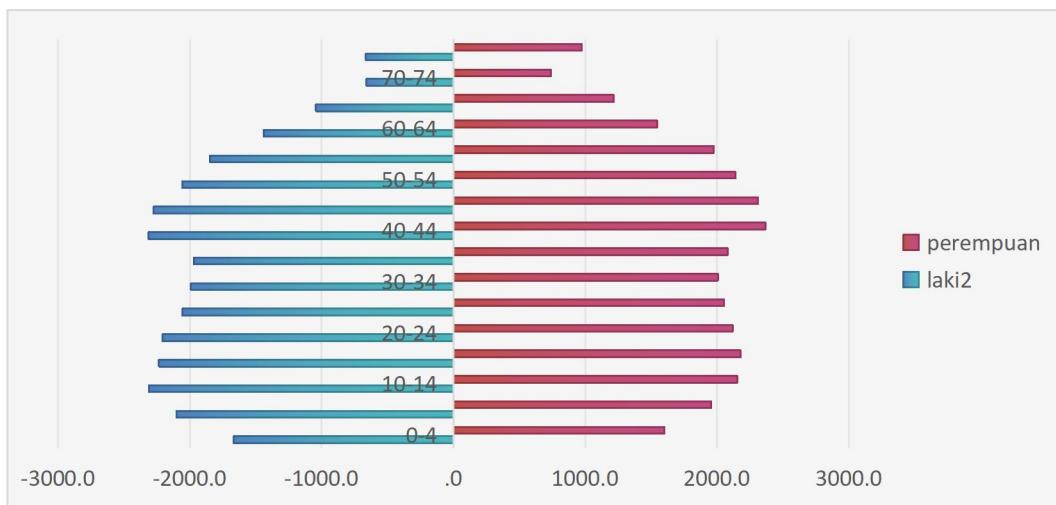
Piramida Kapanewon Depok (Gambar 4.11) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 10.518 jiwa (8,27 persen). Selanjutnya penduduk usia 45-49 tahun sejumlah 9.520 jiwa (7,49 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Depok mencapai 12.422 jiwa atau 9,77 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 10,26 persen.

h) Piramida Penduduk Kapanewon Berbah

Penduduk Kapanewon Berbah tahun 2024 mencapai 58.265 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 41.173 jiwa atau 70,67 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 17.092 jiwa atau 29,33 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Berbah mengalami penurunan.

Piramida Kapanewon Berbah (Gambar 4.12) juga menunjukkan bahwa penduduk

didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 4.682 jiwa (8,04 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 45-49 tahun sejumlah 4.587 jiwa (7,87 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Berbah mencapai 5.302 jiwa atau 9,10 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 10,26 persen.



Gambar 4. 12 Piramida Penduduk Kapanewon Berbah Tahun 2024

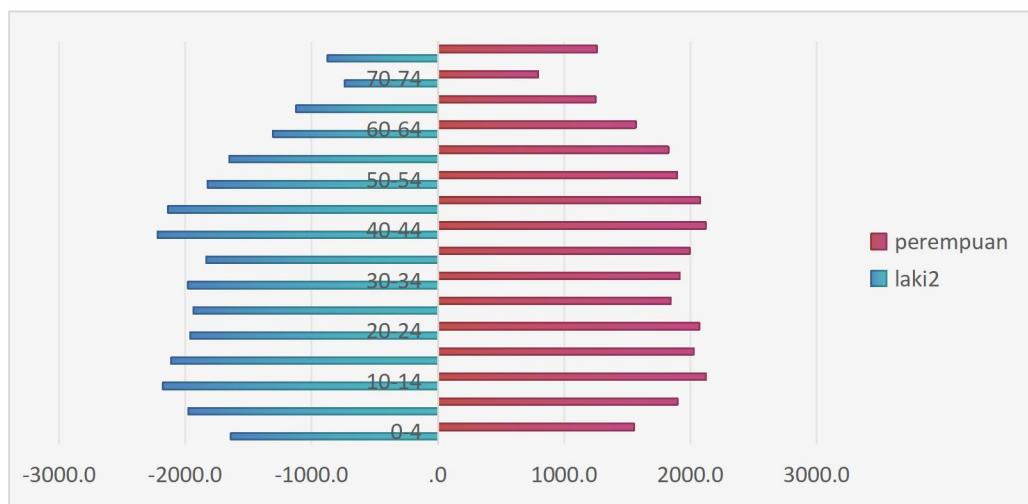
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

i) Piramida Penduduk Kapanewon Prambanan

Penduduk Kapanewon Prambanan tahun 2024 mencapai 55.740 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 38.324 jiwa atau 68,75 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 17.416 jiwa atau 31,25 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Prambanan mengalami penurunan.

Piramida Kapanewon Prambanan (Gambar 4.13) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 4.347 jiwa (7,80 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 45 - 49 tahun

mencapai 4.216 (7,56 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Prambanan mencapai 6.038 jiwa atau 10,83 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 10,26 persen.



Gambar 4. 13. Piramida Penduduk Kapanewon Prambanan Tahun 2024

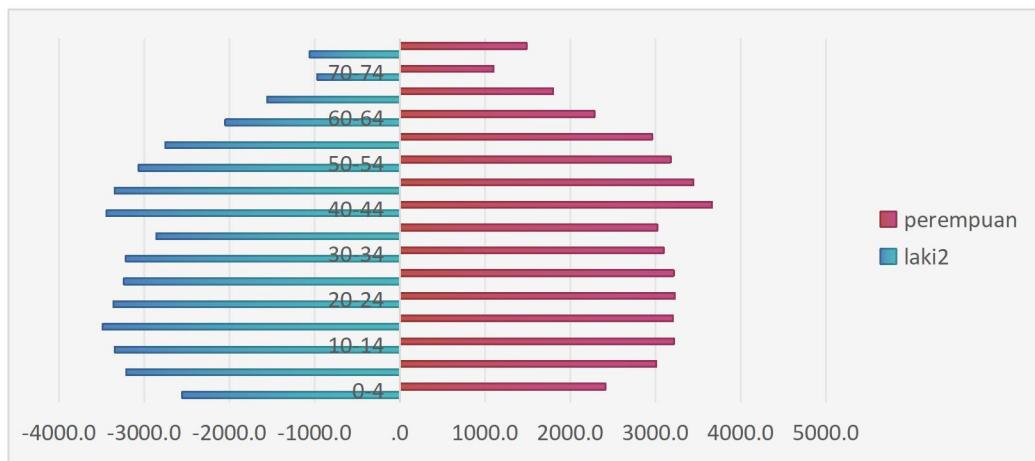
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

j) Piramida Penduduk Kapanewon Kalasan

Penduduk Kapanewon Kalasan tahun 2024 mencapai 87.864 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 62.131 jiwa atau 70,71 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 25.733 jiwa atau 29,29 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Kalasan mengalami penurunan.

Piramida Kapanewon Kalasan (Gambar 4.14) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 7.107 jiwa (8,09 persen). Selanjutnya kelompok usia 45-49 tahun yang mencapai 6.795 (7,73 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Kalasan mencapai 7.978 jiwa atau 9,08 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten

Sleman yang mencapai 10,26 persen.



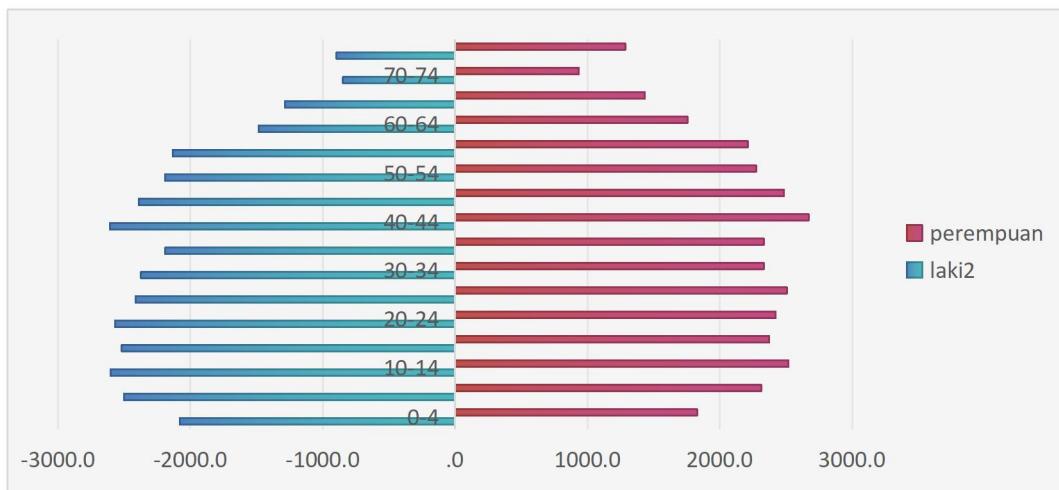
Gambar 4. 14 Piramida Penduduk Kapanewon Kalasan Tahun 2024

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

k) Piramida Penduduk Kapanewon Ngemplak

Penduduk Kapanewon Ngemplak tahun 2024 mencapai 66.774 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 46.241 jiwa atau 69,25 persen. Sementara jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 20.533 jiwa atau 30,75 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Ngemplak mengalami penurunan.

Piramida Kapanewon Ngemplak (Gambar 4.15) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 5.280 jiwa (7,91 persen). Selanjutnya kelompok usia non-produktif 10-14 tahun yang mencapai 5.122 jiwa (7,67 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Ngemplak mencapai 6.685 jiwa atau 10,01 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 10,26 persen.



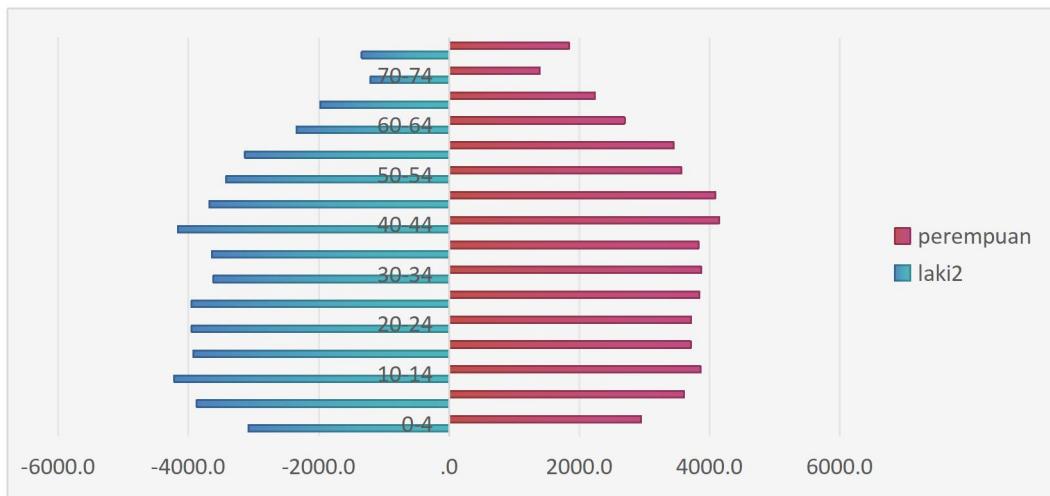
Gambar 4. 15. Piramida Penduduk Kapanewon Ngemplak Tahun 2024

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

I) Piramida Penduduk Kapanewon Ngaglik

Penduduk Kapanewon Ngaglik tahun 2024 mencapai 104.340 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 72.742 jiwa atau 69,72 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 31.598 jiwa atau 30,28 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Ngaglik mengalami penurunan.

Piramida Kapanewon Ngaglik (Gambar 4.16) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 40-44 tahun yang mencapai 8.309 jiwa (7,96 persen). Selanjutnya kelompok usia non-produktif 10-14 tahun sejumlah 8.083 jiwa (7,75 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Ngaglik mencapai 9.994 jiwa atau 9,28 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 10,26 persen.



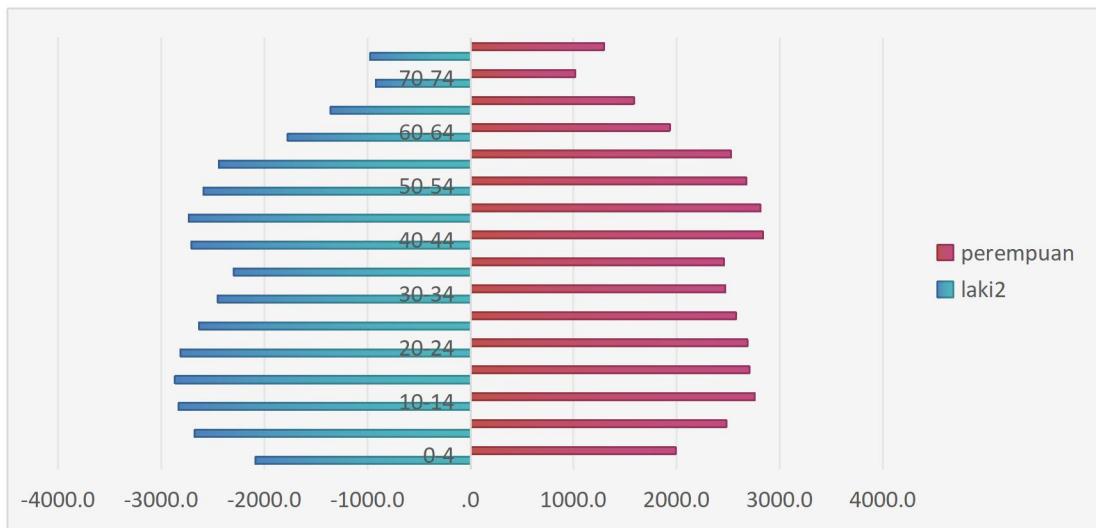
Gambar 4. 16 Piramida Penduduk Kapanewon Ngaglik Tahun 2024

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

m) Piramida Penduduk Kapanewon Sleman

Penduduk Kapanewon Sleman tahun 2024 mencapai 72.965 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 50.995 jiwa atau 69,89 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 21.970 jiwa atau 30,11 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Sleman mengalami penurunan.

Piramida Kapanewon Sleman (Gambar 4.17) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia 10-14 tahun sejumlah 5.590 (7,66 persen). Selanjutnya kelompok usia 15-19 tahun sejumlah 5.572 (7,64 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Sleman mencapai 7.146 jiwa atau 9,79 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 10,26 persen.



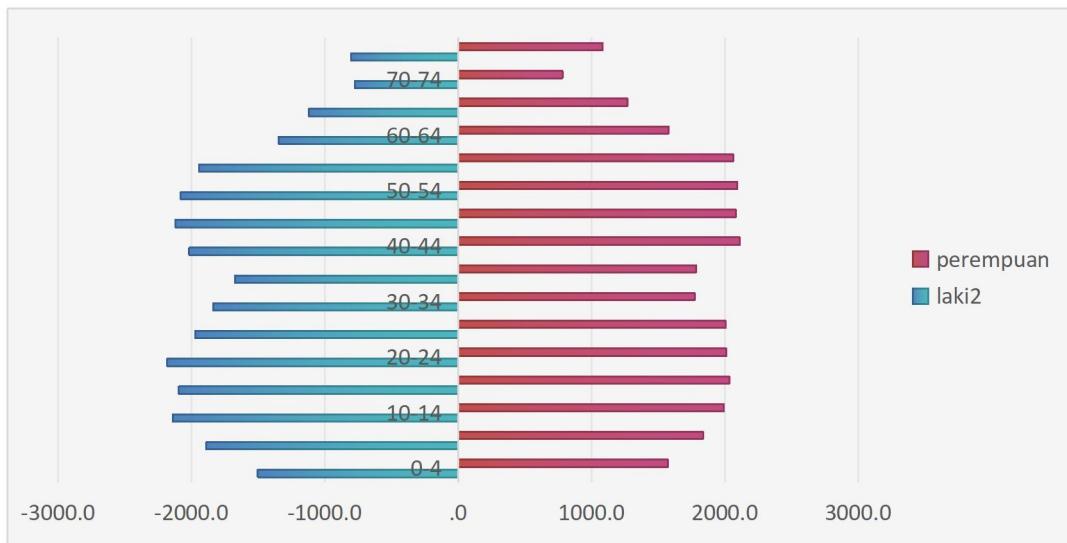
Gambar 4. 17 Piramida Penduduk Kapanewon Sleman Tahun 2024

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

n) Piramida Penduduk Kapanewon Tempel

Penduduk Kapanewon Tempel tahun 2024 mencapai 55.576 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 38.807 jiwa atau 69,83 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 16.769 jiwa atau 30,17 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Tempel menurun.

Piramida Kapanewon Tempel (Gambar 4.18) juga menunjukkan bahwa penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 45-49 tahun yang mencapai 4.206 jiwa (7,57 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 20-24 tahun mencapai 4.197 jiwa (7,55 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Tempel mencapai 5.835 jiwa atau 10,50 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 10,26 persen.



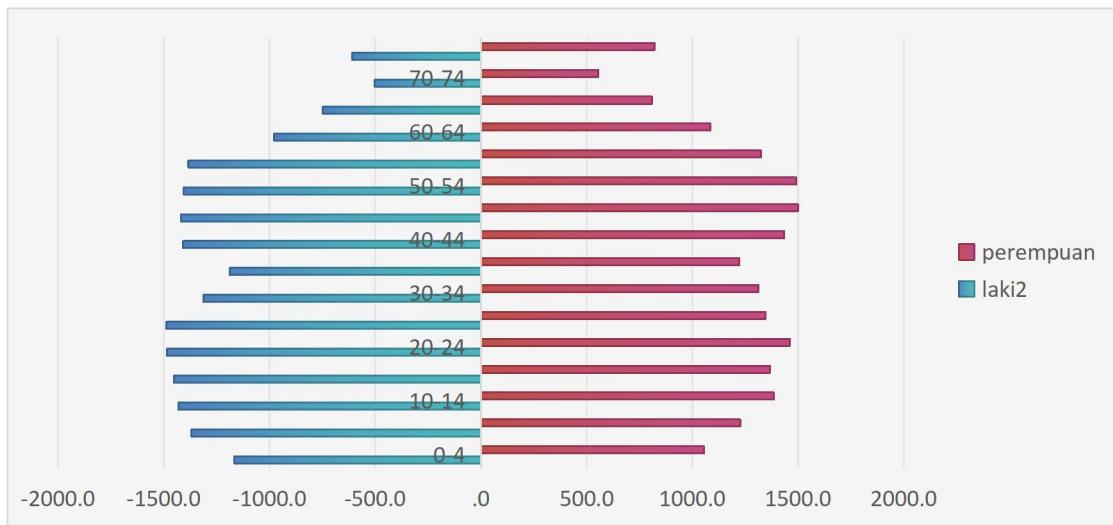
Gambar 4. 18 Piramida Penduduk Kapanewon Tempel Tahun 2024

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

o) Piramida Penduduk Kapanewon Turi

Penduduk Kapanewon Turi tahun 2024 mencapai 38.732 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 27.056 jiwa atau 69,85 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 11.676 jiwa atau 30,15 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitasnya menurun.

Piramida Kapanewon Turi (Gambar 4.19) juga menunjukkan bahwa penduduk Kapanewon Turi didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 20-24 yang mencapai 2.944 (7,60 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 45-49 tahun yang mencapai 2.918 jiwa (7,53 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Turi mencapai 4.045 jiwa atau 10,44 persen, angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 10,26 persen.



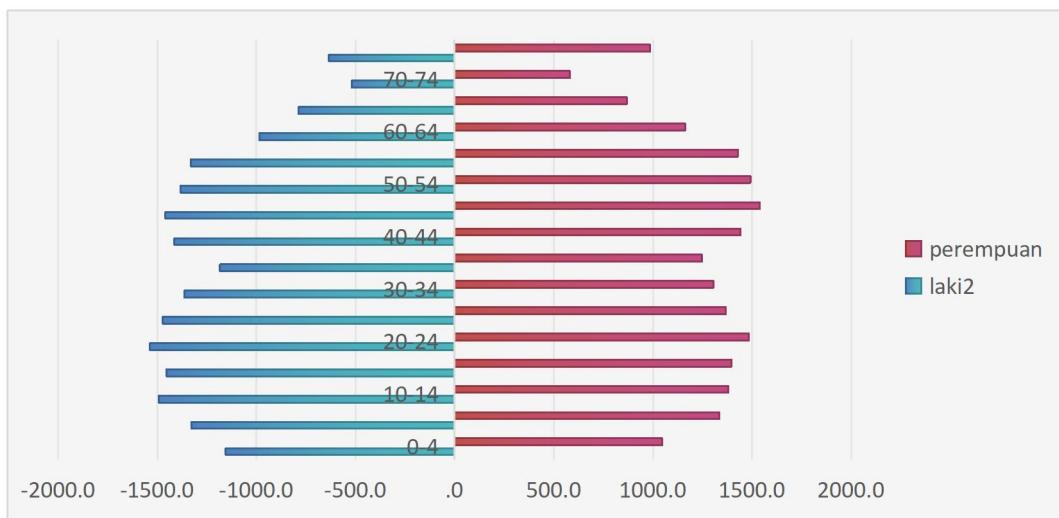
Gambar 4. 19 Piramida Penduduk Kapanewon Turi Tahun 2024

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

p) Piramida Penduduk Kapanewon Pakem

Penduduk Kapanewon Pakem tahun 2024 mencapai 39.568 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 27.450 jiwa atau 69,37 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 12.118 jiwa atau 30,63 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Pakem menurun.

Piramida Kapanewon Pakem (Gambar 4.20) juga menunjukkan bahwa penduduk Kapanewon Pakem didominasi oleh penduduk usia produktif terutama pada kelompok usia 20-24 tahun yang mencapai 3.022 jiwa (7,64 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 45-49 tahun mencapai 2.997 jiwa (7,57 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Pakem mencapai 4.378 jiwa atau 11,06 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yaitu 10,26 persen.



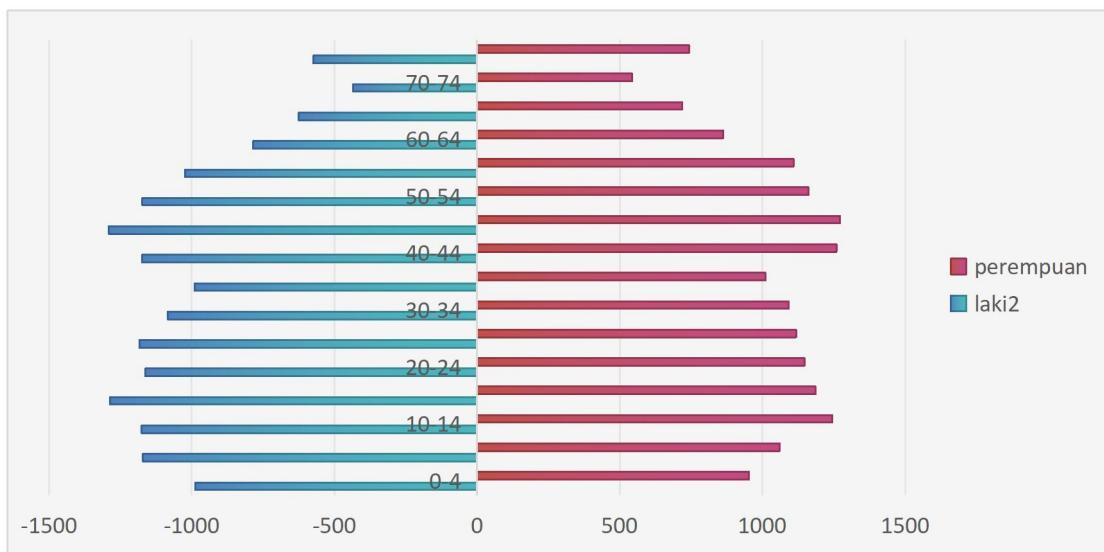
Gambar 4. 20 Piramida Penduduk Kapanewon Pakem Tahun 2024

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

q) Piramida Penduduk Kapanewon Cangkringan

Penduduk Kapanewon Cangkringan tahun 2024 mencapai 32.605 jiwa dan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni penduduk pada usia 15-64 tahun yang jumlahnya mencapai 22.374 jiwa atau 68,62 persen. Sementara jumlah penduduk usia non- produktif, yaitu usia 0-14 tahun, ditambah mereka yang berusia 65 tahun ke atas mencapai jumlah 10.231 jiwa atau 31,38 persen. Jika dilihat dasar piramida, yaitu umur 0-4 tahun, yang lebih sempit dibandingkan kelompok umur di atasnya, yaitu 5-9 tahun, ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas di Kapanewon Cangkringan menurun.

Piramida Kapanewon Cangkringan (Gambar 4.21) juga menunjukkan bahwa penduduk Kapanewon Cangkringan didominasi oleh penduduk usia non produktif terutama pada kelompok usia 45-49 tahun yang mencapai 2.563 jiwa (7,80 persen). Selanjutnya penduduk kelompok usia 15-19 tahun mencapai 2.473 (7,58 persen). Saat ini jumlah penduduk lansia di Kapanewon Cangkringan mencapai 3.638 jiwa atau 11,16 persen, angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi lansia di Kabupaten Sleman yang mencapai 10,26 persen.



Gambar 4. 21 Piramida Penduduk Kapanewon Cangkringan Tahun 2024

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

4.1.3.5 Rasio Ketergantungan

Angka rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator kependudukan lainnya yang menunjukkan terjadinya perubahan struktur penduduk menurut umur. Perubahan dimaksud adalah terjadinya pergeseran angka rasio antara penduduk yang non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun). Secara fungsional, indikator ini dari tahun ke tahun cenderung semakin kecil sebagai akibat turunnya jumlah penduduk usia muda dan naiknya jumlah penduduk usia produktif.

Rasio ketergantungan sangat penting karena mencerminkan jumlah orang yang secara ekonomi tidak aktif per seratus penduduk yang aktif secara ekonomi. Jika informasi mengenai aktivitas ekonomi dari setiap individu tidak tersedia, biasanya digunakan rasio antara penduduk kelompok umur 0-14 dan 65 tahun ke atas terhadap penduduk kelompok umur 15-64 tahun. Rasio ketergantungan secara umum dapat menggambarkan beban tanggungan ekonomi penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (kurang dari 15 tahun) dan terhadap usia 65 tahun ke atas.

Tingginya rasio ketergantungan akan menyita lebih banyak pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk yang bekerja. Keluarga-keluarga yang mempunyai jumlah anak banyak cenderung tidak mampu untuk menabung, akibatnya tingkat penanaman modal akan rendah. Penduduk dengan beban tanggungan anak yang tinggi harus membagi dana investasi yang besar untuk penggunaan yang kurang produktif secara segera, misalnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan dan non makanan dan bukan untuk investasi. Lebih jauh lagi, angka beban tanggungan yang besar, akan memaksa pemerintah untuk lebih memprioritaskan penyediaan fasilitas sosial yang cukup besar daripada memperhatikan kualitasnya.

**Tabel 4. 7 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Sleman Menurut Kapanewon
Tahun 2024**

Kapanewon	Rasio Ketergantungan		
	Muda	Tua	Total
Gamping	28,09	13,48	41,57
Godean	27,86	15,68	43,54
Moyudan	26,30	22,00	48,30
Minggir	26,29	21,33	47,62
Seyegan	28,73	15,50	44,24
Mlati	28,20	13,76	41,97
Depok	28,13	13,88	42,00
Berbah	28,64	12,88	41,51
Prambanan	29,69	15,76	45,44
Kalasan	28,58	12,84	41,42
Ngemplak	29,95	14,46	44,40
Ngaglik	29,70	13,74	43,44
Sleman	29,07	14,01	43,08
Tempel	28,18	15,04	43,21
Turi	28,20	14,95	43,15
Pakem	28,20	15,95	44,15
Cangkringan	29,47	16,26	45,73
Kabupaten Sleman	28,53	14,69	43,23

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui angka rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Sleman adalah sebesar 43,23 persen yang menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk

kelompok umur 15-64 tahun yang produktif menanggung sekitar 43-44 orang penduduk tidak produktif. Rasio ketergantungan sebesar 43,23 persen ini disumbangkan oleh rasio penduduk muda sebesar 28,53 persen dan rasio penduduk tua sebesar 14,69 persen. Sementara berdasarkan wilayah diketahui rasio ketergantungan paling tinggi pada tahun 2024 adalah Kapanewon Moyudan yang mencapai 48,30 persen. Sementara wilayah dengan rasio ketergantungan paling rendah di seluruh wilayah Sleman adalah Kapanewon Kalasan sebesar 41,42 persen. Fenomena angka rasio ketergantungan di Kabupaten Sleman dalam beberapa tahun ini sangat dinamis, dikarenakan struktur penduduk rata-rata bergeser ke kelompok usia tua. Pada kasus Kapanewon Moyudan rasio ketergantungan yang tinggi disumbang oleh kelompok muda 26,30 dan tua sebesar 22,00. Hal ini menunjukkan struktur penduduk tua di Kapanewon Moyudan.

Gambaran penduduk di Kabupaten Sleman berdasarkan rasio beban ketergantungan ini menunjukkan adanya perkembangan produktivitas sumberdaya manusianya sudah tinggi dan beban penduduk tidak produktif dalam pembangunan semakin rendah. Dengan demikian maka pembangunan dapat terus dilakukan karena penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh usia produktif. Kabupaten Sleman akan menikmati dekade *Window of Opportunity* atau jendela kesempatan. Hal itu akan terjadi pada kondisi dimana jumlah penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun) meningkat sedangkan jumlah usia yang tidak produktif (0-14 tahun dan 65+) menurun. Pemanfaatan peluang ini dapat terjadi dengan prasyarat, antara lain iklim investasi kondusif untuk membuka kesempatan kerja produktif serta terdapat sumber daya pemerintah untuk diharapkan akan terjadi *window of opportunity* tersebut dengan angka ketergantungan mencapai 44-50 persen. Kondisi rasio beban ketergantungan penduduk Sleman sudah mencapai di bawah 50 persen yaitu 43,23 di tahun 2024. Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sleman telah menikmati *window of opportunity*.

4.1.4 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin

Perkawinan merupakan peristiwa demografis yang penting dalam proses transisi menuju masa dewasa. Dalam demografi, perkawinan menandai berbagai transisi dalam

kehidupan, dari anak menjadi dewasa, dari anggota rumah tangga inti menjadi terpisah dan membentuk keluarga mandiri, dan juga transisi ke dalam masa reproduksi potensial yang diakui oleh masyarakat serta hukum negara dan agama (Hull, 2011).

Di Indonesia sendiri, perkawinan dianggap sebagai gerbang untuk membangun keluarga. Perkawinan dipandang sebagai hal yang sakral dalam kaca mata agama dan budaya karena perkawinan tidak hanya menandai kedewasaan tetapi juga status sosial seseorang di masyarakat. Proses menuju perkawinan melibatkan banyak negosiasi tidak saja antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Faktor sosial serta budaya sangat berperan dalam proses menuju perkawinan tersebut. Perkawinan merupakan langkah awal pembentukan suatu keluarga atau rumah tangga. Oleh karena itu status perkawinan ini penting untuk dianalisis sebab dari perkawinan ini akan merubah perilaku demografi yaitu dengan adanya kelahiran. Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, umur perkawinan pertama, dan lama kawin akan berguna untuk melakukan estimasi angka kelahiran yang akan terjadi. Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidaksiapan orangtua untuk pengasuhan anak serta kurang matangnya perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga. Indikator perkawinan ini, berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program- program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga berencana atau pembangunan keluarga.

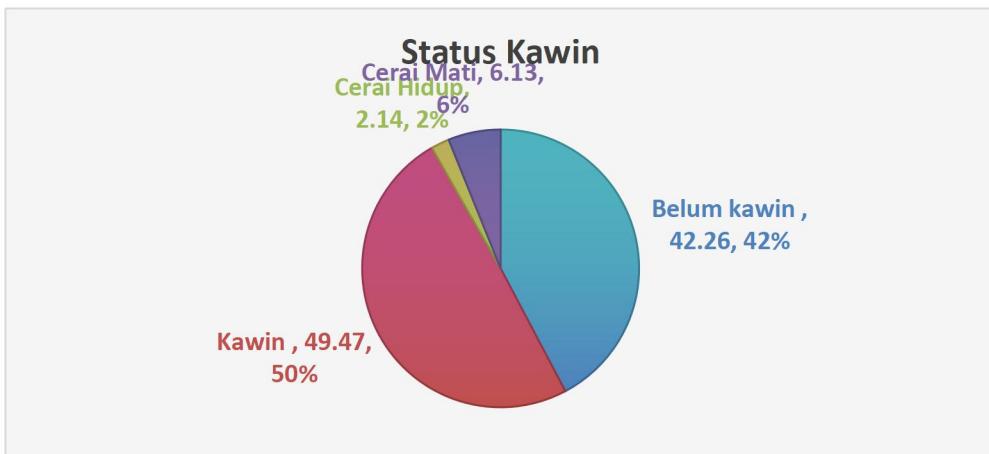
Perkawinan merupakan peristiwa demografis yang sangat kental dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Tidak seperti kelahiran dan kematian yang merupakan peristiwa terkait biologis, perkawinan dan perceraian ditentukan oleh undang-undang, konsensus, serta budaya yang dalam beberapa kasus sulit untuk diukur dalam statistik. Dalam konteks tertentu, baik di negara maju maupun berkembang, perkawinan tidak selalu berarti ikatan yang disahkan oleh negara atau agama, namun dapat juga berupa

konsensus (mutual consent) baik dari pasangan itu sendiri maupun dengan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, definisi status perkawinan dalam sensus dan survey perlu diperhatikan agar semua peristiwa terkait perkawinan dapat tercatat dengan baik.

Mengukur peristiwa perkawinan dalam statistik memerlukan definisi yang sesuai dengan konsep perkawinan di suatu wilayah. Hull (2011) merangkum empat kategori status perkawinan yang umum digunakan dalam sensus dan survey penduduk di negaraAsia termasuk Indonesia.

1. Belum menikah (*single/never married*), yaitu status belum/tidak terikat dalam perkawinan. Status ini melekat sejak lahir hingga perkawinan pertama. Secara sosial, masa lajang (*singlehood*) diasosiasikan dengan masa anak-anak dan belum dewasa.
2. Menikah atau kawin adalah status terikat dalam perkawinan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Menikah merupakan bersatunya dua insan untuk meneruskan keturunan (*reproductive union*) yang diakui oleh masyarakat, agama dan budaya serta hukum dan negara. Umumnya, status menikah dibuktikan dengan sebuah sertifikat yang diterbitkan pemerintah, otoritas agama, atau masyarakat. Meskipun tidak ada sertifikat atau surat nikah, keabsahan status kawin dapat ditentukan oleh masyarakat sekeliling yang menganggap pasangan sebagai suami istri.
3. Janda/duda mati atau cerai mati, yaitu status yang diperoleh setelah kematian pasangan. Status ini dibuktikan dengan surat nikah disertai dengan akta kematian dari pasangan.
4. Janda/duda cerai hidup, yaitu status yang diperoleh setelah pernikahan berakhir secara hukum. Status ini dibuktikan dengan surat keterangan bercerai. Hukum agama sendiri pada dasarnya tidak membolehkan terjadinya perceraian sehingga status cerai tersebut terkadang diperoleh dari pengakuan individu disertai pengakuan dari masyarakat. Dalam Sensus Penduduk, seseorang akan dicatat sebagai cerai hidup meskipun belum resmi secara hukum.

Keempat status di atas sangat tergantung kepada pengakuan responden yang juga dipengaruhi oleh konsensus masyarakat tentang perkawinan itu sendiri dalam pencatatan.



Gambar 4. 22 Persentase Penduduk Sleman Menurut Status Perkawinan

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Tabel 4. 8 Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin Berdasarkan Tahun 2024

No	Kapanewon	Status Perkawinan				
		Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
1	Gamping	41.770	47.921	2.057	5.660	97.408
2	Godean	30.414	36.160	1.491	4.539	72.604
3	Moyudan	13.596	17.216	527	2.642	33.981
4	Minggir	13.049	16.698	563	2.437	32.747
5	Seyegan	22.049	26.699	1084	3.371	53.203
6	Mlati	41.178	46.885	2402	5.623	96.088
7	Depok	55.940	60.696	3071	7.404	127.111
8	Berbah	24.631	28.736	1.286	3.612	58.265
9	Prambanan	22.493	28.644	1.086	3.517	55.740
10	Kalasan	37.592	43.134	1.988	5.150	87.864
11	Ngemplak	28.425	33.079	1.423	3.847	66.774
12	Ngaglik	45.295	51.053	2.264	5.728	104.340
13	Sleman	31.120	35.800	1.534	4.511	72.965
14	Tempel	22.883	27.863	1.111	3.719	55.576
15	Turi	16.046	19.478	760	2.448	38.732
16	Pakem	16.405	19.654	839	2.670	39.568
17	Cangkringan	12.832	17.064	617	2.092	32.605
Kabupaten Sleman		475.718	556.780	24.103	68.970	1.125.571

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Berdasarkan status perkawinan penduduk Sleman menurut data SIAK diketahui paling banyak adalah berstatus kawin yakni mencapai 556.780 jiwa atau 49,47 persen di tahun 2024. Urutan kedua penduduk berdasarkan status perkawinan adalah belum kawin yang mencapai 475.718 jiwa atau sekitar 42,26 persen dan selanjutnya adalah penduduk yang berstatus cerai mati sebanyak 68.970 jiwa atau 6,13 persen. Sementara penduduk dengan status cerai hidup sebanyak 24.103 jiwa atau 2,14 persen.

4.1.4.1 Angka Perkawinan Umum

Angka perkawinan umum merupakan proporsi jumlah penduduk yang memiliki status kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun untuk satu periode tahun tertentu. Angka perkawinan umum di kabupaten Sleman pada tahun 2024 berjumlah 5,09 dengan jumlah kejadian nikah sebanyak 6.522 kasus. Jumlah angka perkawinan umum tertinggi di Kabupaten Sleman ada di Kapanewon Moyudan (6,39) dengan jumlah kejadian nikah di tahun 2024 sebanyak 152, Kapanewon Pakem (6,35) dengan jumlah kejadian nikah sebanyak 284. Sedangkan kapanewon dengan angka perkawinan umum terendah ada di Kapanewon Godean (4,41), dan Gamping (4,61). Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 4.10.

Mengetahui angka perkawinan umum ini dapat digunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk kawin, namun pembaginya adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas dimana usia tersebut lebih berisiko untuk kawin. Penduduk yang berusia dibawah 15 tahun tidak diikutsertakan karena pada usia tersebut umumnya tidak berisiko kawin.

Tabel 4. 9 Banyaknya Pernikahan dan Angka Perkawinan Umum Menurut Kapanewon Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Pernikahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk > 15 thn	Angka Perkawinan Kasar	Angka Perkawinan Umum
Gamping	516	96.801	78.081	4,64	4,61
Godean	353	72.203	58.512	4,43	4,41
Moyudan	152	33.898	27.955	4,19	6,39
Minggir	178	32.694	26.915	5,06	5,02
Seyegan	295	52.873	42.604	5,02	4,97
Mlati	537	95.468	77.000	4,85	4,82
Depok	707	126.374	101.934	4,77	4,73
Berbah	336	57.696	46.475	5,13	5,05
Prambanan	335	55.451	44.362	5,46	5,43
Kalasan	508	87.256	70.109	5,03	4,97
Ngemplak	444	65.984	52.926	5,80	5,71
Ngaglik	648	103.467	82.736	5,53	5,47
Sleman	430	72.520	58.141	5,20	5,17
Tempel	337	55.380	44.642	5,44	5,40
Turi	246	38.536	31.101	5,56	5,55
Pakem	284	39.297	31.828	6,39	6,35
Cangkringan	216	32.455	26.012	5,95	5,92
Kab Sleman	6.522	1.118.353	901.333	5,13	5,09

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

4.1.4.2 Angka Perceraian Umum

Angka perceraian umum menunjukkan perbandingan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun untuk satu tahun tertentu. Angka perceraian umum dijadikan sebagai informasi data yang dipergunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk cerai hidup. Angka perceraian umum di Kabupaten Sleman di tahun 2024 berjumlah 2,93 dengan kejadian talak dan cerai berjumlah 2.900 kasus. Kapanewon dengan jumlah angka perceraian umum terbanyak ada di Kecamatan Berbah (4,12) dan Seyegan (4,06). Sedangkan kapanewon dengan angka perceraian umum terendah ada di Kapanewon Gamping (1,95) dan Godean (2,23).

Tabel 4. 10 Banyaknya Perceraian, Angka Perceraian Kasar, dan Angka Perceraian Umum Menurut Kapanewon Tahun 2024

Kapanewon	Kejadian Perceraian	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk >15 thun	Angka Perceraian Kasar	Angka Perceraian Umum
Gamping	170	96.801	78.081	1,98	1,95
Godean	154	72.203	58.512	2,25	2,23
Moyudan	72	33.898	27.955	2,29	2,27
Minggir	87	32.694	26.915	2,82	2,81
Seyegan	190	52.873	42.604	4,11	4,06
Mlati	281	95.468	77.000	3,40	3,34
Depok	300	126.374	101.934	2,68	2,64
Berbah	201	57.696	46.475	4,21	4,12
Prambanan	135	55.451	44.362	2,70	2,68
Kalasan	256	87.256	70.109	3,45	3,40
Ngemplak	179	65.984	52.926	3,34	3,28
Ngaglik	221	103.467	82.736	2,52	2,47
Sleman	210	72.520	58.141	3,36	3,31
Tempel	116	55.380	44.642	2,42	2,38
Turi	105	38.536	31.101	3,08	3,06
Pakem	130	39.297	31.828	3,47	3,45
Cangkringan	93	32.455	26.012	3,40	3,36
Kab Sleman	2.900	1.118.353	901.333	2,97	2,93

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, sm 1 2024

4.1.5 Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1988 adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung. Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 1999 mendefinisikan keluarga sebagai dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian dari Depkes dan BKKBN di atas, definisi keluarga

dapat lebih disederhanakan menjadi sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.

Keluarga memiliki beberapa peran penting baik dilihat dari fungsi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Fungsi ekonomi diharapkan dapat mendorong keluarga agar dapat membina kualitas kehidupan ekonomi keluarga, sekaligus dapat bersikap realistik serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Fungsi pendidikan, bukan hanya berhubungan dengan kecerdasan, melainkan juga termasuk pendidikan emosional dan juga pendidikan spiritualnya. Fungsi kesehatan berintikan bahwa setiap keluarga dapat menerapkan cara hidup sehat dan mengerti tentang kesehatan reproduksinya. Termasuk di dalamnya adalah pemahaman tentang alat kontrasepsi maupun pengetahuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja.

Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) bahwa fungsi keluarga dibagi menjadi 7. Fungsi keluarga yang dikemukakan oleh BKKBN ini senada dengan fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, yaitu:

1. Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.
2. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.
4. Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.

5. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
7. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa datang.

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/ hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.

Sudiharto (2007) menjelaskan bahwa keluarga yang dikenal dalam masyarakat kita memiliki dua bentuk yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti (*Nuclear family*) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin. Sementara itu, keluarga luas (*extended family*) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Indikator untuk menggambarkan kondisi keluarga, antara lain jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga, hubungan dengan kepala keluarga, karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur, karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin, karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin, karakteristik kepala keluarga berdasarkan pendidikan, dan karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan.

4.1.5.1 Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga besar menjadi keluarga kecil.

Tabel 4. 11 Jumlah Penduduk, Jumlah Kepala Keluarga, dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Tahun 2024

Kapanewon	Jumlah Kepala Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga		
	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga
Gamping	33.824	97.408	2,88
Godean	25.623	72.604	2,83
Moyudan	12.580	33.981	2,70
Minggir	12.123	32.747	2,70
Seyegan	18.845	53.203	2,82
Mlati	33.714	96.088	2,85
Depok	44.607	127.111	2,85
Berbah	20.456	58.265	2,85
Prambanan	19.854	55.740	2,81
Kalasan	30.510	87.864	2,88
Ngemplak	23.100	66.774	2,89
Ngaglik	35.888	104.340	2,91
Sleman	25.617	72.965	2,85
Tempel	19.674	55.576	2,82
Turi	13.526	38.732	2,86
Pakem	14.108	39.568	2,80
Cangkringan	11.645	32.605	2,80
Kabupaten Sleman	395.694	1.125.571	2,84

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 adalah 2,84 orang, artinya rata-rata jumlah anggota keluarga kurang lebih terdiri dari tiga orang dan ini dapat dikategorikan sebagai keluarga inti. Rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak tiga orang ini, merata di setiap kapanewon di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan wilayah diketahui bahwa kapanewon paling banyak rata-rata anggota keluarganya adalah Ngaglik yang mencapai 2,91 jiwa. Sementara rata-rata anggota keluarga paling kecil adalah Kapanewon Minggir dan Moyudan mencapai 2,70 jiwa.

4.1.5.2 Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga (SHDK)

Kepala Keluarga adalah laki-laki atau perempuan yang berstatus kawin atau janda/duda yang mengepalai suatu keluarga yang anggotanya terdiri dari suami/isteri dan atau anak-anaknya. Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga, seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orangtua dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama, seperti: pembantu rumah tangga.

Data SIAK tahun 2024 memperlihatkan jumlah total penduduk Sleman tahun 2024 mencapai 1.125.571 jiwa dan terdiri dari 395.694 KK. Jika dilihat dari status hubungan dengan kepala keluarga, tampak bahwa paling banyak berstatus sebagai anak, yakni 443.793 jiwa atau 39,4 persen. Selanjutnya adalah status sebagai kepala keluarga, yaitu sebesar 395.694 KK atau 35,2 persen, dan ketiga adalah status istri yang mencapai 263.158 atau 23,4 persen. Kepala keluarga umumnya dipegang oleh suami, tetapi di Kabupaten Sleman terdapat 86.319 KK perempuan atau 15,2 persen perempuan yang menjadi kepala keluarga dari seluruh perempuan yang ada di kabupaten Sleman.

Tabel 4. 12 Status Hubungan dengan Keluarga Tahun 2024

Status Hubungan dengan Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penduduk(jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Persen
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen		
Kepala keluarga	309.375,0	55,5	86.319,0	15,2	395.694,0	35,2
Suami	47,0	0,0	- ,0	0,00	47,0	0,0
Isteri	0	0,00	263.158,0	46,3	263.158,0	23,4
Anak	237.470,0	42,6	206.323,0	36,3	443.793,0	39,4
Menantu	173,0	0,0	279,0	0,0	452,0	0,0
Cucu	3.818,0	0,7	3.184,0	0,6	7.002,0	0,6
Orangtua	256,0	0,0	1.863,0	0,3	2.119,0	0,2
Mertua	121,0	0,0	858,0	0,2	979,0	0,1
Famili lain	4.870,0	0,9	4.796,0	0,8	9.666,0	0,9
Pembantu	4,0	0,0	32,0	0,0	36,0	0,0
Lainnya	1.302,0	0,2	1.323,0	0,2	2.625,0	0,2
Kab Sleman	557.436,0	100,0	568.135,0	100,0	1.125.571,0	100,0

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

4.1.5.3 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat patriarki yang memposisikan laki-laki sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, membahas kepala keluarga perempuan menjadi sangat menarik. Di satu sisi munculnya kepala keluarga perempuan merupakan indikator kemiskinan, karena absennya laki-laki sebagai pencari nafkah. Tetapi di sisi lain dapat pula dipahami bahwa munculnya kepala rumah tangga perempuan merupakan indikasi masuknya perempuan ke sektor publik atau pergeseran dari fungsi reproduksi ke produksi.

Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga. Hal ini menyebabkan mereka pada umumnya menyandang jabatan sebagai kepala keluarga. Namun dalam beberapa dekade ini terlihat peningkatan jumlah

perempuan yang menyandang jabatan kepala keluarga tersebut. Konstruksi sosial bahwa laki-laki adalah kepala keluarga nampaknya mulai bergeser. Namun sering kali terjadi meskipun menjabat sebagai kepala keluarga, justru perempuan menanggung beban untuk menanggung seluruh kebutuhan keluarga. Hal semacam ini sering terjadi pada kepala keluarga perempuan lansia. Beratnya beban untuk mencukupi kebutuhan hidup dan tanggung jawab terhadap berbagai hal atau masalah dalam keluarga menyebabkan perempuan menjadi pihak yang sangat rentan terjebak dalam kemiskinan.

Tabel 4. 13 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Jumlah Kepala Keluarga				
		Laki	Persen	Perempuan	Persen	Jumlah
1	Gamping	26.533	78,44	7.291	21,556	33.824
2	Godean	20.080	78,37	5.543	21,633	25.623
3	Moyudan	9.707	77,16	2.873	22,838	12.580
4	Minggir	9.304	76,75	2.819	23,253	12.123
5	Seyegan	14.902	79,08	3.943	20,923	18.845
6	Mlati	26.274	77,93	7.440	22,068	33.714
7	Depok	34.038	76,31	10.569	23,694	44.607
8	Berbah	16.069	78,55	4.387	21,446	20.456
9	Prambanan	15.702	79,09	4.152	20,913	19.854
10	Kalasan	23.958	78,53	6.552	21,475	30.510
11	Ngemplak	18.200	78,79	4.900	21,212	23.100
12	Ngaglik	28.064	78,20	7.824	21,801	35.888
13	Sleman	19.978	77,99	5.639	22,013	25.617
14	Tempel	15.537	78,97	4.137	21,028	19.674
15	Turi	10.782	79,71	2.744	20,287	13.526
16	Pakem	10.883	77,14	3.225	22,859	14.108
17	Cangkringan	9.364	80,41	2.281	19,588	11.645
Kabupaten Sleman		309.375	78,19	86.319	21,815	395.694

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

4.1.5.4 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

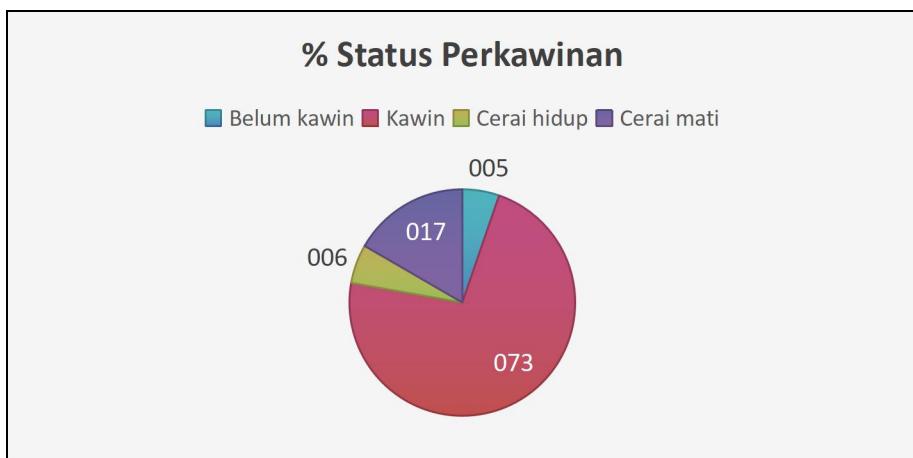
Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggungjawab sebagai kepala keluarga, baik secara ekonomi, sosial maupun psikologis. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status perkawinan dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai, baik hidup maupun mati.

Tabel 4. 14 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan dan Kapanewon Tahun 2024

No	Kecamatan	Status Perkawinan				
		Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
1	Gamping	1.841	24.698	1.880	5.405	33.824
2	Godean	1.294	18.713	1.350	4.266	25.623
3	Moyudan	693	8.857	476	2.554	12.580
4	Minggir	674	8.580	505	2.364	12.123
5	Seyegan	892	13.673	1.003	3.277	18.845
6	Mlati	2.009	24.110	2.200	5.395	33.714
7	Depok	3.503	31.478	2.712	6.914	44.607
8	Berbah	951	14.826	1.187	3.492	20.456
9	Prambanan	661	14.730	1.004	3.459	19.854
10	Kalasan	1.506	22.185	1.872	4.947	30.510
11	Ngemplak	1.142	17.012	1.301	3.645	23.100
12	Ngaglik	2.048	26.419	2.046	5.375	35.888
13	Sleman	1.246	18.543	1.420	4.408	25.617
14	Tempel	808	14.222	1.020	3.624	19.674
15	Turi	579	9.974	675	2.298	13.526
16	Pakem	688	10.168	761	2.491	14.108
17	Cangkringan	395	8.707	554	1.989	11.645
Kabupaten Sleman		20.930	286.895	21.966	65.903	395.694

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Total kepala keluarga di Kabupaten Sleman berdasarkan data SIAK Tahun 2024 mencapai 395.694 KK. Kepala keluarga menurut status perkawinan paling banyak adalah kawin, yaitu 72,50 persen atau 286.895 KK. Berikutnya adalah cerai mati sebanyak 16,66 persen atau 65.903 KK dan ketiga adalah cerai hidup sebanyak 21.966 KK atau 5,55 persen. Hal yang menarik dari data tersebut adalah adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin dan jumlahnya cukup besar. Biasanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin merupakan anggota keluarga yang mengantikan orang tua yang meninggal, atau kepala keluarga tersebut hidup sendirian. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dijadikan sebagai kepala keluarga bukan hanya didasarkan pada status perkawinannya, tetapi lebih kepada kemampuan dan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga. Selain itu, konstruksi sosial bahwa laki-laki adalah kepala keluarga nampaknya mulai bergeser dengan adanya kepala keluarga perempuan tidak hanya kepala keluarga laki-laki berstatus kawin. Sementara itu, jika diperhatikan lebih lanjut terdapat kepala keluarga yang berstatus cerai (baik cerai hidup maupun cerai mati). Laki-laki pada umumnya segera melakukan perkawinan kembali sesudah terjadi perceraian, sementara perempuan lebih banyak yang menunda dengan berbagai alasan.



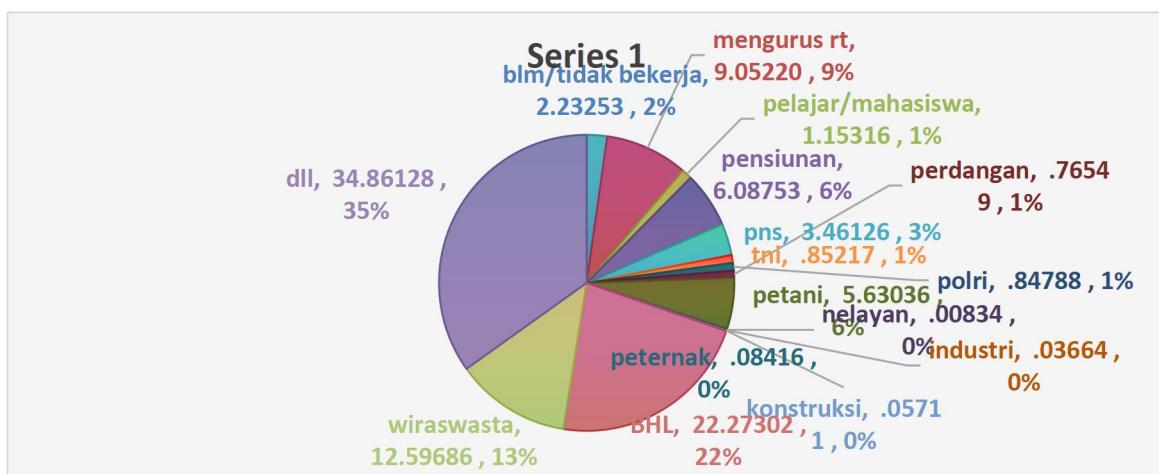
Gambar 4. 23 Persentase Kepala Keluarga Menurut Status Kawin Tahun 2024

4.1.5.5 Karakteristik Kepala keluarga Berdasarkan Status Bekerja

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota, serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap potensi ekonomi **Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2024**

keluarga. Oleh sebab itu, informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Gambar 4.24 memperlihatkan persentase kepala keluarga berdasarkan status bekerja. Proporsi kepala keluarga di Kabupaten Sleman yang bekerja pada tahun 2024 sebanyak 81,48 persen. Selain kepala keluarga yang berstatus bekerja, terdapat juga kepala keluarga yang status tidak bekerja yang terdiri dari tidak bekerja, pensiunan, sekolah, dan mengurus rumah tangga.

Jumlah kepala keluarga yang statusnya tidak bekerja besarnya mencapai 18,52 persen yang terdiri atas pelajar (1,15 persen), pensiunan (6,09 persen), mengurus rumah tangga (9,06 persen), dan belum bekerja (2,3 persen). Ada hal yang menarik terkait dengan status pekerjaan kepala rumah tangga yang tidak bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari harus ditanggung oleh anggota keluarga lainnya yang bekerja. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sleman perlu memperhatikan keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja, walaupun proporsi mereka kecil. Kepala keluarga yang tidak bekerja, dapat disebabkan karena sudah memasuki usia pensiun atau memang tidak mampu masuk ke pasar kerja. Untuk mereka ini perlu diberikan intervensi untuk membantu meningkatkan status kesejahteraan mereka, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja memiliki status ekonomi yang rendah.



Gambar 4. 23 Persentase Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja Tahun 2024

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

4.1.6 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

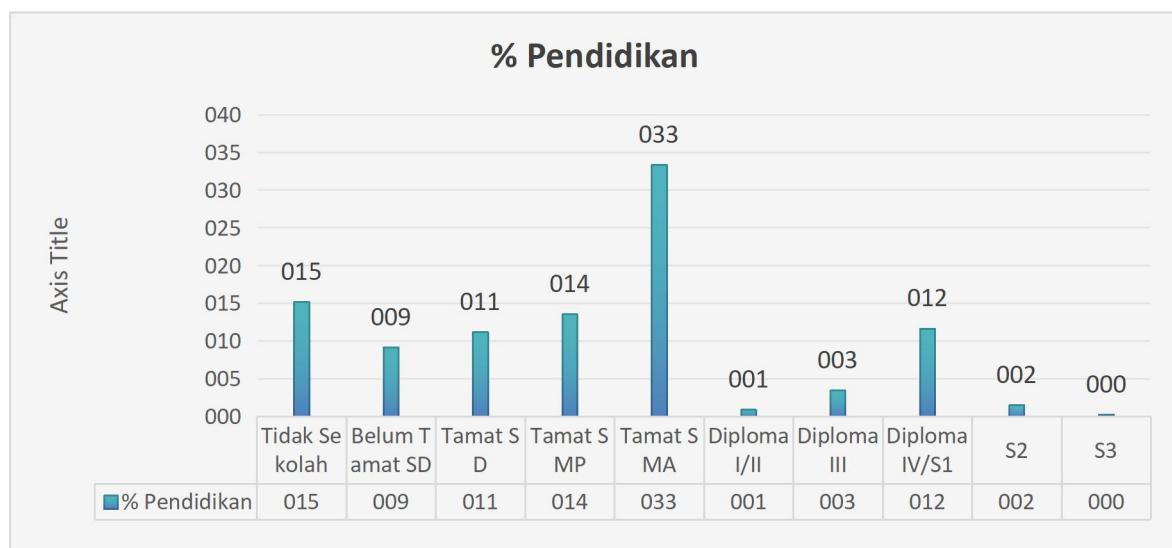
4.1.6.1 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Tingkat pendidikan juga dianggap sebagai investasi Sumber Daya Manusia (*human capital investment*) selain kesehatan. Adam Smith, seorang ekonom, berpendapat bahwa pendidikan dianggap sebagai investasi yang dapat membantu meningkatkan produktivitas, artinya investasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) seperti halnya investasi pada kapital fisik.

Tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan makin baiknya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, sekaligus juga menunjukkan makin tingginya tingkat sosial ekonomi masyarakat. Pendidikan yang tinggi memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, juga pendapatan yang lebih baik, dan pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Peningkatan pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pada gilirannya akan berdampak pada perbaikan kinerja dalam melakukan pekerjaan. Perbaikan kinerja dalam pengertian ekonomis berarti terjadi peningkatan output yang dihasilkan.

Perencanaan di bidang pendidikan memerlukan data-data sebagai acuan dasar. Untuk itu, dalam subbab berikut ini akan disajikan beberapa indikator yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan program pendidikan di masa datang khususnya di Kabupaten Sleman. Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan di Kabupaten Sleman pada waktu tertentu yang disajikan berdasarkan jenis kelamin per kecamatan dalam bentuk tabel. Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan di suatu kabupaten/kota sekaligus kualitas sumberdaya manusia.

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sleman sebagian besar pada tingkat pendidikan rendah. Pada tahun 2024 paling banyak penduduk Sleman berpendidikan SMA yang mencapai 375.497 jiwa atau 33,31 persen. Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak kedua adalah tidak memiliki ijazah yang mencapai 170.578 jiwa atau 15,15 persen. Hal ini berkaitan dengan usia penduduk belum masuk sekolah yaitu usia 0-4 sejumlah 52.590 jiwa atau 4,66%. Ditambahkan penduduk usia 5-6 tahun (belum usia sekolah) yang ikut mempengaruhi prosentase penduduk tidak memiliki ijazah. Penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi setara Diploma III ke atas sampai dengan Strata III masih tercatat sebanyak 188.891 jiwa atau 16,78 persen. Sedangkan penduduk dengan tingkat pendidikan Diploma IV/S1 relatif banyak, yaitu 12%. Menandakan situasi tingkat kecerdasan yang tinggi untuk penduduk.



Gambar 4. 25 Persentase Kepala Keluarga Menurut Pendidikan 2024

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Tabel 4. 15 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2024

No	Kapanewon	Tidak Sekolah	Belum tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Diploma I/II	Akdm/	Diploma IV/ Strata I	Strata II	Strata III	Total
								Diploma III/ Sarjana Muda				
1	GAMPING	15.632	8.781	12.036	12.837	30.683	841	3.405	11.446	1.527	220	97.408
2	GODEAN	11.270	6.992	9.049	9.283	24.113	609	2.326	8.001	846	115	72.604
3	MOYUDAN	4.331	2.938	3.607	4.317	12.668	483	1.242	4.073	297	25	33.981
4	MINGGIR	4.401	3.254	4.055	4.478	11.296	336	1.076	3.587	243	21	32.747
5	SEYEGAN	7.731	5.235	7.149	8.110	18.988	309	1.340	3.994	323	24	53.203
6	MLATI	13.379	9.749	10.752	12.194	31.735	854	3.327	12.130	1.710	258	96.088
7	DEPOK	20.014	9.588	9.825	14.553	38.852	1.375	5.984	22.484	3.787	649	127.111
8	BERBAH	8.737	5.177	6.619	9.440	20.008	412	1.729	5.481	594	68	58.265
9	PRAMBANAN	10.049	4.624	8.753	9.053	18.407	249	1.055	3.247	283	20	55.740
10	KALASAN	13.739	8.030	8.410	12.188	29.612	785	3.163	10.389	1.338	210	87.864
11	NGEMPLAK	10.353	6.160	5.886	8.396	22.759	549	2.290	8.802	1.315	264	66.774
12	NGAGLIK	17.083	9.223	9.047	11.498	32.118	916	4.453	16.703	2.740	559	104.340
13	SLEMAN	9.789	7.454	7.436	11.016	25.873	572	2.531	7.416	801	77	72.965
14	TEMPEL	7.918	5.937	7.551	8.649	19.490	386	1.397	3.931	293	24	55.576
15	TURI	5.810	3.528	5.262	5.716	13.908	327	941	2.993	232	15	38.732
16	PAKEM	5.570	3.552	4.409	5.509	14.022	375	1.462	4.244	391	34	39.568
17	CANGKRINGAN	4.772	2.938	5.688	5.063	10.965	233	701	2.060	175	10	32.605
KAB SLEMAN		170.578	103.160	125.534	152.300	375.497	9.611	38.422	130.981	16.895	2.593	1.125.571

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Tabel 4. 17 Jumlah Penduduk Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2024

Ijazah tertinggi	Jenis Kelamin				Total	
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Tidak mempunyai Ijazah	84.912	15,23	85.666	15,08	170.578	15,15
Belum tamat SD	50.627	9,08	52.533	9,25	103.160	9,17
SD/MI	56.134	10,07	69.400	12,22	125.534	11,15
SMP/Mts	76.444	13,71	75.856	13,35	152.300	13,53
SMA/SMK/MA	197.744	35,47	177.753	31,29	375.497	33,36
DI/DII	3.790	0,68	5.821	1,02	9.611	0,85
DIII/Akademi	15.555	2,79	22.867	4,02	38.422	3,41
DIV/S1	61.370	11,01	69.611	12,25	130.981	11,64
S2	9.110	1,63	7.785	1,37	16.895	1,50
S3	1.750	0,31	843	0,15	2.593	0,23
Jumlah	557.436	100	568.135	100	1.125.571	100

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

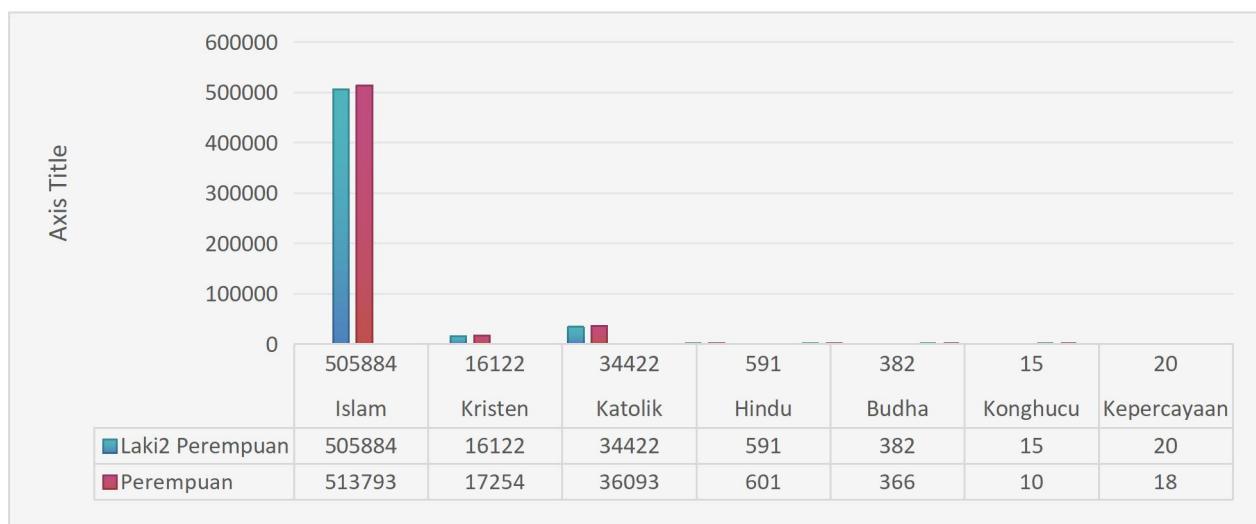
4.1.6.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama/kepercayaan di suatu kabupaten/kota pada waktu tertentu yang disajikan per kapanewon dalam bentuk tabel. Dari tabel tersebut akan diketahui karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu, dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

Penduduk Sleman berdasarkan agama dan kepercayaan menurut wilayah tempat tinggal dari data SIAK diketahui paling banyak tinggal di Kapanewon Depok. Mulai dari Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghuchu paling banyak berdomisili di Kapanewon Depok. Penduduk yang beragama Islam yang tinggal di Kapanewon Depok pada tahun 2024 tercatat sebanyak 107.925 jiwa atau 10,58 persen dari total penduduk Sleman yang beragama Islam. Berikutnya adalah penduduk yang beragama Katolik yang tinggal di Kapanewon Depok pada tahun 2024 sebanyak 10.992 jiwa atau 15,59 persen dari total penduduk Sleman yang beragama

Katolik. Penduduk yang beragama Kristen yang tinggal di Kapanewon Depok tahun 2024 tercatat sebanyak 7.664 jiwa atau 22,96 persen dari total penduduk yang beragama Kristen di Sleman. Sementara penduduk yang beragama Hindu paling banyak juga tinggal di Kapanewon Depok yakni mencapai 308 jiwa atau 25,84 persen dari total penduduk Sleman yang beragama Hindu. Penduduk dengan agama Budha yang tinggal di Kapanewon Depok sebanyak 104 jiwa atau 27,22 persen dari total penduduk yang beragama Budha.

Khonghuchu yang telah diakui oleh pemerintah sebagai salah satu agama di Indonesia paling banyak tinggal di Kapanewon Mlati yakni sebesar 11 jiwa atau 44 persen dari total penduduk yang beragama Khonghuchu. Penduduk dengan aliran kepercayaan terbanyak tinggal di Kapanewon Depok dan Godean sebanyak 6 orang atau 15,78 persen dari total 38 orang penganut Kepercayaan di Kabupaten Sleman.



Gambar 4. 26 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan 2024

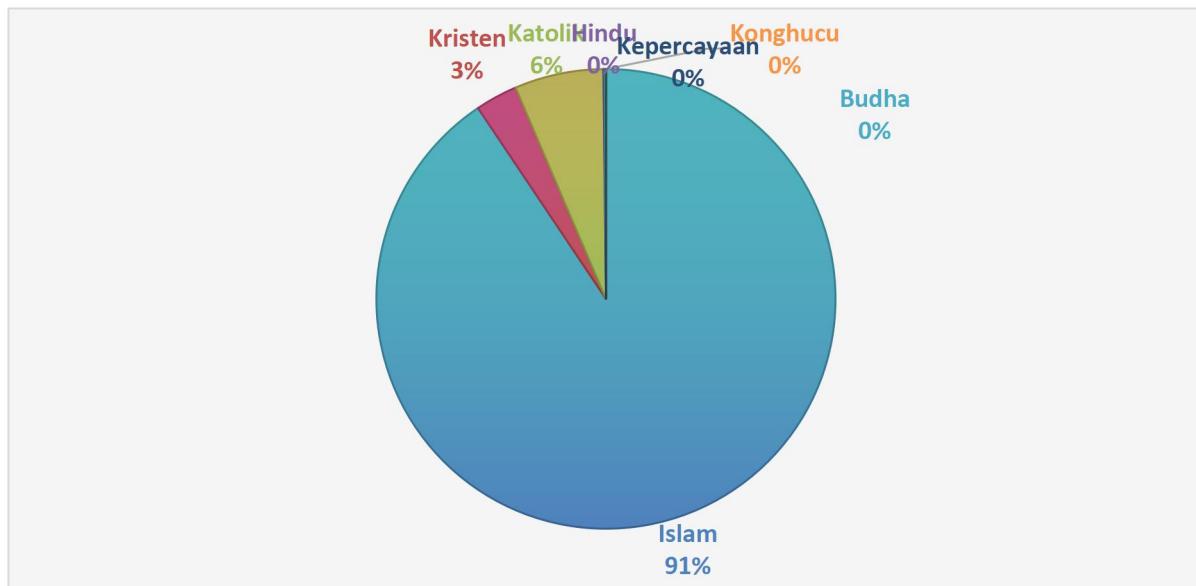
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Tabel 4. 16 Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan yang Dianut Tahun 2024

Kapanewon	Agama/Kepercayaan																							
	Islam			Kristen			Katholik			Hindu			Budh a			Khonghucu			Kepercayaan					
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
Gamping	43.791	44.180	87.971	1.881	2.030	3.911	2.593	2.751	5.344	43	29	72	52	56	108	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Godean	33.015	33.175	66.190	1.429	1.523	2.952	1.642	1.722	3.364	16	19	35	29	27	56	1	-	1	2	4	6			
Moyudan	14.669	14.810	29.479	243	278	521	1.945	2.027	3.972	5	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minggir	12.743	13.275	26.018	354	397	751	2.876	3.092	5.968	4	2	6	1	1	2	-	-	-	1	1	2			
Seyegan	25.602	25.835	51.437	197	218	415	595	657	1.252	43	51	94	1	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mlati	42.722	43.119	85.841	1.562	1.705	3.267	3.425	3.283	6.708	71	68	139	66	52	118	6	5	11	2	2	4			
Depok	53.413	54.512	107.925	3.700	3.964	7.664	5.255	5.737	10.992	146	162	308	104	109	213	3	-	3	4	2	6			
Berbah	26.551	26.988	53.539	922	972	1.894	1.330	1.426	2.756	29	34	63	8	5	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prambanan	26.022	26.738	52.760	232	257	489	1.253	1.210	2.463	9	10	19	4	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalasan	38.793	39.344	78.137	1.552	1.584	3.136	3.112	3.308	6.420	65	62	127	21	19	40	1	-	1	1	2	3			
Ngemplak	30.458	30.848	61.306	887	984	1.871	1.669	1.765	3.434	69	67	136	14	10	24	-	1	1	2	-	2			
Ngaglik	46.465	47.523	93.988	1.629	1.770	3.399	3.297	3.373	6.670	74	78	152	68	57	125	1	-	1	3	2	5			
Sleman	33.682	34.215	67.897	624	653	1.277	1.837	1.916	3.753	7	6	13	5	12	17	2	3	5	2	1	3			
Tempel	26.999	27.548	54.547	105	112	217	392	405	797	2	2	4	3	6	9	-	-	-	-	-	2	2		
Turi	18.172	18.143	36.315	102	100	202	1.078	1.131	2.209	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3		
Pakem	16.953	17.381	34.334	590	585	1.175	1.952	2.094	4.046	3	3	6	3	2	5	-	-	-	-	2	-	2		
Cangkringan	15.834	16.159	31.993	113	122	235	171	196	367	4	2	6	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kab Sleman	505.884	513.793	1.019.677	16.122	17.254	33.376	34.422	36.093	70.515	591	601	1.192	382	366	748	15	10	25	20	18	38			

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Berdasarkan data SIAK diketahui penduduk Sleman menurut agama dan kepercayaan dianut tahun 2024 paling banyak adalah Islam yang mencapai 1.019.677 jiwa atau 90,59 persen. Urutan kedua terbanyak adalah Katolik yang mencapai 70.515 jiwa atau 6,26 persen dan berikutnya adalah Kristen sebanyak 33.376 jiwa atau 3 persen. Berikutnya adalah Hindu sebanyak 1.192 jiwa atau 0,1 persen, Budha mencapai 748 jiwa atau 0,065 persen, Khonghuchu sebanyak 25 jiwa atau 0,003 persen, dan penganut Kepercayaan 38 jiwa atau 0,002 persen.



Gambar 4. 27 Persentase Penduduk Sleman Menurut Agama/Kepercayaan yang Dianut Tahun 2024

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

4.1.7 Kelahiran

4.1.7.1 Jumlah Kelahiran Menurut Kapanewon

Jumlah keseluruhan kelahiran di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 berjumlah 6.049 jiwa. Jumlah tersebut jika diperinci menurut kapanewon akan terlihat pola bahwa jumlah kelahiran beriringan dengan besarnya laju pertumbuhan penduduk. Kapanewon dengan jumlah kelahiran tertinggi ada di Depok dengan jumlah 1.434 jiwa, dan kapanewon Ngaglik dengan jumlah kelahiran 1.078 jiwa. Adapun kapanewon dengan jumlah kelahiran terendah di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 ada di Moyudan dengan jumlah kelahiran 276 jiwa, dan Minggir dengan jumlah kelahiran 282 jiwa.

Tabel 4. 17 Jumlah Kelahiran Menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Kapanewon	Jumlah Kelahiran Hidup			
		L	P	Jumlah	Persen
1	Gamping	552	515	1.067	9,04
2	Godean	483	403	886	7,51
3	Moyudan	133	143	276	2,34
4	Minggir	148	134	282	2,39
5	Seyegan	245	218	463	3,92
6	Mlati	552	521	1.073	9,09
7	Depok	737	697	1.434	12,15
8	Berbah	311	374	685	5,80
9	Prambanan	346	324	670	5,68
10	Kalasan	422	352	774	6,56
11	Ngemplak	377	349	726	6,15
12	Ngaglik	515	563	1.078	9,13
13	Sleman	413	380	793	6,72
14	Tempel	250	270	520	4,41
15	Turi	210	182	392	3,32
16	Pakem	191	170	361	3,06
17	Cangkringan	164	157	321	2,72
Kabupaten Sleman		6.049	5.752	11.801	100

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2024

4.1.7.2 Angka Kelahiran Kasar Menurut Kapanewon

Angka Kelahiran Kasar menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun. Informasi tersebut berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Angka kelahiran kasar di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 sebesar 10,55 dengan jumlah tertinggi ada di Kapanewon Godean (12,27) dan Prambanan (12,08). Sedangkan angka kelahiran kasar terendah menurut kapanewon ada di Moyudan (8,14), dan Minggir (8,63). Untuk melihat detail terkait penjelasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 18 Distribusi Parameter Kelahiran di Kabupaten Sleman Tahun 2024

Kapanewon	Angka Kelahiran Kasar (<i>Crude Birth Rate (CBR)</i>)	Angka Kelahiran Umum (<i>Rough Fertility Rate (GFR)</i>)	jml penduduk sm 1	jml kelahiran	jml penduduk wanita 15-45
Gamping	11,02	42,70	96.801	1.067	24.990
Godean	12,27	49,10	72.203	886	18.043
Moyudan	8,14	34,44	33.898	276	8.013
Minggir	8,63	36,41	32.694	282	7.746
Seyegan	8,76	35,13	52.873	463	13.180
Mlati	11,24	43,72	95.468	1.073	24.545
Depok	11,35	43,71	126.374	1.434	32.806
Berbah	11,87	45,80	57.696	685	14.955
Prambanan	12,08	47,85	55.451	670	14.003
Kalasan	8,87	34,16	87.256	774	22.659
Ngemplak	11,00	42,96	65.984	726	16.898
Ngaglik	10,42	39,93	103.467	1.078	26.996
Sleman	10,93	43,01	72.520	793	18.438
Tempel	9,39	37,78	55.380	520	13.763
Turi	10,17	41,02	38.536	392	9.557
Pakem	9,19	37,25	39.297	361	9.691
Cangkringan	9,89	39,96	32.455	321	8.033
Kabupaten Sleman	10,55	41,51	1.118.353	11.801	284.316

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2024

4.2 Data Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Peningkatan kualitas penduduk berkaitan dengan upaya menjadikan penduduk sebagai sumberdaya manusia melalui pembangunan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengembangan kualitas fisik, dan pengembangan kualitas non fisik untuk mewujudkan produktifitas dan ketahanan penduduk, khususnya terhadap kelompok anak, remaja, dewasa, usia lanjut, wanita, penduduk, dan masyarakat rentan.

Penduduk merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Dengan kualitas tinggi, penduduk akan lebih banyak berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Selain itu, pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam dan teknologi, tetapi justru lebih bergantung pada kualitas penduduknya. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dalam arti kualitas dan kuantitas, maka tantangan di masa yang akan datang dapat diatasi dengan baik. Kualitas sumber daya manusia yang ada sekarang masih perlu ditingkatkan agar tantangan tersebut diatasi dengan baik. Pembangunan kualitas penduduk ditentukan oleh tiga hal : Pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas penduduk tahun 2035 adalah penduduk yang sehat, cerdas produktif dan berakhhlak mulia serta berkarakter. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan. Hal itu dianggap sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, kebangsaan, dan hidup layak. Penduduk yang sehat tidak hanya berumur panjang sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup, tetapi juga produktif, cerdas dan berdaya saing. Penduduk dengan kualitas seperti itu diharapkan dapat mengatasi arus pasar global yang semakin menguat.

Kuantitas penduduk seperti jumlah dan pertumbuhan penduduk, kepadatan dan persebaran penduduk, komposisi penduduk menurut usia, jenis kelamin, pendidikan, status, dan lainnya telah dibahas dalam bab sebelumnya. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pengendalian kuantitas penduduk namun juga harus mengedepankan aspek kualitas penduduk sebagai tujuan utama pembangunan kependudukan. Dengan kata lain, kebijakan pembangunan kependudukan yang terarah dan terencana senantiasa berupaya melakukan pengendalian jumlah dan perkembangan penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penertiban dokumen kependudukan. Harapan akhir adalah tercipta penduduk yang berkualitas dan tersebar secara merata di seluruh wilayah serta mampu menikmati hasil-hasil pembangunan secara berkeadilan.

Penduduk dari segi kualitas sangat menentukan kemajuan suatu wilayah. Penduduk yang besar apabila tidak disertai dengan kualitas yang baik tidak akan menjadi kekuatan

namun justru akan menjadi beban bagi wilayah. Kualitas penduduk dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan situasi mobilitas. Pada bab ini akan dibahas penduduk dilihat dari kualitasnya di Kabupaten Sleman. Pembahasan pada bab ini dibatasi pada permasalahan kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.

4.2.1 Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan menyediakan fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih hingga pemberian penyuluhan kesehatan kepada masyarakat untuk memberi layanan asuransi kesehatan (BPJS dan lain-lain).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan SDG's adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2035 ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (tobacco control), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Secara nasional MDG's yang dicapai pada tahun 2015 masih menyisakan persoalan yaitu permasalahan yang belum tuntas ditangani, seperti upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), pengendalian penyakit HIV/AIDS, dan malaria, terdapat hal-hal baru yang menjadi perhatiannya. Hal-hal tersebut, di antaranya yakni kematian akibat penyakit tidak menular (PTM); penyalahgunaan narkotika dan alkohol; kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas; asuransi kesehatan umum; dan kontaminasi dan polusi air, udara, dan tanah; serta penanganan krisis dan kegawatdaruratan.

Bagaimana dengan Kabupaten Sleman yang memiliki indeks pembangunan manusia dengan indikator angka harapan hidup tertinggi di Indonesia. Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas penduduk dari aspek kesehatan adalah kelahiran dan kematian. Kedua indikator ini mempengaruhi perubahan jumlah dan struktur penduduk.

4.2.1.1 Rasio Anak Perempuan

Rasio anak perempuan (*Child Woman Ratio/CWR*) adalah rasio antara jumlah anak dibawah umur 5 tahun dibagi jumlah penduduk perempuan usia reproduksi (15-49) tahun. CWR didapatkan dari jumlah anak umur di bawah 5 tahun dibagi jumlah perempuan usia produktif dikalikan konstanta 1000. Jumlah anak yang berusia dibawah 5 tahun di Kabupaten Sleman berjumlah 62.817 jiwa, sedangkan jumlah perempuan usia subur 15-49 tahun berjumlah 286.297 jiwa. Secara keseluruhan CWR di Kabupaten Sleman berjumlah 21,94.

Tabel 4. 19 Rasio Anak Perempuan Menurut Kapanewon Tahun 2024

Kapanewon	Jumlah Anak <5 Tahun	Jumlah Perempuan 15-49Tahun	Rasio Anak Perempuan (<i>Child Woman Ratio (CWR)</i>)
Gamping	5.384	25.165	21,39
Godean	3.888	18.150	21,42
Moyudan	1.682	8.046	20,90
Minggir	1.616	7.778	20,78
Seyegan	3.050	13.265	22,99
Mlati	5.308	24.656	21,53
Depok	6.996	33.017	21,19
Berbah	3.268	15.117	21,62
Prambanan	3.196	14.053	22,74
Kalasan	4.969	22.870	21,73
Ngemplak	3.911	17.120	22,84
Ngaglik	6.032	27.210	22,17
Sleman	4.076	18.546	21,98
Tempel	3.076	13.806	22,28
Turi	2.221	9.634	23,05
Pakem	2.203	9.780	22,53
Cangkringan	1.941	8.084	24,01
Kab Sleman	62.817	286.297	21,94

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Kapanewon dengan jumlah CWR tertinggi ada di Cangkringan sebesar 24,01, dan Turi 23,05. Sedangkan kapanewon dengan jumlah CWR terendah ada di Minggir dengan jumlah 20,78 dan Moyudan dengan jumlah 20,90.

4.2.1.2 Angka Kematian Bayi

Kematian atau mortalitas adalah salah satu dari tiga komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap jumlah, struktur dan komposisi penduduk. Dua komponen proses demografi lainnya adalah kelahiran (fertilitas), dan mobilitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk di suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut (Mantra, 2003). Yang dimaksud dengan mati ialah peristiwa hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Budi Utomo, 1985). Dari definisi ini terlihat bahwa keadaan "mati" hanya bisa terjadi kalau sudah terjadi kelahiran hidup. Dengan demikian keadaan mati selalu didahului oleh keadaan hidup. Dengan kata lain, mati tidak pernah ada kalau tidak ada kehidupan. Sedangkan hidup selalu dimulai dengan lahir hidup (*live birth*).

Pengaruh mortalitas adalah mengurangi jumlah penduduk suatu daerah. Peristiwa kematian dapat terjadi pada semua penduduk baik laki-laki, perempuan, usia bayi, usia anak, usia dewasa dan tua. Besar kecilnya mortalitas menurut karakteristik tersebut beragam. Keragaman tersebut menyebabkan perubahan dalam struktur umur penduduk suatu wilayah ataupun komposisi penduduk menurut jenis kelamin (Sumantri dan Anwar, 1995). Berbeda dengan fertilitas dan migrasi yang dapat berulang kali terjadi dalam sepanjang hidupnya. Tetapi mortalitas hanya sekali terjadi serangkaian peristiwa penyakit atau kesakitan atau morbiditas. Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate = IMR*) menunjukkan jumlah bayi yang meninggal selama setahun untuk 1000 kelahiran. Angka atau tingkat kematian bayi merupakan ukuran kematian yang mengacu pada jumlah bayi yang meninggal dari bayi yang lahir hidup. Bayi lahir hidup yang dimasud adalah janin yang keluar dari rahim ibu dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan meskipun hanya sekejap. Bayi didefinisikan sebagai

penduduk yang berumur 0 tahun atau belum mencapai ulang tahun yang pertama. Terdapat variasi tingkat kematian bayi antara negara berkembang dan negara maju. Pada negara-negara berkembang, tingkat kematian bayi bisa mencapai 200 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan di negara-negara maju angka tersebut bisa di bawah 15 per 1000 kelahiran (Budi Utomo, 1983). Demikian juga terdapat variasi angka kematian bayi di dalam suatu negara, misalnya antara daerah geografi yang satu dengan lainnya, antara kota dengan desa, antara berbagai golongan sosial ekonomi penduduk. Di samping itu angka kematian bayi pada suatu tempat juga bervariasi menurut waktu.

Angka kematian bayi merupakan indikator yang sangat berguna, tidak saja terhadap status kesehatan anak, tetapi juga terhadap status penduduk keseluruhan dan kondisi ekonomi di mana penduduk tersebut bertempat tinggal. Angka kematian bayi tidak hanya merefleksikan besarnya masalah kesehatan yang bertanggung jawab langsung terhadap kematian bayi, seperti diare, infeksi saluran pernafasan, salah gizi, penyakit- penyakit infeksi spesifik dan kondisi prenatal, tetapi juga merefleksikan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan dan secara umum tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Baik di negara maju, maupun di negara yang sedang berkembang, terdapat hubungan yang terbalik antara tingkat kematian bayi dengan status ekonomi orang tua.

Angka kematian bayi juga telah menunjukkan fungsinya sebagai indikator ampuh dalam menilai perubahan kondisi kesehatan di suatu negara. Berbeda dengan - negara-negara di mana angka kematian bayi telah dihitung selama periode yang lama, terlihat reduksi angka kematian bayi sejajar dengan perbaikan standar hidup dan kondisi sanitasi termasuk juga kemudahan pelayanan kesehatan yang sebaik- baiknya bagi masyarakat.

Angka kematian bayi Kabupaten Sleman telah berada pada angka yang sangat rendah, sebagaimana terjadi di negara maju, yakni pada angka di bawah 10 kematian dari 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan tabel dibawah terlihat angka kematian bayi di Kabupaten Sleman sangat rendah yaitu 4 (empat) orang per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi berada di bawah 5 (lima) yang telah dicapai sejak tahun 2012, hanya dicapai oleh negara maju di Eropa dan Amerika. Kapanewon dengan jumlah kematian bayi terendah ada di kapanewon Moyudan dan Minggir masing-masing satu kasus.

Sedangkan jumlah kematian paling tinggi ada di kapanewon Gamping dengan jumlah kasus 11 kematian. Angka kematian bayi paling tinggi ada di kapanewon Sleman sejumlah 11,35 dan terendah ada di kapanewon Mlati sejumlah 2,80.

Tabel 4. 20 Distribusi Angka Kematian Bayi menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Kapanewon	Jumlah Kelahiran Hidup			Jumlah Kematian Bayi			Angka Kematian Bayi / 1000 kelahiran hidup		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	TOTAL
1.	Gamping	552	515	1.067	7	4	11	12,68	7,77	10,31
2.	Godean	483	403	886	1	3	4	2,07	7,44	4,51
3.	Moyudan	133	143	276	1	-	1	7,52	-	3,62
4.	Minggir	148	134	282	1	-	1	6,76	-	3,55
5.	Seyegan	245	218	463	4	-	4	16,33	-	8,64
6.	Mlati	552	521	1.073	1	2	3	1,81	3,84	2,80
7.	Depok	737	697	1.434	7	1	8	9,50	1,43	5,58
8.	Berbah	311	374	685	1	1	2	3,22	2,67	2,92
9.	Prambanan	346	324	670	2	2	4	5,78	6,17	5,97
10.	Kalasan	422	352	774	3	2	5	7,11	5,68	6,46
11.	Ngemplak	377	349	726	3	1	4	7,96	2,87	5,51
12.	Ngaglik	515	563	1.078	2	3	5	3,88	5,33	4,64
13.	Sleman	413	380	793	4	5	9	9,69	13,16	11,35
14.	Tempel	250	270	520	1	3	4	4,00	11,11	7,69
15.	Turi	210	182	392	2	-	2	9,52	-	5,10
16.	Pakem	191	170	361	3	3	6	15,71	17,65	16,62
17.	Cangkringan	164	157	321	2	1	3	12,20	6,37	9,35
Kab Sleman		6.049	5.752	11.801	45	31	76	7,44	5,39	6,44

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2024

Rerata angka kematian bayi di kabupaten Sleman sebanyak 6,4 orang per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi laki-laki lebih tinggi (7,445 orang per 1.000 kelahiran hidup) dibandingkan kematian bayi perempuan (5,39 orang per 1.000 kelahiran hidup). Meskipun angka kematian bayi di Kabupaten Sleman dan disetiap kapanewon relatif rendah, namun merujuk tujuan kesehatan SDG's adalah kesehatan bagi semua umur, maka kondisi ini perlu diperhatikan. Angka kematian bayi di Kabupaten Sleman lebih disebabkan karena BBLR. Posisi di Kabupaten Sleman sudah mencapai "hardcore" atau angka kematian

yang sangat rendah. Namun upaya cakupan pelayanan kesehatan yang disertai dengan peningkatan mutu pelayanan, sistem rujukan yang optimal, serta peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pelayanan neonatal dan bayi harus tetap dilakukan dalam upaya menekan angka kematian bayi. Angka kematian bayi dalam pembahasan ini dibedakan menjadi dua yaitu angka kematian neonatal dan angka kematian post neonatal.

Tabel 4. 21 Distribusi Kematian *Neonatal* menurut Kapanewon Tahun 2024

No.	Kapanewon	Jumlah Kelahiran Hidup			Jumlah Kematian Bayi			Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	TOTAL
1.	Gamping	552	515	1.067	5	2	7	9,06	3,88	6,56
2.	Godean	483	403	886	0	1	1	- ,00	2,48	1,13
3.	Moyudan	133	143	276	1	0	1	7,52	- ,00	3,62
4.	Minggir	148	134	282	0	0	0	- ,00	- ,00	- ,00
5.	Seyegan	245	218	463	2	0	2	8,16	- ,00	4,32
6.	Mlati	552	521	1.073	1	1	2	1,81	1,92	1,86
7.	Depok	737	697	1.434	7	1	8	9,50	1,43	5,58
8.	Berbah	311	374	685	1	1	2	3,22	2,67	2,92
9.	Prambanan	346	324	670	2	2	4	5,78	6,17	5,97
10.	Kalasan	422	352	774	3	0	3	7,11	- ,00	3,88
11.	Ngemplak	377	349	726	1	1	2	2,65	2,87	2,75
12.	Ngaglik	515	563	1.078	2	3	5	3,88	5,33	4,64
13.	Sleman	413	380	793	2	2	4	4,84	5,26	5,04
14.	Tempel	250	270	520	1	3	4	4,00	11,11	7,69
15.	Turi	210	182	392	1	0	1	4,76	- ,00	2,55
16.	Pakem	191	170	361	3	3	6	15,71	17,65	16,62
17.	Cangkringan	164	157	321	2	0	2	12,20	- ,00	6,23
Kab Sleman		6.049	5.752	11.801	34	20	54	4,58	3,48	4,58

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2024

Angka kematian neonatal merupakan kematian bayi sebelum berumur satu bulan tetapi kurang dari satu tahun, sedangkan yang dimaksud dengan kematian lepas baru lahir atau *post neo natal death* merupakan kematian bayi setelah berumur satu bulan tetapi kurang dari satu tahun. Kematian neonatal pada umumnya dikarenakan asfiksia atau kekurangan oksigen sebelum, selama, dan setelah proses persalinan.

Tabel 4. 22 Distribusi Kematian *Post-Neonatal*/menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024

Kapanewon	Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Bayi			Angka Kematian Pos Neonatal per 1000 kelahiran hidup				
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P
1. Gamping	552	515	1.067	2	2	4	3,62	3,88	3,75
2. Godean	483	403	886	1	2	3	2,07	4,96	3,39
3. Moyudan	133	143	276	-	-	-	-	-	-
4. Minggir	148	134	282	1	-	1	6,76	-	3,55
5. Seyegan	245	218	463	2	-	2	8,16	-	4,32
6. Mlati	552	521	1.073	-	1	1	-	1,92	0,93
7. Depok	737	697	1.434	-	-	-	-	-	-
8. Berbah	311	374	685	-	-	-	-	-	-
9. Prambanan	346	324	670	-	-	-	-	-	-
10. Kalasan	422	352	774	-	2	2	-	5,68	2,58
11. Ngemplak	377	349	726	2	-	2	5,31	-	2,75
12. Ngaglik	515	563	1.078	-	-	-	-	-	-
13. Sleman	413	380	793	2	3	5	4,84	7,89	6,31
14. Tempel	250	270	520	-	-	-	-	-	-
15. Turi	210	182	392	1	-	1	4,76	-	2,55
16. Pakem	191	170	361	-	-	-	-	-	-
17. Cangkringan	164	157	321	-	1	1	-	6,37	3,12
Kab Sleman	6.049	5.752	11.801	11	11	22	1,86	1,91	1,86

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2024

Tanpa asupan oksigen yang cukup, jaringan dan organ tubuh bayi akan mengalami kerusakan. Kondisi ini membutuhkan penanganan medis segera, karena semakin lama bayi

tidak mendapatkan cukup oksigen, akan semakin besar pula risikonya mengalami kerusakan pada organ, seperti paru-paru, jantung, otak, dan ginjal. Penting bagi ibu hamil untuk rutin menjalani pemeriksaan kehamilan dengan USG agar kondisi kesehatan janin dapat terpantau dengan baik, mengkonsumsi makanan bervitamin selama hamil.

Berdasarkan tabel 4.23 dan tabel 4.24 terlihat bahwa angka kematian bayi lebih banyak terjadi pada umur dibawah 1 bulan. Banyak sekali faktor yang dapat dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari segi penyebabnya, kematian bayi dibedakan menjadi dua jenis yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen adalah kematian bayi yang disebabkan oleh faktor-faktor anak yang dibawa sejak lahir, diwarisi oleh orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat dari ibunya selama kehamilan. Sedangkan kematian bayi eksogen adalah kematian bayi yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Perbedaan antara kedua jenis penyebab kematian tersebut idealnya dapat dilakukan melalui data statistik penyebab kematian, tetapi dalam praktek tidak mudah karena masalah kualitas data (United Nations, 1973).

Dengan semakin meningkatnya usia, penyebab kematian endogen semakin berkurang dan penyebab kematian eksogen meningkat. Sementara semua kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan (*post neonatal*) merupakan kematian eksogen, maka kematian eksogen pada bayi sebelum usia satu bulan (neonatal) besarnya kira-kira 25 persen dari seluruh kematian bayi pada post neonatal (Bourgouis Pichat, 1952). Dengan kata lain, jumlah kematian eksogen pada bayi adalah 1,25 kali lipat dari kematian bayi pada periode post neonatal. Gambaran ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan luar berkontribusi besar sebagai penyebab kematian bayi. Kualitas lingkungan pada bentuk kondisi hygiene, sanitasi dan sosial ekonomi akan sangat menentukan terhadap tinggi- rendahnya kematian bayi.

Apabila kematian bayi tinggi, maka rasio kematian bayi post neonatal terhadap kematian bayi neonatal adalah juga tinggi. Rasio ini menurun dengan semakin rendahnya kematian bayi yang sampai pada suatu saat dengan terkontrolnya faktor lingkungan luar, porsi kematian neonatal menjadi lebih dominan. Pada keadaan ini, kematian bayi lebih banyak disebabkan faktor endogen, yang pengontrolannya memerlukan kemampuan untuk menembus pengetahuan tentang masalah-masalah biologi yang lebih mendasar (Keyfitz, 1977). Di Indonesia dan di banyak negara berkembang lainnya, keadaan tersebut masih jauh

dari jangkauan.

4.2.1.3 Angka Kematian Anak dan Balita

Angka kematian anak (*Child Mortality Rate = CMR*) didefinisikan sebagai jumlah kematian anak berumur 1-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun. Dengan demikian angka kematian anak tidak menyertakan angka kematian bayi. Parameter CMR ini banyak digunakan sebagai indikator keadaan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan yang dimaksud adalah air bersih, kebersihan lingkungan tempat tinggal dan perumahan. Sanitasi udara dan kelembaban dan faktor lainnya yang berkaitan dengan tingginya prevalensi penyakit menular, gizi buruk akibat pola makan yang tidak betul. Jadi CMR lebih ditujukan pada faktor yang mempengaruhi kematian di luar faktor ibu yaitu keadaan lingkungan. Berbeda dengan IMR yang berhubungan dengan keadaan ibu seperti keadaan gizi ibu sebelum kehamilan, pemantauan atau pemeriksaan kehamilan dan penolong kelahiran, pemberian air susu ibu serta makanan tambahan hingga akan mencapai usia kurang dari satu tahun.

Dibandingkan dengan angka kematian bayi, angka kematian anak lebih merefleksikan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Angka ini tinggi pada keadaan salah gizi, hygiene buruk, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak dan insiden kecelakaan di dalam atau di sekitar rumah. Dalam menunjukkan kemiskinan, indikator ini lebih unggul dibandingkan dengan tingkat kematian bayi.

Sementara itu, tingkat kematian anak balita didefinisikan sebagai jumlah kematian anak usia dibawah lima tahun selama satu tahun per 1000 anak usia yang sama (0-4) tahun pada pertengahan tahun. Angka ini sekaligus merefleksikan tinggi rendahnya angka kematian bayi dan angka kematian anak. Hanya dengan menggunakan angka kematian bayi belum cukup untuk menggambarkan tingkat kematian anak pada umur di atas satu tahun. Dua penduduk dengan tingkat kematian bayi yang sama, belum tentu sama dalam hal angka kematian anak di atas satu tahun. Variasi angka ini, di negara berkembang dapat lebih tinggi dari 100, tetapi di negara maju dapat lebih rendah dari 2 (dua).

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kesempatan anak Indonesia untuk hidup sehat, tumbuh, dan berkembang secara optimal menjadi semakin terbuka. Dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial.

Tabel 4.25 menggambarkan mayoritas kapanewon tidak memiliki angka kematian anak namun masih ada beberapa kapanewon yaitu Minggir, Mlati, Kalasan, dan Turi yang memiliki angka kematian anak dan melebihi angka kematian anak tingkat kabupaten. Jika merujuk pada amanah pembangunan keberlanjutan bidang kesehatan, upaya meningkatkan derajat kesehatan anak masih perlu diusahakan meskipun sangat susah untuk menurunkan di angka yang sudah rendah.

Tabel 4. 23 Distribusi Angka Kematian Anak menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Kapanewon	Penduduk Usia 0 – 4 tahun			Jumlah Kematian Anak			Angka Kematian Anak		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	TOTAL
1.	Gamping	2.483	2.309	4.792	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.	Godean	1.852	1.624	3.476	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.	Moyudan	812	726	1.538	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	Minggir	725	746	1.471	2	0	2	2,76	0,00	1,36
5.	Seyegan	1.411	1.344	2.755	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6.	Mlati	2.446	2.277	4.723	1	0	1	0,41	0,00	0,21
7.	Depok	3.286	3.027	6.313	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8.	Berbah	1.490	1.412	2.902	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9.	Prambanan	1.482	1.396	2.878	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10.	Kalasan	2.280	2.166	4.446	0	1	1	0,00	0,46	0,22
11.	Ngemplak	1.831	1.604	3.435	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12.	Ngaglik	2.738	2.645	5.383	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13.	Sleman	1.873	1.775	3.648	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14.	Tempel	1.361	1.420	2.781	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15.	Turi	1.045	970	2.015	0	1	1	0,00	1,03	0,50
16.	Pakem	1.026	944	1.970	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17.	Cangkringan	897	869	1.766	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kab Sleman		29.038	27.254	56.292	3	2	5	0,10	0,07	0,09

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2024

Berbeda dengan angka kematian anak, angka kematian balita terlihat lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena angka kematian balita mengikutkan kelompok 0 tahun dalam perhitungannya. Sementara itu diketahui bahwa angka kematian 0 tahun atau angka kematian bayi mendominasi dalam perhitungan angka kematian balita. Artinya kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dapat memfokuskan pada faktor endogen atau biomedical meskipun tetap memperhatikan faktor eksogen yaitu sosial ekonomi, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan kependudukan.

Tabel 4. 24 Distribusi Angka Kematian Balita menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Kapanewon	Penduduk Usia 0 – 4 tahun			Jumlah Kematian Anak			Angka Kematian Anak		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	TOTAL
1.	Gamping	2.483	2.309	4.792	7	4	11	2,82	1,73	2,30
2.	Godean	1.852	1.624	3.476	1	3	4	0,54	1,85	1,15
3.	Moyudan	812	726	1.538	1	-	1	1,23	-	0,65
4.	Minggir	725	746	1.471	3	-	3	4,14	-	2,04
5.	Seyegan	1.411	1.344	2.755	4	-	4	2,83	-	1,45
6.	Mlati	2.446	2.277	4.723	2	2	4	0,82	0,88	0,85
7.	Depok	3.286	3.027	6.313	7	1	8	2,13	0,33	1,27
8.	Berbah	1.490	1.412	2.902	1	1	2	0,67	0,71	0,69
9.	Prambanan	1.482	1.396	2.878	2	2	4	1,35	1,43	1,39
10.	Kalasan	2.280	2.166	4.446	3	3	6	1,32	1,39	1,35
11.	Ngemplak	1.831	1.604	3.435	3	1	4	1,64	0,62	1,16
12.	Ngaglik	2.738	2.645	5.383	2	3	5	0,73	1,13	0,93
13.	Sleman	1.873	1.775	3.648	4	5	9	2,14	2,82	2,47
14.	Tempel	1.361	1.420	2.781	1	3	4	0,73	2,11	1,44
15.	Turi	1.045	970	2.015	2	1	3	1,91	1,03	1,49
16.	Pakem	1.026	944	1.970	3	3	6	2,92	3,18	3,05
17.	Cangkringan	897	869	1.766	2	1	3	2,23	1,15	1,70
Kab Sleman		29.038	27.254	56.292	48	33	81	1,65	1,21	1,44

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2024

Sinkronisasi dan koordinasi program antarinstansi dan antara pemerintah dan swasta dan lembaga swadaya yang melibatkan peran aktif masyarakat perlu ditingkatkan. Dengan memperhatikan beragamnya faktor penyebab kematian bayi, anak dan balita, kontribusi berbagai sektor dalam mendukung upaya mencapai derajat kesehatan anak sangat diperlukan. Kontribusi ini harus diformulasikan sebagai kebijakan kesehatan anak yang menyeluruh dengan strategi khusus di berbagai tingkat penyedia pelayanan dan sasaran.

4.2.1.4 Angka Kematian Ibu

Angka kematian maternal (*Maternal Mortality Rate = MMR*) menunjukkan jumlah ibu yang meninggal dalam proses melahirkan selama satu tahun terhadap jumlah ibu seluruhnya. Yang dimaksud jumlah ibu meninggal adalah selama dalam kehamilan dan atau dalam proses melahirkan. Ibu hamil yang meninggal karena kecelakaan, bunuh diri atau hal-hal yang lain yang tidak ada hubungannya dengan kehamilan dan proses melahirkan tidak dimasukkan dalam perhitungan ini. Oleh sebab itu ukuran ini dinyatakan per 100.000 ibu dan bukan per 1000 ibu karena jumlah kasus dalam setahun relatif kecil.

Menurut Sumantri dan Anwar (1995) kematian maternal merupakan kejadian yang jarang terjadi (Rare Event) maka dinyatakan per 100.000 ibu. Namun demikian banyak digunakan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan upaya peningkatan kesehatan, khususnya kesehatan ibu. Menurut WHO (1988) risiko kematian ibu selama hidupnya karena kehamilan atau persalinan adalah 1 per 14 sampai 1 per 50 untuk negara berkembang dibandingkan 1 per 4000 sampai 1 per 10000 di negara maju. Perbedaan angka kematian maternal antara negara maju dan negara sedang berkembang merupakan disparitas antar negara. Masalah-masalah yang menjadi penyebab angka kematian ibu menurut WHO, yaitu pendarahan postpartum (setelah melahirkan). Pendarahan secara berlebihan setelah melahirkan yang menyebabkan ibu kehilangan banyak darah. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar, penyebab yang kedua adalah hipertensi. Perawatan dan pemeriksaan prenatal bisa mendekripsi dan menangani masalah, seperti halnya tekanan darah tinggi dan protein dalam urine. Ibu tanpa perawatan yang tepat, akan berkembang menjadi preeklampsia yang menyebabkan kematian jika sudah terlampaui parah. Gangguan hipertensi menjadi salah satu penyebab tertinggi kematian ibu terkait dengan kehamilan. Penyebab yang ketiga

adalah infeksi. Wanita bisa mengalami infeksi akibat aborsi yang tidak aman, persalinan yang tidak sehat, ataupun persalinan yang sangat lama. Selain itu, kurangnya pemahaman dan informasi mengenai cara membersihkan area kewanitaan ataupun perawatan tubuh setelah melahirkan, dapat membuat ibu berisiko terkena infeksi. Jika infeksi ini tidak mendapat penanganan yang tepat maka kematian ibu bisa saja terjadi.

Tabel dibawah menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Sleman berjumlah 67 sampai 68 setiap 10.000 ibu yang melakukan persalinan. Beberapa kapanewon di Kabupaten Sleman tidak memiliki kasus angka kematian ibu karena melahirkan, namun kapanewon yang memiliki kasus kematian ibu terbaca per 1.000 ibu yang melakukan persalinan. Kapanewon Seyegan memiliki kasus 2 orang, sedangkan kapanewon Godean, Mlati, Kalasan, Sleman, Tempel dan Cangkringan memiliki kasus1 orang ibu yang mengalami kematian ibu karena melahirkan. Angka tersebut sangatlah rendah, namun tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan adalah *zero accident*.

Tabel 4. 25 Distribusi Angka Kematian Ibu menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Hidup			Jumlah Kematian Ibu				Angka Kematian Ibu
		L	P	Jumlah	Hamil	Bersalin	Nifas	Jumlah	
1.	Gamping	552	515	1.067	0	0	0	0	0,00
2.	Godean	483	403	886	0	1	0	1	112,87
3.	Moyudan	133	143	276	0	0	0	0	0,00
4.	Minggir	148	134	282	0	0	0	0	0,00
5.	Seyegan	245	218	463	0	1	1	2	431,97
6.	Mlati	552	521	1.073	1	0	0	1	93,20
7.	Depok	737	697	1.434	0	0	0	0	0,00
8.	Berbah	311	374	685	0	0	0	0	0,00
9.	Prambanan	346	324	670	0	0	0	0	0,00
10.	Kalasan	422	352	774	0	0	1	1	129,20
11.	Ngemplak	377	349	726	0	0	0	0	0,00
12.	Ngaglik	515	563	1.078	0	0	0	0	0,00
13.	Sleman	413	380	793	1	0	0	1	126,10
14.	Tempel	250	270	520	0	0	1	1	192,31
15.	Turi	210	182	392	0	0	0	0	0,00
16.	Pakem	191	170	361	0	0	0	0	0,00
17.	Cangkringan	164	157	321	0	0	1	1	311,53
Kab Sleman		6.049	5.752	11.801	2	2	4	8	67,79

Sumber: Dinas Kesehatan Sleman, 2024

Secara keseluruhan dalam penjabaran tentang angka kematian, dapat disimpulkan bahwa derajat kesehatan penduduk Kabupaten Sleman sangatlah baik. Upaya yang harus dilakukan adalah mempertahankan angka yang sudah terlalu rendah dan diusahakan mencapai titik nol. Visi Kemenkes adalah mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong akan terwujud dengan memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Memberdayakan masyarakat dan mengutamakan pembangunan kesehatan dan meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan.

4.2.1.5 Fertilitas

Fertilitas merupakan salah satu proses demografi yang akan mempengaruhi jumlah dan pertumbuhan penduduk. Menurut Shryock dan Siegel (1976) istilah fertilitas adalah sama dengan kelahiran hidup (*live birth*), yaitu bayi yang dilahirkan dengan tanda-tanda kehidupan, misalnya menangis, bergerak-gerak, dan jantung berdenyut. Bilamana pada saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan disebut dengan lahir mati (*still birth*). Dalam studi kependudukan lahir mati tidak dianggap atau tidak dihitung sebagai suatu peristiwa kelahiran. Dengan demikian, pengukuran fertilitas hanya didasarkan pada peristiwa lahir hidup dan lahir mati tidak diikutkan dalam perhitungan.

Pengukuran fertilitas lebih kompleks dari pada mortalitas, karena perempuan maupun laki-laki hanya akan meninggal satu kali saja, akan tetapi perempuan tersebut dapat melahirkan lebih dari satu kali. Risiko meninggal hanya sekali peristiwa terjadi pada hari atau waktu tertentu saja, yang telah meninggal tidak akan meninggal lagi. Sebaliknya seorang perempuan yang telah melahirkan seorang anak tidak berarti tidak ada risiko untuk melahirkan lagi. Kompleksitas pengukuran fertilitas karena melibatkan dua orang (suami-istri), sedangkan mortalitas hanya melibatkan satu orang yang meninggal.

Fertilitas dalam kajian ini dihitung berdasarkan data registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. Perhitungan fertilitas yang paling mendasar adalah angka kelahiran kasar. Berdasarkan tabel 4.28 berikut ini menunjukkan bahwa setiap 1000 penduduk di Kabupaten Sleman terdapat 10 sampai 11 kelahiran.

Angka kelahiran kasar (*Crude Birth Rate*) tertinggi di Kapanewon Prambanan, dan Godean. Rendahnya angka fertilitas ini juga terlihat dari angka kelahiran umum atau sering disebut dengan GFR (*Gross Fertility Rate*). GFR merupakan jumlah kelahiran per 1000 perempuan umur 15-49 tahun. Berdasarkan tabel parameter fertilitas terlihat bahwa setiap 1000 perempuan umur 15-49 tahun terdapat 36 kelahiran hidup. Distribusi GFR terendah ada di kapanewon Godean, Kalasan, Tempel dan Cangkringan dengan angka dibawah 30 .

Tabel 4. 26 Distribusi Parameter Kelahiran di Kabupaten Sleman Tahun 2024

Kapanewon	Jml Kelahiran	Jml Penduduk	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	jml kelahiran perempuan usia 15-49 tahun	jumlah perempuan usia 15-49 tahun	GFR
Gamping	1.067	97.408	10,95	1.101	25.165	43,75
Godean	886	72.604	12,20	461	18.150	25,40
Moyudan	276	33.981	8,12	272	8.046	33,81
Minggir	282	32.747	8,61	262	7.778	33,68
Seyegan	463	53.203	8,70	450	13.265	33,92
Mlati	1.073	96.088	11,17	1.047	24.656	42,46
Depok	1.434	127.111	11,28	1.034	33.017	31,32
Berbah	685	58.265	11,76	685	15.117	45,31
Prambanan	670	55.740	12,02	668	14.053	47,53
Kalasan	774	87.864	8,81	556	22.870	24,31
Ngemplak	726	66.774	10,87	772	17.120	45,09
Ngaglik	1.078	104.340	10,33	836	27.210	30,72
Sleman	793	72.965	10,87	776	18.546	41,84
Tempel	520	55.576	9,36	373	13.806	27,02
Turi	392	38.732	10,12	392	9.634	40,69
Pakem	361	39.568	9,12	341	9.780	34,87
Cangkringan	321	32.605	9,85	200	8.084	24,74
Kab Sleman	11.801	1.125.571	10,48	10.226	286.297,00	35,72

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Dinkes, 2024

Kebijakan pengaturan jumlah kelahiran penduduk dengan keluarga berencana telah dijalankan di DIY termasuk Kabupaten Sleman sudah dimulai sejak awal program KB digulirkan. Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori wilayah Jawa-Bali I yaitu sejak awal program KB sudah menjalankannya. Indonesia telah melakukan upaya pengendalian angka kelahiran melalui Program Keluarga Berencana (KB) sejak era 1970-an. Program KB telah berhasil menurunkan jumlah anak per satu perempuan hampir setengahnya dalam waktu yang relatif singkat. Program KB di Indonesia menjadi salah satu program family planning terbaik di dunia dan merupakan program perencanaan keluarga berbasis komunitas terbesar di dunia. Dampak positif program KB secara nyata telah dirasakan. Beberapa studi menunjukkan bahwa pelaksanaan program KB memberikan dampak positif pada tiga hal

pokok, yaitu: (1) Secara umum, meningkatkan investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia karena beban penduduk muda menjadi berkurang; (2) Secara khusus, meningkatkan kualitas hidup perempuan, keluarga dan masyarakat, dan (3) Meningkatkan produktivitas ekonomi yang tercermin dari peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Program KB secara tidak langsung juga telah berhasil memperbaiki tingkat kesehatan dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa).

Program KB sangat berdampak secara signifikan menurunkan tingkat fertilitas di Kabupaten Sleman. Berdasarkan Tabel 4.28 dapat diketahui tingkat fertilitas di Kabupaten Sleman sudah sangat rendah meskipun di beberapa kecamatan terdapat nilai diatas kabupaten. Tingkat fertilitas di Kabupaten Sleman juga berada pada titik yang sangat rendah sehingga upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mempertahankan nilai tersebut, dan seandainya memungkinkan ditingkatkan menjadi 2,1 untuk total fertilitasnya. Kebijakan mempertahankan nilai fertilitas lebih sulit dibandingkan dengan upaya menurunkannya karena fertilitas sangat dipengaruhi oleh faktor individu.

Mengacu pada dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2035 dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan dalam hal ini adalah kuantitas penduduk adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Untuk mencapai kondisi ini jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Indikator perncapaian penduduk tumbuh seimbang (PTS), adalah angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1 per perempuan atau Net Reproduction Rate (Angka Reproduksi Bersih=NRR) sebesar 1 per perempuan (Tukiran, 2010).

Tabel 4. 27 Rasio Anak dan Perempuan di Kabupaten Sleman Tahun 2024

Kapanewon	Jumlah Anak <5 Tahun	Jumlah Perempuan Tahun 15-49	Rasio Anak Perempuan (Child Woman Ratio (CWR))
Gamping	5384	25.165	21,39
Godean	3888	18.150	21,42
Moyudan	1682	8.046	20,90
Minggir	1616	7.778	20,78
Seyegan	3050	13.265	22,99
Mlati	5308	24.656	21,53
Depok	6996	33.017	21,19
Berbah	3268	15.117	21,62
Prambanan	3196	14.053	22,74
Kalasan	4969	22.870	21,73
Ngemplak	3911	17.120	22,84
Ngaglik	6032	27.210	22,17
Sleman	4076	18.546	21,98
Tempel	3076	13.806	22,28
Turi	2221	9.634	23,05
Pakem	2203	9.780	22,53
Cangkringan	1941	8.084	24,01
Kabupaten Sleman	62.817	286.297,00	21,94

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri, 2024

Ukuran fertilitas yang lain adalah rasio anak dengan jumlah perempuan 15-49 tahun. Berdasarkan tabel 4.29 di atas menunjukkan bahwa setiap 100 perempuan umur 15-49 tahun terdapat 21 atau 22 anak. Rasio anak dan perempuan umur 15-49 tahun terendah di Kapanewon Minggir yaitu sebesar 20,78.

Pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) merupakan harapan kondisi kependudukan setiap daerah baik pada level negara ataupun level yang lebih kecil. Kondisi tersebut ditandai dengan jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner dan kondisinya terus stabil seperti itu

(Iskandar, 1977; Swanson and Siegel, 2004; Tukiran, 2010). Capaian penduduk tumbuh seimbang juga ditandai dengan Rendahnya nilai TFR yang berada pada angka 2,1 dan NRR sebesar 1 (Tukiran, 2010). Dengan menggunakan indikator tersebut sebenarnya TFR dan NRR Kabupaten Sleman telah memenuhi target.

Kabupaten Sleman merupakan bagian dari DIY yang memiliki TFR yang sudah rendah. Meskipun demikian pada tahun 2035 Kabupaten Sleman tetap menargetkan TFR yang lebih rendah lagi yaitu sebesar 1,7. Salah satu aspek yang mendukung penurunan tersebut adalah adanya program keluarga berencana yang gencar diterapkan di Sleman. Seperti diketahui bahwa di negara-negara maju TFR yang rendah akan menciptakan kemajuan. Di negara maju TFR mencapai 1,5 per wanita atau bahkan nilai TFR nya lebih rendah dari 1 per wanita. Hal ini dikarenakan penduduk yang terus menurun akibat fertilitas yang sangat rendah akan mengakibatkan proporsi produktif sangat banyak. Dengan kondisi ini maka akan dapat tercipta bonus demografi (*demographic dividend*), yang muaranya adalah kondisi kesejahteraan akan terwujud.

4.2.1.6 Keluarga Berencana

Menurut Davis dan Blake (1956), ada 11 variabel yang termasuk dalam variabel antara (faktor langsung/intermediate variable) selain faktor tidak langsung (demografi, sosial, ekonomi, program, norma) yang mempengaruhi fertilitas, yaitu: umur pertama melakukan hubungan seksual, selibat permanen (tidak menikah), lamanya berstatus kawin, abstinensi sukarela, abstinensi terpaksa, frekuensi senggama, infekunditas sengaja, pemakaian kontrasepsi, infekunditas tidak disengaja dan mortalitas janin disengaja. Persepsi atau norma masyarakat tentang keluarga berencana sangat mempengaruhi keputusan pasangan suami isteri dalam memutuskan menggunakan kontrasepsi.

Salah satu parameter keluarga berencana yaitu kepesertaan KB atau disebut juga dengan prevalensi kontrasepsi. Berdasarkan tabel 4.30 terlihat bahwa prevalensi kontrasepsi di Kabupaten Sleman sebesar 62,79 persen yang berarti setiap 100 Pasangan Usia Subur (PUS) maka 63 diantaranya menggunakan salah satu metode kontrasepsi.

Metode kontrasepsi yang dimaksud adalah metode kontrasepsi modern baik yang
Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2024

bersifat jangka panjang maupun tidak. Kapanewon Mlati dibandingkan dengan kapanewon lain di Kabupaten Sleman memiliki angka prevalensi kontrasepsi terendah yaitu 48,81 persen. Namun tingkat fertilitas di kapanewon Mlati sudah sangat rendah sehingga seyogyanya kebijakan kependudukan tidak diarahkan pada peningkatan peserta KB aktif namun lebih pada peningkatan kualitas metode kontrasepsi yang digunakan seperti pada penggunaan metode kontrasepsi mantap. Kebijakan ini juga relevan untuk wilayah kapanewon lain yang sudah memiliki tingkat prevalensi kontrasepsi tinggi. Angka prevalensi tertinggi terdapat di kapanewon Gamping sebesar 74,30% dan Minggir sebesar 70,19%. Untuk semua kapanewon ratarata pencapaiannya 54% dari target yang ditetapkan sebanyak 85.748 dari jumlah Pasangan Usia Subur yang ada di kabupaten Sleman yaitu sejumlah 159.747.

Dari bermacam metode kontrasepsi meliputi metode jangka panjang dan jangka pendek, metode yang dominan dipilih PUS di kabupaten Sleman adalah sunti, yaitu 25,27 persen diikuti IUD 16,17 persen. Sedangkan metode yang penggunanya paling sedikit yaitu metode aminore laktasi (MAL) sejumlah 91 perempuan atau 0,06 persen.

Tabel 4.28 Parameter Keluarga Berencana menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024

KODE	KECAMATAN	TARGET	JUMLAH PUS	Metode Kontrasepsi										PERSEN TARGET (%)	PREVALENSI/CPR (%)
				SUNTIKAN	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	MAL	JUMLAH			
01	GAMPING	8.770	13.642	3.161	501	3.166	384	2.423	25	335	11	10.006	64%	74,30%	
02	GODEAN	5.459	9.955	2.677	354	1.343	211	1.478	16	270	12	6.361	55%	64,22%	
03	MOYUDAN	3.087	4.367	858	212	957	95	613	9	149	2	2.895	71%	66,87%	
04	MINGGIR	2.728	4.334	1.013	140	840	130	752	3	151	2	3.031	63%	70,19%	
05	SEYEGAN	3.714	7.594	2.492	232	547	232	1.037	13	181	19	4.753	49%	64,67%	
06	MLATI	6.790	13.068	2.622	354	735	231	2.016	27	226	12	6.223	52%	48,81%	
07	DEPOK	8.188	15.519	3.983	542	1.255	375	2.585	25	576	0	9.341	53%	60,20%	
08	BERBAH	4.048	9.113	2.343	387	589	126	1.387	8	232	1	5.073	44%	56,39%	
09	PRAMBANAN	4.443	8.405	2.491	368	558	562	1.324	6	237	2	5.548	53%	66,29%	
10	KALASAN	5.838	14.308	4.416	420	830	386	2.129	21	464	8	8.674	41%	60,97%	
11	NGEMPLAK	5.506	9.907	2.478	355	1.164	296	1.611	31	343	4	6.282	56%	64,57%	
12	NGAGLIK	7.807	14.658	3.481	482	1.737	401	2.220	33	389	3	8.746	53%	60,62%	
13	SLEMAN	5.509	10.148	1.876	333	1.297	262	1.980	33	401	5	6.187	54%	61,51%	
14	TEMPEL	5.322	8.361	2.099	347	975	236	1.480	28	283	2	5.450	64%	65,66%	
15	TURI	3.173	5.882	1.413	146	657	292	1.187	35	205	5	3.940	54%	67,72%	
16	PAKEM	3.127	5.398	1.291	151	553	268	960	12	175	2	3.412	58%	63,54%	
17	CANGKRINGAN	2.238	5.088	1.674	202	189	435	643	7	151	1	3.302	44%	65,19%	
JUMLAH TOTAL		85.748	159.747	40.368	5.526	17.392	4.922	25.825	332	4.768	91	99.224	54%	62,79%	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Sleman 2024

Melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) program keluarga berencana yang mengatur norma keluarga kecil bahagia sejahtera dapat tertanam di masyarakat. Pasangan Usia Subur (PUS) sadar akan arti penting melakukan pengaturan dan pengendalian kelahiran melalui pemakaian alat kontrasepsi. Sebagian besar pasangan usia subur secara sukarela memilih menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah dan mengatur kehamilan. Jenis alat kontrasepsi meliputi pil, suntik, implant, IUD, MOW, MOW dan implant.

Jika kenyamanan dan keamanan menjadi alasan PUS menggunakan pelayanan swasta, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas alat kontrasepsi yang diberikan pada masyarakat. Kusumaningrum (2009) menyatakan pengetahuan tentang alat kontrasepsi mempengaruhi pemilihan terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang akan digunakan. Angriani (2019) lebih lanjut menyatakan alasan pemilihan alat kontrasepsi adalah manfaat, kenyamanan, kemudahan, dan biaya.

Kekhawatiran kegagalan, efek samping suatu jenis alat kontrasepsi terhadap kesehatan, larangan dari pasangan atau suami, ketidaknyamanan, biaya yang harus dikeluarkan, tidak ingin repot, hingga pengalaman subjektif bahwa selama ini tanpa alat kontrasepsi pun tidak terjadi kehamilan menyebabkan pasangan usia subur tidak bersedia menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka tidak menginginkan kehamilan. Kondisi seperti inilah yang disebut dengan *unmet need* atau kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi. Unmet need dapat disebabkan karena ketersediaan alat kontrasepsi tidak sesuai dengan yang diinginkan sehingga masyarakat berkeinginan menggunakan alat kontrasepsi atau alat kontrasepsi tersedia namun masyarakat khawatir akan efek samping alat kontrasepsi.

"*Unmet Need*" atau kebutuhan KB yang tidak terpenuhi dapat digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh pelayanan program KB telah memenuhi keperluan mereka yang membutuhkan. Angka *unmet need* merupakan persentase wanita kawin yang sedang tidak memakai alat/cara KB dan tidak ingin punya anak lagi atau ingin menunda kelahiran berikutnya. Wanita yang memerlukan alat/cara KB untuk menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan alat/cara KB (*unmet need for spacing*) mencakup wanita hamil yang kandungannya tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*) pada waktu itu, wanita yang belum

mulai haid setelah melahirkan anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*) pada waktu itu, dan wanita yang tidak sedang hamil atau sudah mulai haid setelah melahirkan yang tidak menggunakan alat/cara KB dan ingin menunda kelahiran anak berikutnya dua tahun atau lebih. Wanita yang memerlukan KB untuk membatasi kelahiran (*unmet need for limiting*) mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan, wanita yang belum haid setelah melahirkan anak yang tidak diinginkan, dan wanita yang tidak hamil dan sudah mulai haid tetapi tidak memakai alat/cara KB namun tidak ingin anak lagi.

Terdapat tiga pendekatan dalam pengukuran kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi ini yaitu pendekatan istri, suami, dan pasangan. Pendekatan yang selama ini digunakan adalah pendekatan istri. Dalam konsep tersebut, perempuan menikah yang masih dalam usia subur, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi dikatakan terpenuhi kebutuhannya, padahal perempuan tersebut sudah tidak ingin mempunyai anak lagi, atau bermaksud mengatur jarak kelahiran. Dalam perkembangannya pendekatan yang digunakan untuk mengukur kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi adalah pendekatan suami pendekatan pasangan. Dalam konsep ini memandang kebutuhan kontrasepsi tidak terbatas pada perempuan saja, namun menyertakan persoalan penggunaan kontrasepsi pada laki-laki, dan pada pasangan usia subur. Pendekatan pasangan mengukur kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi pada keduanya, suami maupun istri.

Pasangan usia subur dengan kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi ini selanjutnya menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam suatu wilayah. Untuk itu, wilayah tersebut akan berusaha untuk menurunkan angka kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi ini. Upaya penurunan angka kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi ini merupakan strategi yang cocok sebagai upaya pencapaian program keluarga berencana. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang termasuk angka kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi di suatu daerah, maka angka kelahiran dengan kehamilan pada waktu yang tidak diinginkan di daerah tersebut dapat dipastikan menjadi tinggi. Sehingga menyebabkan tingginya angka aborsi, dan angka kematian ibu (Ashford, 2003).

Unmet need Kabupaten Sleman sebesar 12%. Jumlah paling tinggi ada di kapanewon Mlati yaitu sebesar 2.627 PUS atau 20,10 persen dari seluruh angka unmet need.

Dan terendah ada di kapanewon Moyudan, yaitu sebesar 208 PUS atau 4,76 persen dari jumlah unmet need yang ada di kabupaten Sleman.

Fenomena unmet need KB bersifat multidimensial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan. Secara umum, unmet need KB banyak terjadi pada perempuan yang menghadapi hambatan keuangan, pendidikan, geografis, dan sosial. Kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan menjadi penyebab tingginya *unmet need*, tetapi wilayah lain dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memadai juga memiliki tingkat *unmet need* yang tinggi. Faktor yang melatarbelakangi kedua hal tersebut jelas berbeda. Pendidikan dan kondisi ekonomi merupakan variabel penting untuk menjelaskannya. Salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping. Oleh sebab itu, gerakan meniadakan unmet need KB harus mempertimbangkan berbagai faktor tersebut. Setidaknya, akses tempat pelayanan KB harus menjangkau ke seluruh PUS sasaran dan kualitas pelayanannya harus sesuai dengan harapan masyarakat.

Hal penting lainnya yang tidak bisa diabaikan adalah memperkuat advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB. Kegiatan advokasi KIE KB yang melibatkan Penyuluhan KB dan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (PPKBD, Sub PPKBD, Pok KB dan KB KS) maupun kader kesehatan lainnya selain harus menjangkau seluruh unmet need KB, juga harus mampu menjawab berbagai kegalauan PUS yang belum ber-KB karena alasan agama, tradisi dan budaya. Termasuk mampu meyakinkan mereka bahwa menggunakan kontrasepsi modern itu sangat bermanfaat bagi keluarga dalam perencanaan masa depannya untuk mencapai keluarga berkualitas (bahagia dan sejahtera). Kader IMP sekarang ini mempunyai 6 peran dalam rangka ikut mensukseskan program KB, yang kemudian dikenal Istilah, "Enam Peran Bakti". Keenam peran bakti institusi tersebut adalah : Pengorganisasian, Pertemuan, KIE, dan Konseling, Pencatatan Pendataan, Pelayanan Kegiatan, dan Kemandirian. Dengan enam peran baktinya, kader IMP telah menjangkau seluruh aspek, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. IMP melakukan kegiatan penyuluhan, motivasi dan Konseling Program KB. Mendorong peningkatan kesertaan dalam ber KB yang semakin mandiri dan lestari. Dengan enam peran bakti yang dimainkan, dapat

diketahui bahwa IMP memiliki kedudukan yang strategis dalam pengembangan program KB di wilayahnya masing- masing.

Tabel 4.29 Unmet Need menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024

KODE	KAPANEWON	PUS	UNMET NEED			
			INGIN ANAK TUNDA	TIDAK INGIN ANAK LAGI	JUMLAH	%
1	GAMPING	13.642	169	653	822	6,03%
2	GODEAN	9.955	289	1.046	1.335	13,41%
3	MOYUDAN	4.367	56	152	208	4,76%
4	MINGGIR	4.334	45	98	143	3,30%
5	SEYEGAN	7.594	244	526	770	10,14%
6	MLATI	13.068	713	1.914	2.627	20,10%
7	DEPOK	15.519	92	921	1.013	6,53%
8	BERBAH	9.113	365	1.161	1.526	16,75%
9	PRAMBANAN	8.405	138	641	779	9,27%
10	KALASAN	14.308	452	1.803	2.255	15,76%
11	NGEMPLAK	9.907	258	754	1.012	10,21%
12	NGAGLIK	14.658	602	1.710	2.312	15,77%
13	SLEMAN	10.148	307	1.113	1.420	13,99%
14	TEMPEL	8.361	229	669	898	10,74%
15	TURI	5.882	131	562	693	11,78%
16	PAKEM	5.398	138	536	674	12,49%
17	CANGKRINGAN	5.088	165	520	685	13,46%
JUMLAH TOTAL		159.747	4.393	14.779	19.172	12%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Sleman 2024

4.2.1.7 Pernikahan, Talak, Rujuk

Perkawinan menurut Undang-Undang adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri, bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tabel 4.30 menjelaskan persoalan sosial yang perlu diperhatikan dalam masyarakat yakni perkawinan usia anak.

Undang-Undang Perkawinan baru dalam merevisi UUP tahun 1974 salah satunya tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Artinya pernikahan yang dilakukan dibawah umur 19 tahun masuk dalam kategori pernikahan anak, dan seandainya tetap diselenggarakan karena suatu hal harus melalui jalur dispensasi menikah yang disahkan oleh kantor pengadilan.

Data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman mencatat bahwa jumlah pernikahan dibawah umur masih dijumpai di Kabupaten Sleman dengan jumlah mencapai 38 laki2 dan 75 perempuan pada tahun 2024. dari total jumlah pernikahan tahun 2024, angka tersebut mencapai 2 persen. Jika kita lihat berdasarkan jenis kelamin, perkawinan usia anak jauh lebih tinggi pada mereka yang berjenis kelamin perempuan. Dibutuhkan peran pemerintah daerah baik pada tingkat propinsi, kabupaten, kapanewon dan kalurahan dalam menekan kasus perkawinan anak. Oleh karena itu, secara berjenjang hendaknya Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan perhatian dan merumuskan kebijakan yang jelas terkait penurunan atau penghilangan perkawinan usia anak.

Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab mensosialisasikan undang-undang pernikahan baru, namun lebih mengarahkan dampak negatif dari perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak berakibat pada buruknya kondisi perempuan yang menikah muda, seperti resiko terhadap kondisi kesehatannya sebagai dampak dari melahirkan pada usia dini, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk baik pada ibu maupun anak, dan seringkali juga mengakibatkan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Mereka umumnya mengalami kondisi yang buruk dibandingkan dengan perempuan yang menunda usia perkawinannya atau menikah sesuai dengan usia ideal. Ancaman- ancaman tersebut perlu selalu disampaikan kepada remaja agar melakukan perencanaan matang dalam menentukan biduk rumah tangga.

Tabel 4. 30 Distribusi Pernikahan Anak, Cerai, dan Rujuk menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Kapanewon	Jumlah Nikah	Kantor	Luar Kantor	NIKAH CAMPURAN		Jumlah Rujuk	Jumlah Isbat	DI BAWAH UMUR (19 Tahun)	
					Laki-laki	Wanita			Laki-laki	Wanita
1	Gamping	446	112	334	3	0	0	2	4	4
2	Godean	369	76	293	0	0	0	1	3	3
3	Moyudan	126	23	103	1	0	0	0	2	3
4	Minggir	145	39	106	1	0	0	0	2	2
5	Seyegan	239	74	165	0	0	0	1	1	0
6	Mlati	487	133	354	5	0	0	3	4	12
7	Depok	719	147	572	6	2	0	2	2	4
8	Berbah	258	81	177	1	0	0	1	1	2
9	Prambanan	327	116	211	1	0	0	0	0	4
10	Kalasan	489	120	369	1	0	0	0	1	6
11	Ngemplak	343	80	263	1	0	0	1	1	3
12	Ngaglik	459	107	352	5	1	0	2	2	5
13	Sleman	444	103	341	2	0	0	3	4	10
14	Tempel	283	82	201	0	0	0	0	6	6
15	Turi	214	54	160	0	0	0	1	2	3
16	Pakem	207	59	148	0	0	0	2	2	4
17	Cangkringan	145	52	93	1	0	0	0	1	4
	Kabupaten Sleman	5.700	1.458	4.242	28	3	0	19	38	75

Sumber: Kantor Kementerian Agama Sleman, 2024

4.2.2 Pendidikan

Investasi sumber daya manusia adalah sejumlah dana yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi. Investasi yang demikian disebut dengan *human capital*. Istilah modal manusia (*human capital*) ini dikenal sejak tiga puluh tahun lalu ketika Gary S. Becker, seorang penerima Nobel di bidang ekonomi membuat sebuah buku yang berjudul *Human*. Dalam ilmu ekonomi, pendidikan, baik formal dan informal, dianggap sebagai salah satu bentuk investasi mutu modal manusia selain kesehatan dan migrasi (Schultz, 1963; Todaro & Smith, 2007). Dengan pendidikan, produktivitas tenaga kerja diharapkan akan meningkat sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas tersebut dicerminkan oleh peningkatan pendapatan atau kesejahteraan individu yang melakukan investasi tersebut, sehingga ukuran keberhasilan atau manfaat dari investasi pendidikan adalah melalui peningkatan pendapatan seseorang, walaupun pendapatan yang berasal dari upah/gaji belum tentu merupakan suatu indikator peningkatan produktivitas (Mankiw, 2007). Pendidikan merupakan sebuah investasi sumber daya manusia yang tidak hanya menentukan kesuksesan seorang individu namun juga menentukan kemajuan suatu bangsa. Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi pendidikan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan tidak hanya menjadi salah satu isu di Indonesia tetapi juga menjadi salah satu isu yang disorot dunia. Oleh karena itu bidang ini menjadi satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs) tepatnya Tujuan ke-4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Bidang pendidikan juga menjadi salah satu arah utama pembangunan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. RPJMN 2020-2024 tersebut merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025. Pendidikan menjadi bagian dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu

membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Arah pembangunan SDM tersebut merupakan satu dari 7 agenda pembangunan yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Fokus utama pembangunan pendidikan pada RPJMN 2020- 2024 masih kepada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

Parameter yang dapat digunakan untuk mengukur derajat pendidikan suatu wilayah adalah angka partisipasi kasar atau sering disingkat dengan APK. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. Angka partisipasi kasar dapat melebihi 100 karena jumlah siswa jenjang pendidikan tertentu melebih jumlah penduduk pada jenjang pendidikan tersebut. APK di Kabupaten Sleman pada jenjang SD dan SMP memiliki angka di atas 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semua anak usia SD dan SMP sudah bersekolah bahkan terdapat anak yang belum berusia 7 tahun sudah bersekolah di SD.

Tabel 4. 32 Angka Partisipasi Kasar SD - SMP Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Kapanewon	Penduduk 7-12 Tahun *			Jumlah Peserta Didik SD/sederajat			APK SD (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	L+P
1	Gamping	4.295	4.075	8.370	4.328	3.980	8.308	100,77	97,67	99,26
2	Godean	3.100	2.965	6.065	3.123	3.008	6.131	100,74	101,45	101,09
3	Moyudan	1.348	1.203	2.551	1.269	1.161	2.430	94,14	96,51	95,26
4	Minggir	1.220	1.279	2.499	1.024	1.004	2.028	83,93	78,50	81,15
5	Seyegan	2.325	2.190	4.515	2.088	1.871	3.959	89,81	85,43	87,69
6	Mlati	4.205	3.931	8.136	3.935	3.831	7.766	93,58	97,46	95,45
7	Depok	5.508	5.363	10.871	6.384	6.200	12.584	115,90	115,61	115,76
8	Berbah	2.605	2.526	5.131	2.034	1.940	3.974	78,08	76,80	77,45
9	Prambanan	2.411	2.390	4.801	2.717	2.621	5.338	112,69	109,67	111,19
10	Kalasan	3.920	3.712	7.632	4.075	3.803	7.878	103,95	102,45	103,22
11	Ngemplak	3.026	2.926	5.952	2.744	2.580	5.324	90,68	88,17	89,45
12	Ngaglik	4.877	4.575	9.452	5.000	4.695	9.695	102,52	102,62	102,57
13	Sleman	3.261	3.168	6.429	3.636	3.580	7.216	111,50	113,01	112,24
14	Tempel	2.402	2.261	4.663	2.181	1.993	4.174	90,80	88,15	89,51
15	Turi	1.692	1.542	3.234	1.499	1.369	2.868	88,59	88,78	88,68
16	Pakem	1.737	1.641	3.378	1.873	1.813	3.686	107,83	110,48	109,12
17	Cangkringan	1.387	1.324	2.711	1.285	1.241	2.526	92,65	93,73	93,18
APK SD		49.319	47.071	96.390	49.195	46.690	95.885	99,75	99,19	99,48

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2024

Tabel 4. 33 Angka Partisipasi Murni SD Tepat Waktu Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Kapanewon	Penduduk 7-12 Tahun *				Jumlah Peserta Didik SD/sederajat Usia 7 - 12 Tahun **	Jumlah Peserta Didik Usia 7- 12 Tahun di SD/sederajat	APM SD (%)		
		L	P	Jumlah	Jumlah			L	P	L+P
1	Gamping	4.295	4.075	8.370	24	4.224	3.901	8.125	98,35	95,73
2	Godean	3.100	2.965	6.065	15	3.061	2.950	6.011	98,74	99,49
3	Moyudan	1.348	1.203	2.551	24	1.244	1.134	2.378	92,28	94,26
4	Minggir	1.220	1.279	2.499	26	994	979	1.973	81,48	76,54
5	Seyegan	2.325	2.190	4.515	11	2.037	1.839	3.876	87,61	83,97
6	Mlati	4.205	3.931	8.136	22	3.839	3.739	7.578	91,30	95,12
7	Depok	5.508	5.363	10.871	90	6.231	6.035	12.266	113,13	112,53
8	Berbah	2.605	2.526	5.131	33	1.984	1.910	3.894	76,16	75,61
9	Prambanan	2.411	2.390	4.801	32	2.650	2.568	5.218	109,91	107,45
10	Kalasan	3.920	3.712	7.632	29	3.977	3.733	7.710	101,45	100,57
11	Ngemplak	3.026	2.926	5.952	13	2.687	2.525	5.212	88,80	86,30
12	Ngaglik	4.877	4.575	9.452	68	4.885	4.575	9.460	100,16	100,00
13	Sleman	3.261	3.168	6.429	17	3.542	3.488	7.030	108,62	110,10
14	Tempel	2.402	2.261	4.663	47	2.101	1.941	4.042	87,47	85,85
15	Turi	1.692	1.542	3.234	18	1.473	1.339	2.812	87,06	86,84
16	Pakem	1.737	1.641	3.378	50	1.833	1.775	3.608	105,53	108,17
17	Cangkringan	1.387	1.324	2.711	14	1.258	1.217	2.475	90,70	91,92
APM SD		49.319	47.071	96.390	533	48.020	45.648	93.668	97,37	96,98
										97,18

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2024

Tabel 4. 34 Angka Partisipasi Kasar SMP Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Kapanewon/ Kecamatan	Penduduk 13-15 Tahun*			Jumlah Peserta Didik SMP/sederajat			APK SMP (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	L+P
1	Gamping	2.248	2.199	4.447	2.303	2.228	4.531	102,45	101,32	101,89
2	Godean	1.742	1.652	3.394	1.437	1.516	2.953	82,49	91,77	87,01
3	Moyudan	737	688	1.425	1.009	1.073	2.082	136,91	155,96	146,11
4	Minggir	717	721	1.438	726	684	1.410	101,26	94,87	98,05
5	Seyegan	1.213	1.218	2.431	884	775	1.659	72,88	63,63	68,24
6	Mlati	2.295	2.222	4.517	2.391	2.251	4.642	104,18	101,31	102,77
7	Depok	2.931	2.773	5.704	3.139	3.058	6.197	107,10	110,28	108,64
8	Berbah	1.429	1.285	2.714	914	942	1.856	63,96	73,31	68,39
9	Prambanan	1.437	1.272	2.709	2.085	2.026	4.111	145,09	159,28	151,75
10	Kalasan	2.093	2.073	4.166	1.843	1.787	3.630	88,06	86,20	87,13
11	Ngemplak	1.631	1.535	3.166	1.260	1.174	2.434	77,25	76,48	76,88
12	Ngaglik	2.522	2.307	4.829	2.559	2.617	5.176	101,47	113,44	107,19
13	Sleman	1.798	1.639	3.437	1.965	1.928	3.893	109,29	117,63	113,27
14	Tempel	1.338	1.274	2.612	1.361	1.233	2.594	101,72	96,78	99,31
15	Turi	895	894	1.789	1.030	881	1.911	115,08	98,55	106,82
16	Pakem	915	849	1.764	1.701	1.560	3.261	185,90	183,75	184,86
17	Cangkringan	742	784	1.526	432	485	917	58,22	61,86	60,09
	APK SMP	26.683	25.385	52.068	27.039	26.218	53.257	101,33	103,28	102,28

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2024

Tabel 4. 35 Angka Partisipasi Murni SMP Tepat Waktu Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Kapanewon/ Kecamatan	Penduduk 13-15 Tahun*	Jumlah Peserta Didik Usia 13-15 Tahun di SMP/sederajat			APM SMP (%)				
			L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P
1	Gamping	2.248	2.199	4.447	2.024	1.979	4.003	90,04	90,00	90,02
2	Godean	1.742	1.652	3.394	1.280	1.361	2.641	73,48	82,38	77,81
3	Moyudan	737	688	1.425	929	979	1.908	126,05	142,30	133,89
4	Minggir	717	721	1.438	643	600	1.243	89,68	83,22	86,44
5	Seyegan	1.213	1.218	2.431	740	668	1.408	61,01	54,84	57,92
6	Mlati	2.295	2.222	4.517	2.142	2.032	4.174	93,33	91,45	92,41
7	Depok	2.931	2.773	5.704	2.846	2.779	5.625	97,10	100,22	98,62
8	Berbah	1.429	1.285	2.714	800	817	1.617	55,98	63,58	59,58
9	Prambanan	1.437	1.272	2.709	1.920	1.876	3.796	133,61	147,48	140,13
10	Kalasan	2.093	2.073	4.166	1.654	1.614	3.268	79,03	77,86	78,44
11	Ngemplak	1.631	1.535	3.166	1.117	1.037	2.154	68,49	67,56	68,04
12	Ngaglik	2.522	2.307	4.829	2.229	2.273	4.502	88,38	98,53	93,23
13	Sleman	1.798	1.639	3.437	1.751	1.712	3.463	97,39	104,45	100,76
14	Tempel	1.338	1.274	2.612	1.205	1.092	2.297	90,06	85,71	87,94
15	Turi	895	894	1.789	905	762	1.667	101,12	85,23	93,18
16	Pakem	915	849	1.764	1.531	1.370	2.901	167,32	161,37	164,46
17	Cangkringan	742	784	1.526	367	417	784	49,46	53,19	51,38
APM SMP		26.683	25.385	52.068	24.083	23.368	47.451	90,26	92,05	91,13

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2024

Tabel 4. 36 Angka Partisipasi Kasar SMA Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Kapanewon/ Kecamatan	Penduduk 16-18 Tahun*			Jumlah Peserta Didik SMA/sederajat			APK SMA (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	L+P
1	Gamping	2.171	2.063	4.234	1.379	1.033	2.412	63,52	50,07	56,97
2	Godean	1.640	1.483	3.123	654	2.596	3.250	39,88	175,05	104,07
3	Moyudan	731	682	1.413	915	516	1.431	125,17	75,66	101,27
4	Minggir	687	674	1.361	224	337	561	32,61	50,00	41,22
5	Seyegan	1.197	1.115	2.312	2.095	858	2.953	175,02	76,95	127,72
6	Mlati	2.148	2.031	4.179	1.227	1.709	2.936	57,12	84,15	70,26
7	Depok	2.889	2.725	5.614	5.435	4.483	9.918	188,13	164,51	176,67
8	Berbah	1.289	1.287	2.576	931	697	1.628	72,23	54,16	63,20
9	Prambanan	1.236	1.252	2.488	2.214	1.647	3.861	179,13	131,55	155,18
10	Kalasan	2.098	1.870	3.968	1.016	1.374	2.390	48,43	73,48	60,23
11	Ngemplak	1.533	1.425	2.958	455	448	903	29,68	31,44	30,53
12	Ngaglik	2.329	2.200	4.529	1.782	1.976	3.758	76,51	89,82	82,98
13	Sleman	1.669	1.599	3.268	1.632	1.529	3.161	97,78	95,62	96,73
14	Tempel	1.271	1.200	2.471	1.158	1.813	2.971	91,11	151,08	120,23
15	Turi	833	819	1.652	443	572	1.015	53,18	69,84	61,44
16	Pakem	846	817	1.663	1.552	981	2.533	183,45	120,07	152,32
17	Cangkringan	763	707	1.470	1.332	916	2.248	174,57	129,56	152,93
APK SMA		25.330	23.949	49.279	24.444	23.485	47.929	96,50	98,06	97,26

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2024

Tabel 4. 37 Angka Partisipasi Murni SMA Tepat Waktu Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Kapanewon/ Kecamatan Penduduk 16-18 Tahun*			Jumlah Peserta Didik Usia 16-18 Tahun di SMA/sederajat			APM SMA (%)			
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	L+P
1	Gamping	2.171	2.063	4.234	1.069	802	1.871	49,24	38,88	44,19
2	Godean	1.640	1.483	3.123	554	2.220	2.774	33,78	149,70	88,82
3	Moyudan	731	682	1.413	744	419	1.163	101,78	61,44	82,31
4	Minggir	687	674	1.361	191	263	454	27,80	39,02	33,36
5	Seyegan	1.197	1.115	2.312	1.751	724	2.475	146,28	64,93	107,05
6	Mlati	2.148	2.031	4.179	951	1.402	2.353	44,27	69,03	56,31
7	Depok	2.889	2.725	5.614	4.386	3.638	8.024	151,82	133,50	142,93
8	Berbah	1.289	1.287	2.576	697	570	1.267	54,07	44,29	49,18
9	Prambanan	1.236	1.252	2.488	1.783	1.353	3.136	144,26	108,07	126,05
10	Kalasan	2.098	1.870	3.968	830	1.145	1.975	39,56	61,23	49,77
11	Ngemplak	1.533	1.425	2.958	322	344	666	21,00	24,14	22,52
12	Ngaglik	2.329	2.200	4.529	1.427	1.568	2.995	61,27	71,27	66,13
13	Sleman	1.669	1.599	3.268	1.292	1.233	2.525	77,41	77,11	77,26
14	Tempel	1.271	1.200	2.471	958	1.517	2.475	75,37	126,42	100,16
15	Turi	833	819	1.652	343	465	808	41,18	56,78	48,91
16	Pakem	846	817	1.663	1.254	768	2.022	148,23	94,00	121,59
17	Cangkringan	763	707	1.470	1.093	761	1.854	143,25	107,64	126,12
	APM SMA	25.330	23.949	49.279	19.645	19.192	38.837	77,56	80,14	78,81

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2024

Tabel 4. 38 Angka Partisipasi Sekolah 7 – 12 tahun Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Uraian	Penduduk 7-12 Tahun*			Jumlah Peserta Didik SD/sederajat			APK SD/sederajat (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	L+P
1	Negeri	49.319	47.071	96.390	28.173	27.238	55.411	57,12	57,87	57,49
2	Swasta	49.319	47.071	96.390	21.022	19.452	40.474	42,62	41,32	41,99
	Jumlah	49.319	47.071	96.390	49.195	46.690	95.885	99,75	99,19	99,48

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2024

Tabel 4. 39 Angka Partisipasi Sekolah 13 – 15 tahun Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Uraian	Penduduk 13-15 Tahun*			Jumlah Peserta Didik SMP/sederajat			APK SMP/sederajat (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	L+P
1	Negeri	26.683	25.385	52.068	13.742	15.206	28.948	51,50	59,90	55,60
2	Swasta	26.683	25.385	52.068	13.297	11.012	24.309	49,83	43,38	46,69
	Jumlah	26.683	25.385	52.068	27.039	26.218	53.257	101,33	103,28	102,28

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2024

Tabel 4. 40 Angka Partisipasi Sekolah 16 – 18 tahun Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Uraian	Penduduk 16-18 Tahun*			Jumlah Peserta Didik SMA/sederajat			APK SMA/sederajat (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	L+P
1	Negeri	25.330	23.949	49.279	10.039	13.642	23.681	20,37	27,68	48,05
2	Swasta	25.330	23.949	49.279	14.405	9.843	24.248	29,23	19,97	49,21
	APK SMA	25.330	23.949	49.279	24.444	23.485	47.929	49,60	47,66	97,26

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa APK pada jenjang pendidikan SD mencapai angka 99,48 persen yang menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia 7-12 tahun yang saat ini belum bersekolah. Kondisi ini bisa terjadi karena terkadang orang tua memasukkan anaknya ke jenjang sekolah dasar lebih dari 7 tahun karena memang batasan ideal anak disekolahkan

kalua anak tersebut minimal berusia 7 tahun. Jika diperbandingkan antara anak laki-laki dengan perempuan, terlihat bahwa anak laki- laki memiliki APK sedikit lebih tinggi dibandingkan anak perempuan dengan persentase masing-masing sebesar 99,75 persen dibandingkan 99,19 persen.

Kondisi pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan pertama sedikit lebih baik. Secara umum penduduk umur 13-15 tahun di Kabupaten Sleman telah menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan pertama. Kondisi ini terjadi baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian untuk Kapanewon Godean, Minggir, Seyegan, Berbah, Kalasan, Ngemplak, Tempel dan Cangkringan angka partisipasi kasar SMP belum mencapai 100.

Data diatas menunjukkan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Sleman, utamanya yang terjadi di beberapa kecamatan perlu mendapatkan perhatian. Sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama merupakan pendidikan dasar yang seharusnya terentaskan untuk Yogyakarta yang memiliki predikat sebagai Kota Pelajar. Amanah pendidikan telah dicanangkan sejak tahun 1994 dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan pada tahun 2006 tekad tersebut diperkuat dengan diterbitkan Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menyatakan bahwa pendidikan termasuk dalam urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Berdasarkan PP tersebut maka Pendidikan termasuk urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar.

Faktor ekonomi rumah tangga masih memiliki peran penting dalam menentukan tingkat pendidikan seseorang. Mengingat bahwa di Indonesia, pendidikan 'gratis' yang sebenarnya belum dapat terlaksana. Walaupun biaya di beberapa jenjang pendidikan sudah mulai ditiadakan, tapi kenyataannya pendidikan memang membutuhkan biaya ekstra seperti biaya untuk seragam, buku pelajaran, perlengkapan alat tulis dan berbagai penunjang lain. Biaya tersebut turut berpengaruh terhadap kesempatan mengenyam pendidikan anggota Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2024

rumah tangga. Ketika perekonomian rumah tangga tersendat, seringkali kebutuhan pendidikan bukan lagi menjadi prioritas. Apalagi ketika biaya kebutuhan sehari-hari meningkat, rumah tangga dengan ekonomi rendah akan semakin sulit memenuhi biaya pendidikan anggota rumah tangganya. Tinggi rendahnya status ekonomi rumah tangga dapat berpengaruh pada proses pendidikan seseorang.

Bappenas (2009) menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka partisipasi kasar adalah kemiskinan. Pengaruh kemiskinan terhadap APK adalah negatif, artinya semakin penduduk terjebak dalam kemiskinan maka angka partisipasi kasarnya rendah. Kemiskinan menyebabkan beberapa anak tidak mampu mengakses sekolah karena tidak memiliki waktu cukup untuk belajar karena tekanan ekonomi. Biaya pendidikan dasar dengan adanya regulasi Wajar 9 tahun menjadi tanggung jawab pemerintah atau tidak berbayar. Aksesibilitas fasilitas pendidikan bisa juga dipengaruhi oleh derajat kesehatan anak sehingga mereka tidak memungkinkan untuk sekolah. Beberapa faktor ini harus diurai satu persatu sehingga akan terumuskan kebijakan pendidikan yang tepat.

Untuk angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun antara orientasi sekolah negeri dan swasta relatif berimbang, dengan prosentase negeri 57,49 persen dan swasta 41,99 persen. Artinya ada peningkatan kualitas yang relatif setara antara sekolah dasar negeri dan swasta. Sedangkan untuk usia 13-15 tahun orientasi sekolah negeri lebih lebar terhadap swasta, dengan angka 55,60 persen untuk negeri dan 46,69 untuk sekolah swasta. Dan untuk sekolah menengah atas, orientasi kembali berimbang dan lebih besar swasta, dengan angka negeri sejumlah 48,05 persen dan swasta 49,21 persen. Hal ini menunjukkan keberimbangan kualitas sekolah antara negeri dan swasta yang ada di kabupaten Sleman.

4.2.3 Ekonomi

Salah satu indicator penting dalam melihat kondisi ekonomi sebuah wilayah adalah dengan melihat data ketenagakerjaan. Dinamika kependudukan di Kabupaten Sleman dilihat dari sisi ketenagakerjaan, pada umumnya adalah tentang perkembangan dari angkatan kerja yang dianggap sebagai sisi penawaran atau penyediaan tenaga kerja, dan perkembangan kesempatan kerja sebagai sisi kebutuhan tenaga kerja. Banyak faktor yang dapat

mempengaruhi perubahan kedua hal tersebut. Salah satunya adalah perubahan struktur penduduk, yang dalam hal ini ada kaitannya dengan perubahan-perubahan kelahiran, kematian, dan migrasi. Perubahan ketiga komponen tersebut di Kabupaten Sleman telah mengakibatkan rendahnya pertumbuhan penduduk, meskipun secara absolut jumlah penduduk cenderung meningkat. Kecenderungan pertumbuhan penduduk yang semakin rendah, tentunya akan mengakibatkan pula persediaan tenaga kerja yang berkurang. Namun karena jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Sleman masih cukup besar, maka pertumbuhan penduduk rendah yang terjadi belum dapat mempengaruhi berkurangnya jumlah angkatan kerja, ini berarti pertumbuhan angkatan kerja juga relatif masih tinggi.

Permasalahan yang masih ada dan cukup penting untuk diselesaikan dari sisi ketenagakerjaan adalah pertumbuhan angkatan kerja yang relatif masih tinggi tidak diimbangi dengan tingginya pertumbuhan kesempatan kerja. Sebenarnya kondisi penduduk usia produktif yang masih cukup besar di Kabupaten Sleman tidak akan menimbulkan masalah, seandainya daerah ini dapat memperluas dan menyediakan kesempatan kerja. Dengan demikian yang menjadi masalah adalah bagaimana agar persediaan tenaga kerja dapat seimbang dengan kebutuhan tenaga kerja.

Sumber daya manusia atau juga sering disebut sebagai *human capital* memiliki dua peran baik sebagai tujuan pembangunan maupun sebagai input pembangunan. Sebagai input pembangunan, kualitas tenaga kerja menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja menjadi faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas-aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia atau tenaga kerja juga menjadi salah satu fokus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY tahun 2020. Tujuannya adalah penyiapan dan ketersediaan SDM atau tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing yang dapat memenuhi permintaan dunia usaha baik di tingkat lokal, nasional hingga pasar global dapat mendukung ketercapaian program pembangunan di pusat maupun di daerah. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara sinergis oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya melalui pendidikan, latihan dan pemagangan. Menurut ILO (*International Labor Organization*) membagi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja

dibagi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang tidak bekerja inilah yang disebut pengangguran terbuka.

Tabel 4. 41 Data Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, dan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Wilayah	Tidak Bekerja	Bekerja	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	JML	Angka Partisipasi Angkatan Kerja
1	GAMPING	25.638	43.166	68.804	28.604	97.408	70,63
2	GODEAN	17.877	32.705	50.582	22.022	72.604	69,67
3	MOYUDAN	7.516	15.397	22.913	11.068	33.981	67,43
4	MINGGIR	6.813	15.370	22.183	10.564	32.747	67,74
5	SEYEGAN	13.733	23.153	36.886	16.317	53.203	69,33
6	MLATI	26.594	41.090	67.684	28.404	96.088	70,44
7	DEPOK	35.356	54.156	89.512	37.599	127.111	70,42
8	BERBAH	15.271	25.902	41.173	17.092	58.265	70,67
9	PRAMBANAN	10.663	27.661	38.324	17.416	55.740	68,75
10	KALASAN	24.263	37.868	62.131	25.733	87.864	70,71
11	NGEMPLAK	17.305	28.936	46.241	20.533	66.774	69,25
12	NGAGLIK	28.496	44.246	72.742	31.598	104.340	69,72
13	SLEMAN	19.195	31.800	50.995	21.970	72.965	69,89
14	TEMPEL	14.341	24.466	38.807	16.769	55.576	69,83
15	TURI	8.648	18.408	27.056	11.676	38.732	69,85
16	PAKEM	9.913	17.537	27.450	12.118	39.568	69,37
17	CANGKRINGAN	6.123	16.251	22.374	10.231	32.605	68,62
JUMLAH	SLEMAN	287.745	498.112	785.857	339.714	1.125.571	69,82

Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja rerata di kabupaten Sleman sebesar 69,82% dan tersebar hampir merata jumlahnya di tiap kapanewon dengan selisih sangat kecil. TPAK terbesar ada di kapanewon Kalasan dengan jumlah 70,71% dan terkecil ada di kapanewon Moyudan sebesar 67,43%. Di Indonesia rerata TPAK sebesar 69,80%. Sehingga kondisi di kabupaten Sleman sedikit banyak menggambarkan kondisi keseluruhan di Indonesia.

Tabel 4. 42 Data Angkatan Kerja Kabupaten Sleman Tahun 2024

Kapanewon	Jumlah Penduduk Tahun 2024			Angkatan Kerja									Jumlah Angkatan Kerja		
				Penganggur			Bekerja								
	L P Jumlah			L P Jumlah			L P Jumlah			L P Jumlah			L P Jumlah		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Gamping	48.361	49.047	97.408	652	653	1.305	6.409	6.757	13.166	20.805	17.172	37.977	27.866	24.582	52.448
Godean	36.134	36.470	72.604	1.429	1.295	2.724	5.927	6.747	12.674	12.272	9.652	21.924	19.628	17.694	37.322
Moyudan	16.862	17.119	33.981	452	300	752	3.115	2.367	5.482	7.902	7.501	15.403	11.469	10.168	21.637
Minggir	15.979	16.768	32.747	411	320	731	3.175	3.243	6.418	7.015	5.260	12.275	10.601	8.823	19.424
Seyegan	26.438	26.765	53.203	1.255	967	2.222	3.431	4.716	8.147	12.209	9.708	21.917	16.895	15.391	32.286
Mlati	47.854	48.234	96.088	1.350	1.317	2.667	5.438	7.069	12.507	24.382	16.449	40.831	31.170	24.835	56.005
Depok	62.625	64.486	127.111	1.011	1.200	2.211	11.591	11.434	23.025	28.807	28.603	57.410	41.409	41.237	82.646
Berbah	28.840	29.425	58.265	1.616	957	2.573	5.570	4.335	9.905	10.019	8.003	18.022	17.205	13.295	30.500
Prambanan	27.520	28.220	55.740	1.027	887	1.914	5.065	4.135	9.200	11.302	9.533	20.835	17.394	14.555	31.949
Kalasan	43.545	44.319	87.864	883	582	1.465	13.878	15.790	29.668	14.662	11.987	26.649	29.423	28.359	57.782
Ngemplak	33.099	33.675	66.774	623	676	1.299	6.143	7.193	13.336	10.547	8.783	19.330	17.313	16.652	33.965
Ngaglik	51.537	52.803	104.340	962	935	1.897	11.465	11.192	22.657	19.191	16.513	35.704	31.618	28.640	60.258
Sleman	36.159	36.806	72.965	1.148	1.338	2.486	5.503	6.445	11.948	14.521	13.187	27.708	21.172	20.970	42.142
Tempel	27.501	28.075	55.576	722	482	1.204	5.335	5.023	10.358	10.179	9.856	20.035	16.236	15.361	31.597
Turi	19.354	19.378	38.732	182	166	348	3.345	3.201	6.546	7.517	7.216	14.733	11.044	10.583	21.627
Pakem	19.503	20.065	39.568	177	172	349	3.961	3.094	7.055	8.233	6.733	14.966	12.371	9.999	22.370
Cangkringan	16.125	16.480	32.605	655	657	1.312	2.516	1.956	4.472	5.049	3.256	8.305	8.220	5.869	14.089
KAB SLEMAN	557.436	568.135	1.125.571	14.555	12.904	27.459	101.867	104.697	206.564	224.612	189.412	414.024	341.034	307.013	648.047

Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, dan Dinas Tenaga Kerja 2024)

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sleman sebesar 69,82 persen meliputi kelompok bekerja sebanyak 498.112 jiwa atau 63,38 persen dari Angkatan kerja dan tidak bekerja sebanyak 287.745 atau 36,62 persen dari Angkatan kerja. Artinya dari 100 angkatan kerja yang ada di Kabupaten Sleman terdapat 36,62 persen angkatan kerja yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Hal ini mencerminkan orientasi penduduk usia kerja yang selektif dalam memilih pekerjaan atau turunnya penyerapan angkatan kerja dalam dunia kerja. Atau keterlambatan penduduk dalam mengupdate data pekerjaan dalam data keluarga.

Ukuran ketenagakerjaan lain adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK atau Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) atau *Labour Force Participation Rate* adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja (AK) terhadap penduduk usia kerja (PUK) dinyatakan dalam persen. TPAK dapat digunakan untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Dalam penjelasan berikutnya di tabel 4.44 yang bersumberkan Dinas Tenaga Kerja adalah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yaitu sebesar 206.564 jiwa atau merinci jumlah penganggur di kabupaten Sleman sebesar 27.459 atau 4,42 persen dari jumlah Angkatan kerja yang bekerja. Artinya ada orientasi jenis pekerjaan untuk penduduk kabupaten Sleman, dimana jumlah jam kerja tidak lagi menjadi ukuran pekerjaan yang diinginkan. Banyak penduduk yang berstatus bekerja freelance atau paruh waktu namun dengan penghasilan yang sesuai dengan harapan. Deskripsi ini akan lebih lengkap jika disandingkan dengan jumlah pendapatan penduduk di kabupaten Sleman. Sementara untuk sektor pekerjaan dengan jam kerja panjang/ lebih dari 35 jam per minggu menjad orientasi bagi sebagian penduduk dengan jumlah 66,76 persen dari seluruh Angkatan kerja yang bekerja.

Tabel 4. 42 Data Jenis Pekerjaan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2024

NO.	PEKERJAAN	LAKI-LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)	%
KABUPATEN SLEMAN		557.436	568.135	1.125.571	100
1	TIDAK/BELUM BEKERJA	96.683	88.910	185.593	16,49
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	64	179.192	179.256	15,93
3	PELAJAR/MAHASISWA	118.606	112.855	231.461	20,56
4	PENSIUNAN	19.701	9.760	29.461	2,62
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	12.382	12.128	24.510	2,18
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	3.630	133	3.763	0,33
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	4.053	343	4.396	0,39
8	PERDAGANGAN	2.174	2.809	4.983	0,44
9	PETANI/PEKEBUN	17.540	12.555	30.095	2,67
10	PETERNAK	363	57	420	0,04
11	NELAYAN/PERIKANAN	45	1	46	0,00
12	INDUSTRI	134	72	206	0,02
13	KONSTRUKSI	241	9	250	0,02
14	TRANSPORTASI	308	6	314	0,03
15	KARYAWAN SWASTA	99.539	63.195	162.734	14,46
16	KARYAWAN BUMN	3.198	1.429	4.627	0,41
17	KARYAWAN BUMD	388	225	613	0,05
18	KARYAWAN HONORER	1.897	1.809	3.706	0,33
19	BURUH HARIAN LEPAS	90.829	24.962	115.791	10,29
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	15.543	9.567	25.110	2,23
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	45	8	53	0,00
22	BURUH PETERNAKAN	149	53	202	0,02
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	4	705	709	0,06
24	TUKANG CUKUR	106	5	111	15,66
25	TUKANG LISTRIK	116	-	116	0,01
26	TUKANG BATU	1.547	1	1.548	0,14
27	TUKANG KAYU	649	1	650	0,06
28	TUKANG SOL SEPATU	23	-	23	0,00
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	220	1	221	0,02
30	TUKANG JAHIT	242	845	1.087	0,10
31	TUKANG GIGI	10	-	10	0,00
32	PENATA RIAS	9	177	186	0,02
33	PENATA BUSANA	1	31	32	0,00
34	PENATA RAMBUT	19	93	112	0,01
35	MEKANIK	884	4	888	0,08

36	SENIMAN	596	125	721	0,06
37	TABIB	14	2	16	0,00
38	PARAJI	11	3	14	0,00
39	PERANCANG BUSANA	4	36	40	0,00
40	PENTERJEMAH	38	35	73	0,01
41	IMAM MASJID	12	-	12	0,00
42	PENDETA	131	43	174	0,02
43	PASTOR	160	-	160	0,01
44	WARTAWAN	195	47	242	0,02
45	USTADZ/MUBALIGH	150	23	173	0,02
46	JURU MASAK	59	38	97	0,01
47	PROMOTOR ACARA	2	-	2	0,00
48	ANGGOTA DPR RI	-	1	1	0,00
49	ANGGOTA DPD RI	1	-	1	0,00
50	ANGGOTA BPK	2	-	2	0,00
51	PRESIDEN	-	-	-	0,00
52	WAKIL PRESIDEN	-	-	-	0,00
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	2	-	2	0,00
54	ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	4	-	4	0,00
55	DUTA BESAR	-	1	1	0,00
56	GUBERNUR	-	-	-	0,00
57	WAKIL GUBERNUR	-	-	-	0,00
58	BUPATI	-	1	1	0,00
59	WAKIL BUPATI	1	-	1	0,00
60	WALIKOTA	-	-	-	0,00
61	WAKIL WALIKOTA	-	-	-	0,00
62	ANGGOTA DPRD PROP.	8	-	8	0,00
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	20	8	28	0,00
64	DOSEN	2.818	2.169	4.987	0,44
65	GURU	2.897	7.897	10.794	0,96
66	PILOT	22	-	22	0,00
67	PENGACARA	208	42	250	0,02
68	NOTARIS	65	115	180	0,02
69	ARSITEK	291	76	367	0,03
70	AKUNTAN	16	19	35	0,00
71	KONSULTAN	211	73	284	0,03
72	DOKTER	921	1.545	2.466	0,22
73	BIDAN	-	660	660	0,06
74	PERAWAT	307	1.690	1.997	0,18
75	APOTEKER	65	416	481	0,04
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	11	104	115	0,01

77	PENYIAR TELEVISI	3	3	6	0,00
78	PENYIAR RADIO	10	10	20	0,00
79	PELAUT	192	3	195	0,02
80	PENELITI	92	54	146	0,01
81	SOPIR	2.366	5	2.371	0,21
82	PIALANG	2	4	6	0,00
83	PARANORMAL	3	-	3	0,00
84	PEDAGANG	3.523	6.080	9.603	0,85
85	PERANGKAT DESA	1.625	279	1.904	0,17
86	KEPALA DESA	76	5	81	0,01
87	BIARAWAN/BIARAWATI	5	124	129	0,01
88	WIRASWASTA	48.615	24.198	72.813	6,47
89	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN	236	181	417	0,04
90	ARTIS	8	4	12	0,00
91	ATLIT	29	2	31	0,00
92	CHEFF	-	-	-	0,00
93	MANAJER	1	-	1	0,00
94	TENAGA TATA USAHA	1	-	1	0,00
95	OPERATOR	1	-	1	0,00
96	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	-	1	1	0,00
97	TEKNISI	3	1	4	0,00
98	ASISTEN AHLI	1	-	1	0,00
99	PEKERJAAN LAINNYA	60	71	131	0,01

Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2024)

4.2.4 Sosial

4.2.4.1 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pelaksanaan urusan sosial Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini diarahkan salah satunya pada upaya mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin Hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, ruhani dan sosial) secara memadai dan wajar. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat memang menjadi salah satu permasalahan yang perlu ditangani secara serius. Hambatan sosial berupa keterlantaran, Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2024

kecacatan, kemiskinan, bencana dan lain sebagainya menjadi salah satu penyebab yang membuat seseorang atau sekelompok orang mengalami disfungsi terhadap fungsi sosialnya di masyarakat. Di Kabupaten Sleman setidaknya terdapat 19 kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman menunjukkan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 masih cukup banyak, yaitu sebanyak 20.730 yang terdiri dari anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan hukum, anak jalanan, anak dengan kecacatan, penyandang disabilitas, tuna susila, lansia terlantar, gelandangan, pengemis, pemulung, bekas warga binaan pemasyarakatan, pekerja migran bermasalah sosial, anak korban tindak kekerasan, keluarga bermasalah sosial psikologis, korban tindak kekerasan, perempuan rawan sosial ekonomi, korban penyalahgunaan NAPZA dan kelompok minoritas. Kategori yang paling banyak adalah lansia terlantar (LUT) dengan jumlah 7.345 (35,43 persen), penyandang disabilitas dengan jumlah 6.261 jiwa (30,2 persen) dan perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) dengan jumlah 3.034 jiwa (7,95 persen). Untuk lebih jelasnya seperti yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4. 44 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024

	Anak Balita Terlantar	Anak Dengan Kedisabilitasana	Anak Jalanan	Anak Korban Tindak Kekerasan	Anak Terlantar	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	Gelandangan	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Korban Penyalahgunaan	Korban Tindak Kekerasan	Lanjut Usia Terlantar	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Pemulung	Pengemis	Penyandang Disabilitas	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Tuna Susila	TOTAL
Gamping	3	47			62			25		2	407	19	13		538	106		1.222
Godean	3	59			86	5		85		3	690	5	8	1	559	132		1.636
Moyudan	4	33			126		1	13			310	1	2		252	97		839
Minggir	2	25			47		1	28		2	227	3	2		344	66		747
Seyegan	4	41		1	104	3		53		1	548	1	6		352	119	1	1.234
Mlati	3	41	1	1	87	7		27		25	528	2	6	1	409	81	5	1.224
Depok		57			11	7		6		1	172		2		446	57		759
Berbah	3	41			100			76		2	401	1	7	1	313	105		1.050
Prambanan		36		1	18		1	13		2	349	1	1	1	193	62		678
Kalasan	6	68			139	2	1	92		3	623	2	3		441	121		1.501
Ngemplak		37			77			1		5	447		2		500	144		1.213
Ngaglik	6	34			88	8		57		1	302	5	3		280	130		914
Sleman	7	33		1	107	12	2	66	1	12	508	2	18	1	353	126	1	1.250
Tempel	3	38			82	1	3	90		5	528	3	3	3	488	216	6	1.469
Turi	5	55			111			12			418	3	2		275	79		960
Pakem		33			19			30		17	230		4		342	48	1	724
Cangkringan	2	40	3	4	127	7		119		3	404		1		268	130		1.104
	51	718	4	4	1.391	52	9	793	1	84	7.092	48	83	8	6.353	1.819	14	18.524

Sumber: Dinas Sosial, 2024

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Adapun kriteria lanjut usia terlantar adalah : Tidak ada keluarga yang mengurusnya, Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya, Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, Menderita minimal 1 (satu) jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya, serta Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin. Untuk Lanjut Usia Terlantar terbagi menjadi 2 kriteria yaitu: LUT Potensial : lanjut usia terlantar yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa, serta LUT Tidak Potensial : lanjut usia terlantar yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.

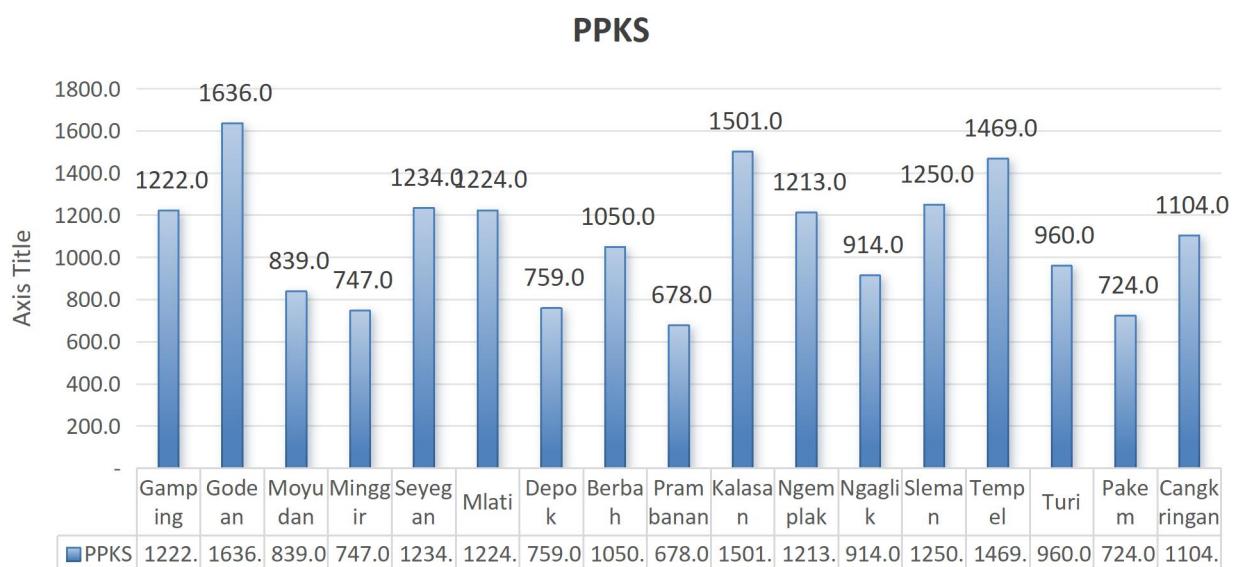
Data dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman mencatat bahwa jumlah lansia terlantar tertinggi ada di Kapanewon Godean dengan jumlah 690 jiwa, Seyegan 548 jiwa dan Mlati serta Tempel sejumlah 528 jiwa. Sedangkan kapanewon dengan jumlah lansia terlantar paling sedikit ada di Depok (172 jiwa), serta Pakem (230 jiwa). Jika dilihat dari data keseluruhan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial paling banyak ada di kapanewon Godean dengan jumlah keseluruhan mencapai 1.636 (8,83 persen) sedangkan kapanewon dengan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial terendah ada di Prambanan sejumlah 636 (3,43 persen) dari seluruh penduduk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di kabupaten Sleman.

4.2.4.2 Penyandang Disabilitas

Jenis penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman terdiri dari eks psikotik, ganda (fisik dan mental), mental retardasi, tuna daksa, tuna netra, tuna rungu wicara dan penyakit kronis dengan total penderita sebanyak 8.502 jiwa. Berdasarkan Data Dinas Sosial Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa jenis penyandang disabilitas paling banyak di Kabupaten Sleman adalah penyandang disabilitas fisik sebanyak 2.940 (34,58 persen), dan yang paling rendah berupa penyandang disabilitas netra sebanyak 434 (5,06 persen). Kapanewon dengan jumlah penyandang disabilitas paling banyak yaitu Gamping dengan

jumlah penyandang disabilitas sebanyak 672 (7,90 persen). Sementara itu, kapanewon dengan jumlah penyandang disabilitas paling sedikit adalah Cangkringan sejumlah kasus 307 (3,61 persen). Yang penting juga untuk dijawab adalah apakah masih ada penyandang disabilitas yang belum terjangkau oleh pendataan, mengingat masih ada persepsi di masyarakat dimana keluarga dengan penyandang disabilitas, memilih menyembunyikan penyandang disabilitas karena rasa malu. Berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas perlu harus di dorong Secara umum, tugas pemerintah adalah memenuhi hak dasar dalam memperoleh hidup, kemudian hak memperoleh layanan kesehatan dan hak mengenyam pendidikan, lalu yang terkecil adalah hak berpartisipasi dalam pembangunan.

Gambar 4.11 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024



Sumber: Dinas Sosial, 2024

Tabel 4. 46 Penyandang Diasabilitas menurut Kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2024

WILAYAH	DISABILITAS FISIK_JML	DISABILITAS NETRA/BUTA_JML	DISABILITAS RUNGU/WICARA_JML	DISABILITAS MENTAL/JIWA_JML	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL_JML	DISABILITAS LAINNYA_JML	JUMLAH
GAMPING	190	57	66	283	15	61	672
GODEAN	121	46	62	286	16	74	605
MOYUDAN	152	29	42	113	18	30	384
MINGGIR	209	9	27	96	6	27	374
SEYEGAN	179	18	32	196	19	36	480
MLATI	218	20	47	165	29	30	509
DEPOK	143	22	55	250	13	58	541
BERBAH	150	19	42	177	17	44	449
PRAMBANAN	144	25	36	122	21	19	367
KALASAN	269	34	58	190	16	49	616
NGEMPLAK	180	24	79	265	24	53	625
NGAGLIK	140	25	65	230	50	73	583
SLEMAN	184	29	53	221	23	42	552
TEMPEL	195	37	52	232	8	121	645
TURI	156	11	39	96	15	64	381
PAKEM	167	11	31	138	19	46	412
CANGKRINGAN	143	18	36	82	13	15	307
SLEMAN	2940	434	822	3142	322	842	8.502

Sumber : Dinas Sosial, 2024

5

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga dan KTP

Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil meliputi biodata, KK, KTP, surat kependudukan dan akta pencatatan sipil. Dokumen tersebut sebagai bukti diri untuk memperoleh berbagai pelayanan publik seperti perbankan, pertanahan, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hukum dan sebagainya. Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: kesadaran penduduk, kedekatan dan kemudahan akses ke tempat pelayanan dokumen, kualitas pelayanan dan kualitas informasi layanan kependudukan. Pemberian dokumen kependudukan bersifat stelsel aktif, dimana penduduk harus aktif untuk melaporkan dan mengurus sendiri dokumen kependudukan mereka, tetapi pemerintah tetap berperan aktif dan berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. Upaya edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran untuk mengupdate data kependudukan merupakan usaha agar data dalam database sesuai dengan dokumen dan realitas yang dialami penduduk.

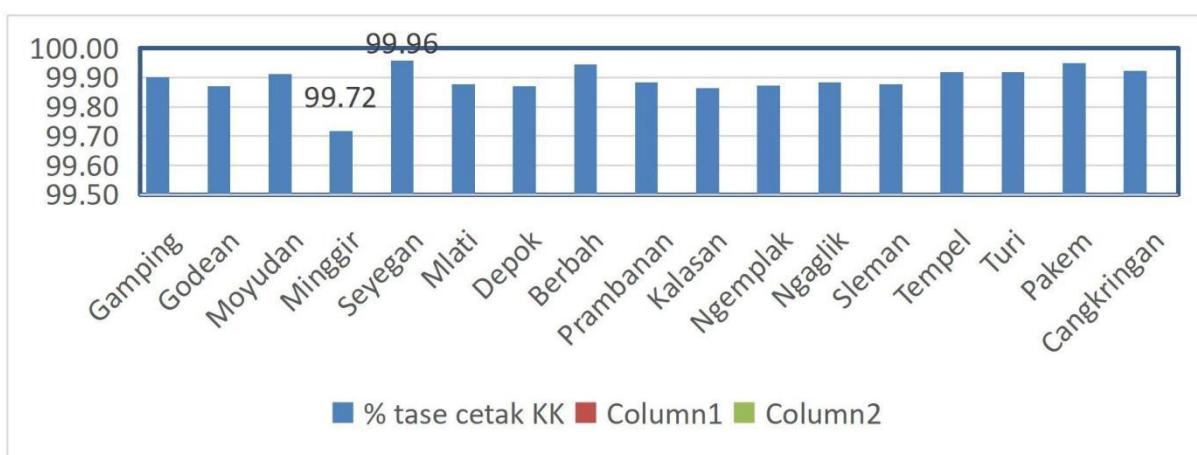
Persentase kepemilikan KTP di Kabupaten Sleman sudah sangat baik, tingkat perekaman KTP ada di angka 100 persen. Tingginya capaian ini merupakan kerja keras dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sleman yang terus berinovasi untuk memberikan pelayanan jemput bola baik melalui pelayanan di tingkat kapanewon dan kalurahan sampai di sekolah untuk pendataan baru bagi warga yang menginjak usia 17 tahun.

Tabel 5. 1 Capaian Persentase Kepemilikan KTP Kabupaten Sleman Tahun 2024

Kapanewon	Jumlah Kepala Keluarga	Wajib KTP	Jumlah Rekam	Jumlah Cetak
Gamping	33.824	75.075	75.075	74.847
Godean	25.623	56.222	56.222	56.088
Moyudan	12.580	26.973	26.973	26.938
Minggir	12.123	25.946	25.946	25.912
Seyegan	18.845	40.918	40.918	40.863
Mlati	33.714	73.970	73.970	73.802
Depok	44.607	98.054	98.054	97.440
Berbah	20.456	44.578	44.578	44.531
Prambanan	19.854	42.594	42.594	42.493
Kalasan	30.510	67.220	67.220	67.116
Ngemplak	23.100	50.787	50.787	50.676
Ngaglik	35.888	79.444	79.444	79.269
Sleman	25.617	55.792	55.792	55.713
Tempel	19.674	42.891	42.891	42.812
Turi	13.526	29.900	29.899	29.867
Pakem	14.108	30.643	30.643	30.556
Cangkringan	11.645	24.957	24.957	24.936
Kabupaten Sleman	395.694	865.964	865.963	863.859

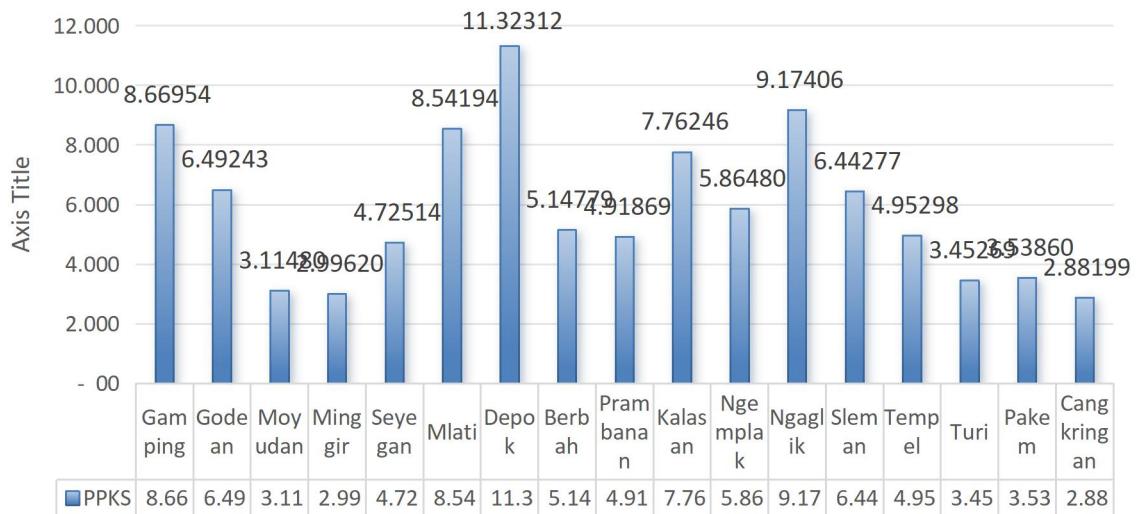
Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2024

Gambar 5. 1 Capaian Persentase Kepemilikan KK



Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2024

Gambar 5.2 Capaian Jumlah Rekam KTP



Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2024

5.2 Kepemilikan Akta Kelahiran

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pada Pasal 68, kutipan Akta Pencatatan sipil meliputi (1) kelahiran; (2) kematian; (3) perkawinan; (4) perceraian; (5) pengakuan anak (6) pengesahan anak.

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan negara atas tatus keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.

Akta kelahiran merupakan identitas awal sekaligus bukti legal yang menunjukkan bahwa seseorang adalah bagian dari warga negara Indonesia. Selain itu, akta kelahiran merupakan bukti sah dan legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya. Dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan

ibunya saja. Kepemilikan akta kelahiran merupakan hal penting untuk memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan, hak waris, pengurus paspor dan dokumen lainnya. Kepemilikan akta kelahiran dihitung dari jumlah bayi lahir dan sudah dicarikan akta kelahiran dan jumlah kelahiran dari wilayah tertentu. Kepemilikan akta kelahiran merupakan hal penting untuk memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan, perbankan, pertanahan, kartu keluarga, hak waris, kesehatan dan dokumen lainnya.

Tabel 5.2. dibawah ini menggambarkan bahwa 0,91 persen dari penduduk di Kabupaten Sleman usia 0-18 tahun belum memiliki akta kelahiran, atau sejumlah 2.497 anak. Penyebab dari banyaknya penduduk yang belum memiliki akta kelahiran adalah prosedur Stelsel pasif dimana kegiatan pencatatan yang menyebabkan petugas relatif menunggu laporan dari masyarakat, meskipun sekarang gencar dilakukan layanan jemput bola sampai ke tingkat padukuhan. Selain itu juga disebabkan anak-anak yang kesulitan ditelusuri asal usulnya atau tidak mempunyai keluarga sehingga kesulitan untuk merunut orang tuanya. Untuk kesadaran penduduk akan pentingnya akta kelahiran ini relatif tinggi. Dengan jumlah kepemilikan akta lahir usia anak sebesar 274.465 anak atau 99,09 persen. Kapanewon dengan cakupan kepemilikan akta lahir paling rendah ada di Depok sejumlah 98,38% dan Mlati sejumlah 98,38%. Sedangkan kapanewon dengan cakupan kepemilikan akta lahir paling tinggi ada di Cangkringan sejumlah 99,77% dan Tempel sejumlah 99,72%. Namun demikian secara angka keberadaan layanan akta lahir di kapanewon Depok dan Mlati sangat tinggi mencapai 30.206, dibandingkan dengan kapanewon Cangkringan sejumlah 8.080 dikarenakan jumlah penduduk di kapanewon tersebut yang sangat jauh perbedaannya.

Tabel 5. 2 Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran Kabupaten Sleman Tahun 2024

Kapanewon	Jml pnddk 0-18 th	Memiliki akta lahir	%	Tdk memiliki	%
				akta lahir	
GAMPING	23.614	23.339	98,84	275	1,16
GODEAN	17.339	17.173	99,04	166	0,96
MOYUDAN	7.451	7.418	99,56	33	0,44
MINGGIR	7.187	7.158	99,60	29	0,40
SEYEGAN	12.957	12.912	99,65	45	0,35
MLATI	23.420	23.065	98,48	355	1,52
DEPOK	30.702	30.206	98,38	496	1,62
BERBAH	14.447	14.385	99,57	62	0,43
PRAMBANAN	13.908	13.844	99,54	64	0,46
KALASAN	21.800	21.565	98,92	235	1,08
NGEMPLAK	16.906	16.804	99,40	102	0,60
NGAGLIK	26.266	25.876	98,52	390	1,48
SLEMAN	18.170	18.075	99,48	95	0,52
TEMPEL	13.421	13.383	99,72	38	0,28
TURI	9.341	9.291	99,46	50	0,54
PAKEM	9.437	9.394	99,54	43	0,46
CANGKRINGAN	8.099	8.080	99,77	19	0,23
SLEMAN	274.465	271.968	99,09	2497	0,91

Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2024

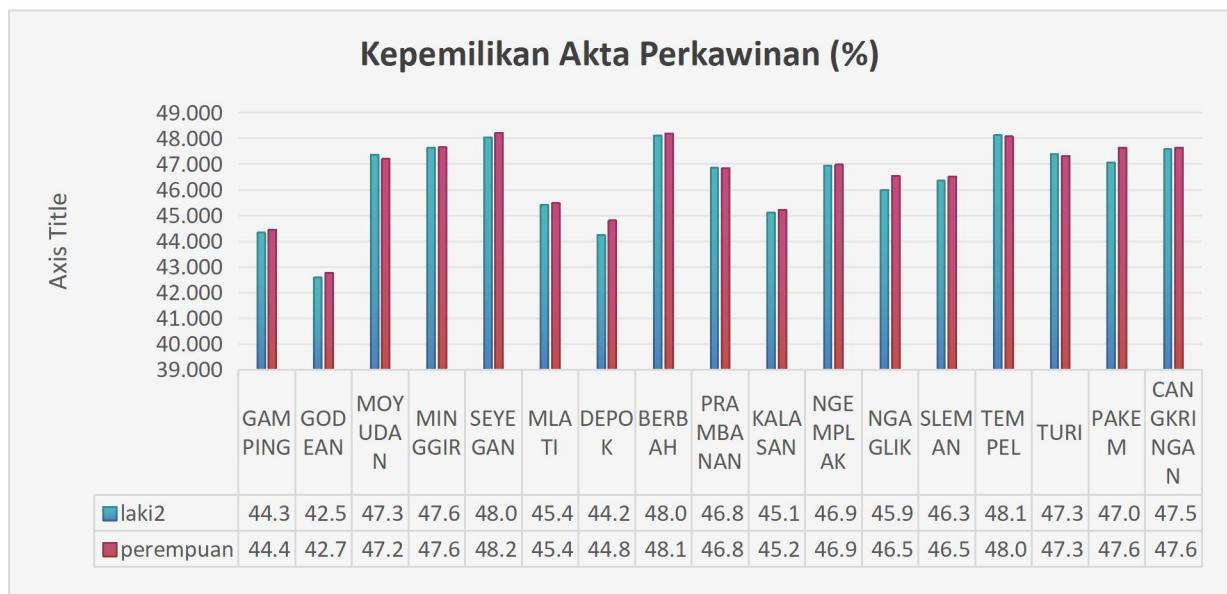
5.3 Kepemilikan Akta Perkawinan

Akta perkawinan adalah suatu legalitas untuk menentukan status hukum laki- laki dan perempuan bahwa mereka terikat sebagai suami isteri. Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kepada penduduk non muslim, sedangkan penduduk muslim menggunakan buku nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bukti legal perkawinan mereka. Kepemilikan akta perkawinan yang dihitung adalah akta perkawinan yang dicatatkan dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Sleman masih panjang. Tabel 5.3. menunjukkan bahwa dokumen-dokumen penting banyak yang belum dimiliki oleh masyarakat. Terdapat 92,98 persen penduduk dengan status kawin sudah melaporkan akta kawin dan 7,02 persen belum melaporkan akta kawin sehingga terlaporkan belum memiliki akta kawin. Status kawin tercatat diperlukan terutama menyangkut hak-hak perdata suami-istri.

Kapanewon dengan kepemilikan akta kawin tertinggi ada di Seyegan, yaitu 96,25 persen atau 25.696 jiwa dari jumlah penduduk berstatus kawin sebanyak 26.696 jiwa. Sedangkan kepemilikan akta kawin terendah ada di kapanewon Godean sebesar 85,35 persen atau sejumlah 30.858 jiwa dari total 36.155 jiwa yang berstatus kawin.

Gambar 5.3 Kepemilikan Akta Perkawinan



Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2024

Tabel 5. 3 Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan Kabupaten Sleman Tahun 2024

No.	Kapanewon	Kawin			Memiliki Akta Kawin			% memiliki akta kawin	Belum memiliki akta kawin	% belum memiliki akta kawin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah			
1	GAMPING	23.872	24.040	47.912	21.242	21.297	42.539	88,79	5.373	11,21
2	GODEAN	18.046	18.109	36.155	15.396	15.462	30.858	85,35	5.297	14,65
3	MOYUDAN	8.593	8.620	17.213	8.152	8.125	16.277	94,56	936	5,44
4	MINGGIR	8.305	8.386	16.691	7.951	7.954	15.905	95,29	786	4,71
5	SEYEGAN	13.313	13.383	26.696	12.826	12.870	25.696	96,25	1.000	3,75
6	MLATI	23.399	23.471	46.870	21.282	21.316	42.598	90,89	4.272	9,11
7	DEPOK	30.096	30.583	60.679	26.843	27.188	54.031	89,04	6.648	10,96
8	BERBAH	14.355	14.375	28.730	13.819	13.846	27.665	96,29	1.065	3,71
9	PRAMBANAN	14.326	14.308	28.634	13.416	13.413	26.829	93,70	1.805	6,30
10	KALASAN	21.471	21.652	43.123	19.451	19.501	38.952	90,33	4.171	9,67
11	NGEMPLAK	16.430	16.642	33.072	15.526	15.536	31.062	93,92	2.010	6,08
12	NGAGLIK	25.330	25.718	51.048	23.477	23.756	47.233	92,53	3.815	7,47
13	SLEMAN	17.823	17.969	35.792	16.591	16.651	33.242	92,88	2.550	7,12
14	TEMPEL	13.913	13.941	27.854	13.404	13.391	26.795	96,20	1.059	3,80
15	TURI	9.722	9.750	19.472	9.227	9.214	18.441	94,71	1.031	5,29
16	PAKEM	9.756	9.889	19.645	9.243	9.359	18.602	94,69	1.043	5,31
17	CANGKRINGAN	8.512	8.534	17.046	8.110	8.121	16.231	95,22	815	4,78
KAB. SLEMAN		277.262	279.370	556.632	255.956	257.000	512.956	92,98	43.676	7,02

Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2024

5.4 Kepemilikan Akta Perceraian

Akta perceraian adalah suatu bukti otentik tentang putusnya suatu ikatan perkawinan. Akta Perceraian merupakan bukti sahnya perceraian yang diperlukan sebagai dasar legalitas putusnya perkawinan dan perubahan status sebagai janda atau duda cerai hidup, pengurusan hak tunjangan anak dari suami istri, harta gono gini, dan perkawinan setelah perceraian.

Di Kabupaten Sleman sebanyak 15,35 persen perceraian belum memiliki akta perceraian. Untuk kepemilikan akta cerai tertinggi ada di kapanewon Sleman sejumlah 89 persen atau 2.015 jiwa dari 2.264 penduduk berstatus cerai. Sedangkan terendah kepemilikan akta cerai ada di kapanewon Turi sejumlah 77,14 persen atau 857 jiwa dari 1.111 penduduk berstatus cerai. Akibatnya jika tidak memiliki akta perceraian yaitu mendapatkan kesulitan untuk menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda yang bebas dari ikatan perkawinan, dan sulit untuk menentukan status perdata seseorang untuk bebas mencari pasangan lain atau yang hendak menikah lagi.

Manfaat akta perceraian bagi masyarakat tidak sebesar manfaat akta kelahiran sehingga masyarakat kurang peduli terhadap dokumen tersebut. Akta perceraian akan diurus ketika masyarakat hendak melakukan pengurusan hak-hak tunjangan atau pembagian harta. Namun demikian, selain untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan sosialisasi kelengkapan dokumen pada masyarakat atas semua kejadian demografi tetap harus dilakukan.

Tabel 5. 4 Kepemilikan Dokumen Akta Perceraian Kabupaten Sleman Tahun 2024

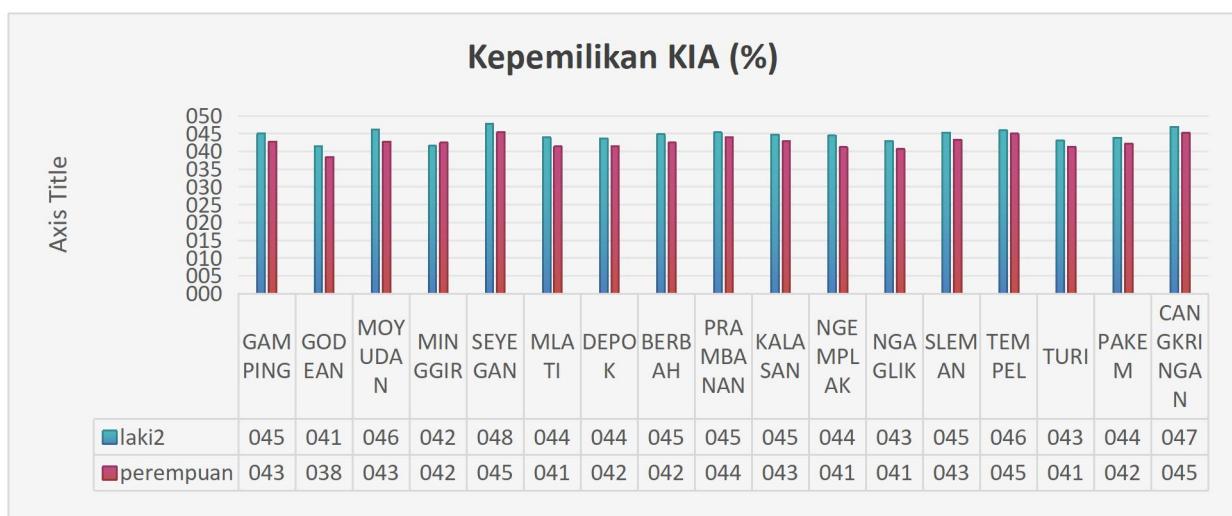
No.	Kapanewon	Cerai			Memiliki Akta Cerai			% Memiliki Akta Cerai	Belum Memiliki Akta Cerai
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	GAMPING	838	1.219	2.057	782	1.044	1.826	88,77	11,23
2	MOYUDAN	603	888	1.491	504	649	1.153	77,33	22,67
3	MINGGIR	222	305	527	201	236	437	82,92	17,08
4	SEYEGAN	240	323	563	217	241	458	81,35	18,65
5	MLATI	452	632	1.084	396	453	849	78,32	21,68
6	DEPOK	974	1.427	2.401	802	1.116	1.918	79,88	20,12
7	BERBAH	1.169	1.902	3.071	1.047	1.591	2.638	85,9	14,10
8	PRAMBANAN	503	783	1.286	457	649	1.106	86	14,00
9	KALASAN	455	631	1.086	414	544	958	88,21	11,79
10	NGEMPLAK	782	1.206	1.988	702	988	1.690	85,01	14,99
11	NGAGLIK	557	865	1.422	526	723	1.249	87,83	12,17
12	SLEMAN	842	1.422	2.264	786	1.229	2.015	89	11,00
13	TEMPEL	623	911	1.534	579	745	1.324	86,31	13,69
14	TURI	485	626	1.111	394	463	857	77,14	22,86
15	PAKEM	304	456	760	267	353	620	81,58	18,42
16	CANGKRINGAN	337	502	839	318	448	766	91,3	8,70
	KAB. SLEMAN	9.647	14.454	24.101	8.643	11.759	20.402	84,65	15,35

Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2024)

5.5 Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Anak sebagai bagian dari warga negara berhak memiliki identitas yang diwujudkan dalam bentuk kartu identitas anak (KIA). Kepemilikan KIA di Kabupaten Sleman meningkat dari tahun ke tahun seiring perkembangan layanan auto pada saat penerbitan akta kelahiran dan peningkatan kesadaran penduduk untuk mengajukan penerbitan KIA.

Gambar 5.4 Kepemilikan Kartu Identitas Anak



Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2024

Gambar 5.5 Kepemilikan Kartu Identitas Anak



Sumber data : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester II, 2024